HNW AJAK RT/RW SUKSESKAN PEMILU JADI PESTA DEMOKRASI RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EDISI NO.12/TH.XVII/DESEMBER 2023

Masa Kampanye Pemilu 2024

Mari Berkampanye Secara Damai SEHAT DAN BERADAB

ISSN 0854-6371

18 Nasional
Ingatkan Jelang Pemilu Hati-hati Jangan Terprovokasi

32 Kajian MPR
Mengurai Prosedur Amandemen UUD

39 Selingan
100 Tahun Gontor dari Tegalsari Menuju Dunia

65 Sosialisasi
Pentingnya Netralitas TNI dalam Pemilu

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Masa Kampanye Pemilu 2024

Pada masa kampanye Pemilu 2024 yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 ini para elit politik serta peserta Pemilu diharapkan senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi, seperti Golput, money politics, politik identitas, ujaran kebencian, dan provokasi.

18 Nasional
Bamsoet Ingatkan Jelang Pemilu Hati-hati Jangan Terprovokasi

58 Sosialisasi
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di BINUS

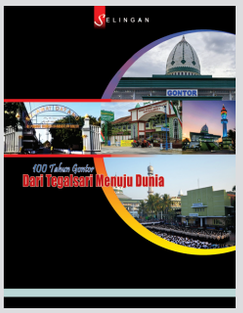

39 SELINGAN
100 Tahun Gontor

86 Profil
Siti Fauziah

Pengantar Redaksi 04
Perspektif 06
Aspirasi Masyarakat 47
Gema Pancasila 50
Varia MPR 70
Kolom 78
Wawancara 80
Figur 82
Ragam 84
Dari Rumah Kebangsaan 90
Rehal 92

COVER
Edisi No.12/TH.XVII/Desember 2023
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Mari Berkampanye dengan Damai, Sehat, dan Beradab

PEMILU 2024 sudah memasuki tahapan masa kampanye. Tepatnya sejak Selasa, 28 November 2023, masa kampanye Pemilu 2024 secara resmi dimulai. Masa kampanye ini akan berlangsung selama 75 hari ke depan, hingga 10 Februari 2024. Masa kampanye ini tidak hanya diikuti calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), tetapi juga para calon legislatif (Caleg) DPR, DPD, dan DPRD. Namun, perhatian masyarakat agaknya lebih tertuju pada kampanye tiga pasang Capres dan Cawapres, yaitu: pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Pemilu memang seringkali identik dengan kampanye. Melalui kampanye peserta Pemilu, baik Capres dan Cawapres maupun Caleg, meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Itu sebabnya kampanye Pemilu menjadi tahapan yang paling krusial bagi para peserta Pemilu untuk meraih dukungan para pemilih guna memenangkan pemilihan. Peserta Pemilu pun berlomba dengan beragam cara dan upaya menarik perhatian dan dukungan para pemilih.

Berkaca pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, suasana kampanye Pemilu pada saat itu sangat hiruk pikuk karena kontestasi Pilpres hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres yang berhadap-hadapan. Masyarakat pun terbelah, muncul istilah Cebong dan Kampret. Saat itu marak kampanye negatif dan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye negatif dan kampanye hitam ini membawa dampak tersendiri bagi Pemilu dan memancing ketegangan sosial.

Pada kenyataannya, kampanye tidak selalu berisi ajakan memilih dengan nilai-nilai positif, tetapi juga diisi dengan aspek-aspek negatif seperti menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang salah satu kandidat dengan maksud menjatuhkan citra kandidat tersebut. Media sosial (Twitter atau X, Facebook, Instagram, Youtube, dan TikTok) menjadi sarana penyebaran kampanye negatif dan kampanye hitam. Banyak kalangan yang mengkhatirkan situasi seperti Pemilu 2019 itu kembali muncul pada masa kampanye Pemilu 2024.

Untuk mengantisipai dan mencegah maraknya kampanye negatif dan kampanye hitam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar "Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024" di halaman Gedung KPU, pada Senin, 27 November 2023. Deklarasi ini diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres serta partai politik peserta Pemilu. Di hadapan para komisioner KPU, tiga pasangan Capres dan Cawapres serta perwakilan partai politik menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024.

Pada hari yang sama, tiga pasangan Capres dan Cawapres juga menghadiri Deklarasi Kampanye Damai, Tertib, dan Taat Hukum dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Acara yang diselenggarakan Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan ini bertujuan untuk persiapan penyelenggaraan kampanye Pemilu 2024 agar berjalan netral dan damai.

Kedua deklarasi itu menjadi sebuah harapan agar para Capres dan Cawapres serta peserta Pemilu 2024 dapat berkomitmen untuk kampanye yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), serta tanpa politik uang. Kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditulis dalam laporan utama *Majelis* edisi Desember 2023 ini, mengutip pesan Ketua MPR Bambang Soesatyo, dalam masa kampanye 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, para elite politik dan kontestan Pemilu hendaknya harus senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi seperti Golput, money politics, politik identitas, ujaran kebencian dan provokasi.

Mari kita lakukan kampanye secara damai, sehat, dan beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau menyerang calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain tanpa memaksakan pilihan kita. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Plt. Siti Fauziah
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Indro Gutomo
KOORDINATOR REPORTASE
Dhina Kurnia Winanda
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta, Alfonso DK Tahapary
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

Selamat Natal
&
Tahun Baru 2024

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara
INDONESIA

Indonesia Memilih Pemimpin Ketika Ketidakpastian Global Terekalasi

ESKALASI ketidakpastian global yang berkelanjutan memberi penjelasan sangat gamblang kepada semua orang bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Ada perang dan konflik bersenjata di sejumlah kawasan. Ekses ketidak-pastian global ini hendaknya digarisbawahi oleh para calon presiden karena nyata-nyata telah menghadirkan dampak negatif bagi dinamika kehidupan masyarakat.

Berpijak pada fakta tentang berlarut-larutnya perang antara Rusia versus Ukraina sejak pekan keempat Februari 2022, publik dalam negeri sudah tahu dengan sendirinya bahwa dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpastian global akibat konflik bersenjata di kawasan Eropa Timur itu kemudian tereskalasi oleh perang antara Hamas dengan Israel di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, jutaan arus pengungsi dari Afrika ke berbagai belahan dunia terus berlangsung karena sejumlah negara di benua itu belum mampu menyudahi konflik bersenjata. Ada laporan yang mengungkap bahwa lebih dari 40 juta jiwa telah mengungsi dari Afrika dalam satu dekade terakhir karena rentetan konflik bersenjata di benua itu.

Asia Tenggara, dan kawasan Asia secara keseluruhan, pun menyimpan potensi masalah serius terkait dengan klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan (LCS) yang ditentang sejumlah negara. Faktor LCS, mau tak mau, harus diakui juga menyimpan potensi ketidakpastian. Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam masalah ini bahkan menjadikan LCS ibarat api dalam sekam yang setiap saat bisa mengganggu tekad dan semangat ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) merawat stabilitas kawasan ini. Belum lagi dengan posisi AS yang terang-terangan menentang klaim Tiongkok atas Taiwan.

Selain oleh perang dan konflik, ketidakpastian global semakin diperparah oleh rangkaian dampak atau ekses perubahan iklim karena berubahnya pola hujan, peningkatan suhu bumi, menurunnya kualitas sumber daya air dan lahan, serta aneka ragam bencana, termasuk kekeringan. Semua ekses perubahan iklim berdampak nyata pada menurunnya produksi tanaman pangan, karena gagal panen terjadi di berbagai belahan dunia.

Semua fakta itu menjadi penjelasan yang cukup komprehensif untuk membenarkan bahwa dunia nyata-nyata sedang terperangkap dalam situasi tidak stabil. Setelah faktor pandemi Covid-19 yang masih menyisakan begitu banyak masalah, destabilisasi dunia juga disebabkan oleh rivalitas antar-kekuatan besar seperti AS di satu sisi, yang berhadapan dengan Rusia-Tiongkok di sisi lain dalam konteks hegemoni politik dan ekonomi. Semua berharap para pemimpin bangsa-bangsa di Asia bisa mengelola benturan kepentingan di LCS dengan penuh kebijaksanaan dengan menghindari pengerahan kekuatan militer agar Asia tetap menjadi benua yang kondusif.

Ketidakpastian global yang terus tereskalasi itu pasti menghadirkan dampak bagi Indonesia. Bahkan sejumlah dampak ketidakpastian itu dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain dalam wujud fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga bahan pangan. Sepanjang tahun ini, harga beras premium maupun medium terus mengalami kenaikan. Per September 2023 misalnya, tercatat bahwa harga beras premium naik 13,29% dan harga beras medium melonjak 16,79%. Impor beras untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri menjadi tidak mudah karena dunia saat ini terus dibayangi ketidakpastian.

Dinamika global yang tidak kondusif seperti itulah yang akan membayangi proses pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2024. Pada Februari 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota DPR (Pileg). Kalau segala sesuatunya berjalan lancar, akan tampil administrasi pemerintahan baru di penghujung Oktober 2024. Menuju Februari 2024, masyarakat sudah disuguhi tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (Capres-Cawapres).

Oleh karena ketidakpastian global sekarang berpotensi menghadirkan dampak cukup serius bagi masyarakat, para kandidat Capres-Cawapres diharapkan memberi perhatian ekstra. Berpijak pada situasi saat ini, dapat dikatakan bahwa tantangan utama bagi pemimpin pemerintahan baru hasil Pilpres 2024 adalah kemampuan mewujudkan ketersediaan bahan pangan – utamanya beras – dalam jumlah yang memadai dengan harga yang terjangkau oleh seluruh

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI

lapisan masyarakat.

Faktor harga beras yang saat ini cenderung terus mengalami kenaikan hendaknya digarisbawahi. Patut dipahami bahwa kenaikan harga beras dan bahan pangan lain yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena alasan mekanisme pasar, melainkan lebih karena alasan adanya gangguan atau kerusakan pada mata rantai pasokan global (supply chain disruption). Oleh karena gangguan rantai pasok itu disebabkan perang dan konflik, tidak mudah untuk mengatasinya karena tidak ada yang tahu kapan perang dan konflik itu akan berakhir.

Selain itu, menurunnya produksi bahan pangan akibat perubahan iklim menyebabkan sejumlah negara produsen untuk sementara menghentikan atau mengurangi volume ekspor, karena lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Artinya, dengan pendekatan harga yang tinggi sekalipun tidak akan menggoyahkan negara produsen bahan pangan untuk menjual atau mengekspor produk mereka karena alasan memrioritaskan kebutuhan negara masing-masing.

Maka, ketika produksi beras dalam negeri – dan juga bahan pangan lain— belum dapat menutup total kebutuhan atau permintaan masyarakat, persoalan yang akan mengemuka di ruang publik adalah minimnya stok beras yang kemudian mendorong lonjakan harga. Potensi masalah seperti inilah yang patut diwaspadai dan dicermati olah para kandidat Capres-Cawapres. Potensi krisis pangan berskala global di tahun-tahun mendatang akan menjadi tantangan dan persoalan riil yang dihadapi banyak pemimpin negara, termasuk Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, ketersediaan bahan pangan dalam volume dan jumlah yang memadai adalah keniscayaan. Data historis dan pengalaman pun mengajarkan dan mengingatkan bahwa produksi bahan pangan dalam negeri belum dapat memenuhi total kebutuhan dan permintaan masyarakat, sehingga kekurangannya harus di impor. Impor bahan pangan di tahun-tahun mendatang pun belum tentu lebih mudah karena ketidakpastian global terus tereskalasi.

Sekadar menyegarkan ingatan, untuk menutup permintaan dan kebutuhan masyarakat, Indonesia hingga kini masih harus impor belasan komoditi bahan pangan. Mulai dari beras, jagung, susu, minyak goreng nabati, mentega, kopi, kentang, kedelai, kakao, gula, gandum dan meslin hingga Cengkeh. Per 2022, nilai impor bahan pangan Indonesia dilaporkan mencapai 16,09 miliar dolar AS atau sekitar Rp 248,63 triliun. Nilai ini cukup memberi gambaran tentang tingginya ketergantungan Indonesia akan bahan pangan impor.

Maka, selain terus melakukan pendekatan impor untuk mengamankan ketersediaan bahan pangan di tahun-tahun mendatang, para kandidat Capres-Cawapres didorong untuk lebih bersungguh-sungguh mewujudkan program food estate. Potensi besar tanaman pangan yang sangat beragam di berbagai daerah jangan disia-siakan.

Untuk merespons persoalan dan tantangan ketersediaan bahan pangan yang semakin serius di tahun-tahun mendatang akibat perubahan iklim, pemimpin Indonesia hendaknya segera mengerahkan dan menggunakan semua daya dan potensi yang tersedia untuk segera mewujudkan program food estate. ❑

Masa Kampanye Pemilu 2024

Mari Berkampanye Secara Damai, Sehat, dan Beradab

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pada masa kampanye Pemilu 2024 yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 ini para elit politik serta peserta Pemilu diharapkan senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi, seperti Golput, money politics, politik identitas, ujaran kebencian, dan provokasi.

SEJAK Selasa, 28 November 2023, kampanye Pamilu 2024 secara resmi dimulai. Masa kampanye ini akan berlangsung selama 75 hari ke depan, tepatnya berakhir pada 10 Februari 2024. Kampanye dilaksanakan secara serentak, meliputi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan polarisasi dalam masyarakat pada masa kampanye ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar "Deklarasi Pemilu Damai 2024" pada Senin, 27 November 2023. "Deklarasi Pemilu Damai 2024" dihadiri langsung oleh tiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), serta partai politik peserta Pemilu. Deklarasi digelar di halaman Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah panggung dan tenda khusus didirikan untuk deklarasi tersebut. Area jalan sekitar KPU juga ditutup.

Sejak pukul 14.00 WIB, para Capres dan Cawapres mulai berdatangan secara terpisah dalam deklarasi yang digelar pukul 15.00 WIB ini. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD tiba paling awal di lokasi, sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian disusul oleh Capresnya, yakni Ganjar Pranowo yang tiba pukul 14.15 WIB. Sekitar pukul 14.20 WIB, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kompak hadir mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

Sementara, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kompak mengenakan kemeja biru muda. Keduanya tiba sekitar pukul 14.45 WIB. Sejumlah massa pendukung dari para Capres dan Cawapres juga mendatangi KPU untuk mendukung pasangan calon pemimpin pilihannya. Kegiatan deklarasi itu turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu.

Sekitar pukul 15.00 WIB, acara deklarasi dimulai dengan penampilan tari-tarian tradisional. Deklarasi didahului dengan kirab bendera Pemilu 2024. Mereka membawa 18 bendera partai politik peserta Pemilu tahun depan. KPU menyebutkan, kirab dengan membawa 18 bendera partai politik itu juga dilakukan estafet di setiap provinsi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait peserta Pemilu. Sebagai simbolisasi, Ketua KPU Hasyim Asyari menyerahkan bendera partai politik itu kepada masing-masing perwakilan parpol peserta Pemilu 2024 sesuai nomor urut.

Ketua KPU Hasyim Asyari kemudian membacakan Deklarasi Pemilu 2924 yang diikuti oleh para Capres dan Cawapres. Adapun Naskah Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 berbunyi : (1) mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan adil; (2) melaksanakan kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang; (3) melaksanakan kampanye Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian diteruskan dengan penandatangan dokumen deklarasi. Naskah Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 ditandatangani oleh tiga pasangan Capres dan Cawapres, yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Penandatanganan juga melibatkan seluruh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024.

Menurut Hasyim Asyari, Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 adalah momentum yang penting bagi sesama anak bangsa, sesama peserta Pemilu untuk meneguhkan niat dan menyatakan sikap berkolaborasi, bergandengan tangan menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Penandatangan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 merupakan komitmen yang dinyatakan oleh para peserta Pemilu untuk bersama-sama melaksanakan Pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatif-an lawan politiknya, tapi mempromosikan diri, menunjukkan hal-hal baik. Pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta Pemilu karena aspek-aspek keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing peserta Pemilu, apakah itu partai politik, maupun pasangan Capres dan Cawapres," katanya.

Sebelum deklarasi damai di KPU, ketiga pasangan Capres dan Cawapres juga resmi menandatangani Deklarasi Kampanye Damai, Tertib dan Taat Hukum dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Grand Sahid Jaya, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Acara yang diselenggarakan Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan kampanye Pemilu 2024 agar berjalan netral dan damai.

Isi dari deklarasi tersebut, yakni: *Pertama*, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman tertib dan damai selama penyelenggaraan Pemilu. *Kedua,* melaksanakan kampanye Pemilu dengan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye Pemilu. *Ketiga,* tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan Pemilu, serta tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye.

Peran Bawaslu dan Media

Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan penyelenggaraan Pemilu 2024 diwarnai dengan dinamika. Isu yang mengemuka adalah soal kecurangan dan ketidaknetralan. Beberapa peristiwa, misalnya penggusuran baliho dan spanduk partai politik, pemanggilan kepala desa, aparatur kepolisian mendatangi kantor perwakilan partai politik dan lainnya. Termasuk juga adanya pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres, hal yang

Budi Arie Setiadi

sama juga terjadi di Majalengka. Artinya, Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 masih diwarnai pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

Belum lagi, kampanye yang menggunakan media social, seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, Youtube, dan Tiktok. Media sosial sering digunakan untuk kampanye negatif dan kampanye hitam (lihat bagian dua, "Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam dalam Pemilu"). Media sosial menjadi wahana yang sering dipakai untuk menyebarkan isu berupa foto, video, dan lainnya yang mengandung berita bohong atau hoaks untuk menjatuhkan lawan politik.

Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) telah melakukan survei pada periode 1-5 November 2023 atau dua pekan sebelum masa kampanye Pemilu 2024. Hasil penelitian Mafindo menemukan 19 hoaks terkait Pemilu 2024. Temuan Mafindo sejalan dengan temuan Kominfo. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Kominfo telah menindak 96 isu hoaks terkait Pemilu 2024.

"Tapi kita sudah takedown dan kita bersihkan," kata Budi Arie Setiadi pada Sabtu, 2 Desember 2023. Konten-konten negatif tersebut terdapat di berbagai akun dunia maya. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks Pemilu yang tersebar menjadi 355 konten. Namun, Budi mengatakan, konten yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian pada Pemilu 2024 ini tidak sebanyak Pemilu 2019 lalu. "Dibanding 2019 jauh lebih menurun drastis. Tahun ini jauh lebih kondusif," ucapnya.

Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA, pun mengakui bahwa suasana Pemilu tahun 2024 ini tidak seperti pada Pemilu 2019 yang diwarnai polarisasi tajam (keterbelahan) di masyarakat. Salah satu faktornya adalah pemilihan presiden tahun 2024 ini diikuti tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. "Ini menjadi pembeda yang sangat jelas dibanding Pemilu sebelumnya. Kontestasi tiga pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 ini tidak seperti Pemilu 2019 yang hanya diikuti dua pasang Capres dan Cawapres yang saling berhadap-hadapan," katanya kepada *Majelis*.

Meski demikian, HNW sapaan Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, sampai sekarang masih ada yang mengkritisi pelaksanaan Pemilu terkait dengan ketidakadilan. Ini terbukti dari adanya spanduk atau baliho calon tertentu yang digusur, sedangkan spanduk atau baliho calon yang lain tidak digusur. "Ini memang bagian dari ketidakjujuran dan ketidakadilan. Dan, ini menjadi bagian yang sangat disayangkan kalau Bawaslu hanya diam dan malah terlihat permisif, bahkan membiarkan ketidakadilan ini berlanjut. Kalau tidak ada tindakan yang tegas dan terukur, peristiwa itu dapat menjadi pembenaran dan kekhawatiran tentang bagaimana nanti akan berbuat adil kalau sekarang saja tidak adil," tuturnya.

Selain Bawaslu, menurut HNW, sangat penting juga peran dari media, termasuk rakyat dan mahasiswa, untuk meneriakkan kembali bahwa siapa pun yang berlaku tidak adil dan tidak jujur maka justru tidak akan dipilih. "Siapa pun yang membiarkan atau menikmati ketidakadilan dan ketidakjujuran ini tidak akan dipilih. Siapa pun yang membiarkan rakyat menjadi korban dari ketidakadilan dan ketidakjujuran, rakyat yang sudah sangat kritis ini penting sekali lagi mendeklarasikan bahwa mereka hanya akan memilih pemimpin yang jujur dan adil," imbuhnya.

Sependapat dengan HNW, anggota MPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, juga menekankan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mewujudkan Pemilu yang damai. Bawaslu harus berani menindak jika terjadi pelanggaran Pemilu 2024. Di samping itu, peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tidak kalah pentingnya. Media memainkan peran untuk mewujudkan Pemilu damai.

"Masa kampanye 75 hari ke depan akan sangat penuh dinamika dan bisa memunculkan ketidakdamaian kalau peraturan tidak diterapkan dengan tegas," katanya usai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema: "Pemilu Berlangsung Damai akan Melahirkan Pemimpin Penuh Kedamaian" di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.

Menurut Guspardi Gaus, penyelenggara Pemilu harus taat asas hukum. Jadi, harus tegak lurus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penyelenggara Pemilu tidak

Hidayat Nur Wahid

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Achmad Baidowi

boleh diintervensi pihak manapun. "Bawaslu harus bisa menegakkan aturan-aturan pada masa kampanye yang dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Pada masa kampanye itu penuh dengan dinamika," ujar anggota Komisi II DPR yang membidangan pemerintah dalam negeri, termasuk soal Pemilu.

Guspardi menambahkan, dalam masa kampanye akan muncul potensi ketidakdamaian kalau seandainya Bawaslu melakukan tebang pilih dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, memilih pelanggaran yang ditindaklanjuti atau diproses dan lain sebagainya. "Karena itu saya sangat tegas menyatakan bahwa Bawaslu harus punya keberanian, tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melakukan pelanggaran, baik calon presiden atau peserta Pemilu lainnya, para calon legislatif termasuk saya sebagai Caleg, Bawaslu harus memproses sebagai bagian untuk menuju pelaksanaan Pemilu damai," tegasnya.

Selain itu, politisi PAN ini juga menyebutkan, media berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pemilu. "Jadi, kunci daripada semua persoalan itu adalah saya harap tidak hanya kita tumpahkan kepada Bawaslu, tetapi yang lebih punya peran penting adalah teman-teman media," ujarnya.

Melalui "mata pena media" yang menjangkau seluruh pelosok negeri, Guspardi pun berharap, para jurnalis bisa memviralkan kejanggalan pelaksanaan Pemilu sehingga menjadi efek jera pada orang-orang yang melakukan pelanggaran. "Yang paling signifikan, media mampu menciptakan suasana damai dengan kritikan terhadap pelanggaran sehingga muncul rasa malu pada pelaku pelanggaran. Orang sudah tidak takut dengan sebuah hukuman yang diberikan kepadanya, tetapi ketika bentuk hukumannya berupa informasi yang viral maka akan timbul rasa malu," imbuhnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, melihat, Pemilu 2024 sepertinya berjalan dalam suasana yang kondusif. Hal ini sangat berbeda dengan suasana pada Pemilu 2019 lalu. "Kalau kita lihat tanda-tandanya hampir kecil akan ada kisruh Pemilu dan sebagainya. Terbukti tinggal beberapa bulan lagi, tidak seperti berasa ada Pemilu. Coba bandingkan dengan tahun 2019. Itulah yang menyebabkan Pemilu 2024 ini kurang ramai dan tidak hiruk pikuk," katanya.

Namun, Achmad Baidowi menekankan, jangan sampai ada penggunaan struktur negara atau aparatur negara untuk memenangkan calon tertentu. Bila negara terlibat maka akan terjadi chaos. Demokrasi yang sudah dibangun bisa rusak karena hasrat kekuasaan. "Kuncinya, bagaimana negara atau pemerintah yang memiliki alat negara dan infrastruktur negara ini tidak digunakan untuk kepentingan calon tertentu. Jadi, jangan hanya peserta yang dituntut untuk riang gembira, tetapi penyelenggara Pemilu, pemerintah juga harus memperlakukan semua peserta Pemilu

Bambang Soesatyo

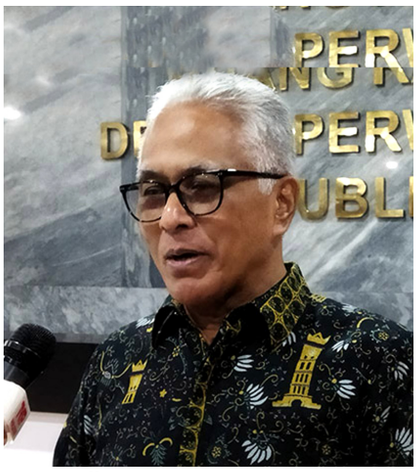

Guspardi Gaus

dengan adil sesuai ketentuan perundang-undangan," sambungnya.

Terkait masa kampanye ini, maka sangat relevan ketika Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, pada masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 ini para elit politik serta peserta Pemilu harus senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi, seperti Golput, money politics, politik identitas, ujaran kebencian, dan provokasi.

"Mari kita lakukan kampanye secara damai, sehat, dan beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau menyerang calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain, tanpa memaksakan pilihan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua memiliki niat dan harapan yang baik untuk bangsa dan negara. Marilah kita bergandengan tangan, bersatu padu dan bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita. Jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian bangsa ini terpecah belah," ujar Ketua MPR dalam Pelantikan Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu, di Ruang Delegasi Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. "Pemilu 2024 adalah kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggungjawab," ucapnya. ❑

MBO/BSC

Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam dalam Pemilu

Kampanye tidak melulu dipenuhi ajakan memilih suatu kandidat dengan nilai-nilai positif, tetapi juga diisi dengan aspek negatif peserta Pemilu, misalnya menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang salah satu kandidat dengan maksud menjatuhkan citra kandidat tersebut.

KAMPANYE Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sedang berlangsung, mulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kampanye ini bukan hanya untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga pemilihan calon anggota legislatif. Jadi, kurun waktu kampanye itu bukan hanya diikuti tiga pasang Capres dan Cawapres, yaitu pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD, tetapi juga seluruh Caleg mengikuti tahapan penting dalam Pemilu ini.

Pemilu memang seringkali identik dengan kampanye. Jika mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra dari peserta Pemilu.

Kampanye Pemilu menjadi tahapan yang paling krusial bagi para peserta Pemilu. Sebab, pada masa itulah peserta Pemilu berkesempatan mengenalkan diri dan visi serta misi secara langsung kepada calon pemilih. Untuk itu, bisa dipastikan para peserta Pemilu akan berlomba menawarkan gagasan kepada publik atau masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri, perhatian publik lebih tertuju pada kampanye pasangan Capres dan Cawapres. Masyarakat lebih antusias dengan kampanye Capres dan Cawpres dibandingkan kampanya para Caleg.

Berkaca pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, memang ada beberapa kekhawatiran saat kampanye karena kerap diwarnai kecurangan. Lalu, muncul istilah kampanye negatif dan kampanye hitam (black campaign). Pasalnya, kampanye negatif dan kampanye hitam ini memberi dampak tersendiri bagi Pemilu, baik secara hukum maupun memancing ketegangan sosial. Kampanye tidak melulu dipenuhi ajakan memilih suatu kandidat dengan nilai-nilai positif, tetapi juga diisi dengan aspek negatif peserta Pemilu, misalnya menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang salah satu kandidat dengan maksud menjatuhkan citra kandidat tersebut.

Dalam artikel yang ditulis Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin berjudul: "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign)" disebutkan bahwa kampanye hitam lebih berfokus pada upaya menumbangkan lawan dengan menyebarkan berita bohong. Selain itu, kampanye hitam juga dilakukan dengan cara menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu atau belum terbukti.

Berbeda dengan kampanye hitam, dalam artikel yang ditulis Richard R Lau dan Ivy Brown Boner dengan judul "Negative Campaigning", disebutkan kampanye negatif dilakukan dengan menunjukkan kelemahan dan kesalahan pihak lawan politik melalui data riil yang ditampilkan. Kampanye negatif seperti itu seringkali dipandang sesuatu yang sah secara hukum. Bahkan, kampanye negatif ini berguna untuk membantu pemilih membuat keputusan. Pihak yang diserang bisa membalas dengan menggunakan data

yang lebih valid dan argumen yang meyakinkan.

Pelaku yang berkampanye negatif dan kampanye hitam mendapat sanksi hukum yang berbeda. Jika kampanye negatif dapat dikatakah sah secara hukum, tidak demikian dengan kampanye hitam. Pelaku kampanye hitam bisa dikenai sanksi secara pidana berdasarkan UU Pemilu. Dalam Pasal 280 ayat 1 huruf d disebutkan, pelaksanaan kampanye hitam dapat disanksi dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Media Sosial

Banyak cara untuk melakukan kampanye hitam. Salah satu media yang sering digunakan untuk melakukan kampanye hitam adalah media sosial (Twitter atau X, facebook, Instagram, Youtube, dan TikTok). Media sosial menjadi wahana yang sering dipakai untuk menyebarkan isu berupa foto, video, dan lainnya yang mengandung berita bohong atau hoaks untuk menjatuhkan lawan politik. Kampanye di media sosial tergolong kampanye yang hemat. Sebab, tidak perlu dana untuk berkampanye, tetapi efeknya sangat efektif terhadap masyarakat. Facebook, Twitter, Youtube, dan TikTok dianggap senjata paling ampuh untuk melakukan kampanye hitam.

Mengapa media sosial efektif sebagai sarana kampanye (hitam)? Ini dapat dilihat dari pola hidup masyarakat Indonesia. Pengguna internet dan gadget di Indonesia mencapai ratusan juta orang. Sebagian besar di antara pengguna internet dan gadget mempunyai media sosial. Ditambah, sebagian besar masyarakat kita masih menelan mentah-mentah informai yang diterima di media sosial meskipun mereka mengetahui bahwa sumber informasi itu meragukan.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2023, atau sebelum masa kampanye, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah menemukan 100 konten negatif berbau politik pada Pemilu 2024. Jumlah itu tentu saja bakal bertambah memasuki masa kampanye yang dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Konten negatif berisi informasi palsu itu begitu banyak beredar di media sosial. Sebagai catatan, pada Pemilu 2019 lalu, sedikitnya terdapat 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia.

Bisa dibayangkan, sebelum kampanye resmi dimulai, hoaks politik yang menyangkut Pemilu sudah bertebaran di media sosial. Fokus hoaks adalah manipulasi informasi Pemilu, termasuk pasangan Capres dan Cawapres yang berlaga di Pemilu turut menjadi sasaran hoaks. Sebagai gambaran, Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) telah melakukan survei pada periode 1-5 November 2023 atau dua pekan sebelum masa kampanye Pemilu 2024. Hasil penelitian Mafindo menemukan 19 hoaks terkait Pemilu 2024.

Ketua Komite Media Sosial Mafindo, Silma Agbas, menyebutkan, sepanjang Januari – September 2023 terdapat 1.731 hoaks, dan 54% di antaranya terkait hoaks politik. Umumnya hoaks tentang kandidat adalah soal pencalonan dan dukungan politik. Namun, ada beberapa hoaks yang menyerang kandidat dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kriminalitas, kecurangan Pemilu atau gaya hidup yang negatif. Hoaks secara langsung menyerang pasangan Capres dan Cawapres.

Selain itu, lanjut Silma, ada peningkatan jumlah hoaks tentang ketidaknetralan pemerintah. Komposisi hoaks Pemilu pada dua pekan pertama November 2023 lebih banyak membahas isu keberpihakan pemerintah pada pasangan Capres dan Cawapres tertentu. Berbeda dengan Pemilu 2019, tren hoaks dan disinformasi pada Pemilu 2024 cenderung menggunakan format video atau kombinasi foto dan teks. Saat Pemilu 2019, hoaks dan disinformasi foto/visual cenderung lebih banyak.

Temuan Mafindo sejalan dengan temuan Kominfo. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Kominfo telah menindak 96 isu hoaks terkait Pemilu 2024. "Tapi kita sudah takedown dan kita bersihkan," katanya pada Sabtu, 2 Desember 2023. Konten-konten negatif tersebut terdapat di berbagai akun dunia maya. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks Pemilu yang tersebar menjadi 355 konten.

Sebelumnya, Kominfo bersama dengan Bawaslu dan Polri telah meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu. Salah satu fungsi Desk Pengawasan Pemilu adalah mengantisipasi sebaran hoaks Pemilu 2024 di antaranya melalui patroli siber. Kominfo dan Polri telah mengawasi jagad maya terkait dengan konten negatif, hoaks, fitnah, yang disebarkan melalui media sosial.

Namun, Budi mengatakan, konten yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian pada Pemilu 2024 ini tidak sebanyak Pemilu 2019 lalu. "Dibanding 2019 jauh lebih menurun drastis. Tahun ini jauh lebih kondusif dan kita mengharapkan Pemilu 2024 adalah Pemilu damai," ucapnya. ❑

BSC

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA., Wakil Ketua MPR

Rakyat Perlu Membuat Deklarasi Memilih Pemimpin yang Jujur dan Adil

PADA 28 November 2023, masa kampanye bagi peserta Pemilu 2024 secara resmi dimulai. Bukan hanya tiga pasangan Capres dan Cawapres, yaitu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranomo – Mahfud MD, yang memulai kampanye, seluruh calon legislatif (Caleg) pun ikut memulai tahapan penting dalam Pemilu ini. Bagi peserta Pemilu, kampanye merupakan salah satu tahapan yang krusial.

Pada masa kampanye itulah (28 November 2023 hingga 10 Februari 2024), peserta Pemilu berkesempatan memperkenalkan diri, visi, serta misi, secara langsung kepada calon pemilih. Untuk itu, sudah bisa dipastikan para peserta Pemilu, baik pasangan Capres dan Cawapres maupun para Caleg akan berlomba menawarkan gagasan dan janji kepada pemilih. Namun, perhatian publik lebih antusias tertuju pada kampanye dan tawaran ide, serta gagasan Capres dan Cawapres.

Berkaca pada kampanye saat Pemilu 2019 lalu yang diwarnai dengan maraknya kampanye negatif dan kampanye hitam (black campaign), kekhawatiran kembali muncul pada Pemilu 2024 ini. Pasalnya, kampanye yang seharusnya menyebarkan hal-hal positif, juga diisi dengan hal negatif dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kampanye negatif dan kampanye hitam akan berdampak pada masyarakat. Karena itu, masyarakat harus mengetahui kampanye negatif dan kampanye hitam agar tidak terjebak dalam informasi yang keliru.

Untuk mengupas lebih jauh tentang masa kampanye ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc.MA. Berikut tanggapan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini melihat berbagai kekhawatiran di masa kampanye ini. Petikannya.

Pemilu 2024 sudah memasuki tahap kampanye yang dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Bagaimana Bapak melihat masa kampanye yang sedang berlangsung saat ini?

Ada yang membedakan pada Pemilu kali ini dengan Pemilu 2019 lalu, yaitu Pemilu 2024 ini diikuti tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini menjadi pembeda yang sangat jelas dibanding Pemilu sebelumnya. Kontestasi tiga pasangan Capres dan Cawapres ini membuat suasana pada Pemilu 2024 ini tidak seperti Pemilu 2019 yang hanya diikuti dua pasang Capres dan Cawapres yang saling berhadap-hadapan.

Pemilihan presiden kali ini terasa lebih demokratis, dinamis, dan membuka pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja penyelenggara Pemilu. Pada Pemilu 2019, kita hanya menemukan satu pihak, pihak lainnya adalah penguasa, sehingga kalau kita mengkritisi penyelenggaraan Pemilu dianggap mengkritisi penguasa. Sekarang, dengan adanya tiga pasangan Capres dan Cawapres, pengawasan bisa dilakukan lebih optimal. Dengan pengawasan yang lebih baik diharapkan potensi terjadinya kecurangan, juga tindakan-tindakan yang

tidak sesuai dengan UUD maupun aturan Pemilu bisa dikoreksi. Saya kira hal itu yang membedakan Pemilu 2024 ini dengan Pemilu 2019 lalu.

Kita berharap dengan suasana seperti itu maka demokrasi kita lebih bisa diselamatkan. Yang sangat penting bagi para kandidat Capres maupun Cawapres adalah bisa betul-betul memaksimalkan kondisi ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi, termasuk kualitas pendidikan politik bagi rakyat pemilik kedaulatan ini. Pada kenyataannya, rakyat kita sudah sekian kali mengikuti Pemilu. Jangan sampai mereka hanya dijadikan sekadar pemuas kekuasaan untuk memilih dengan membabi-buta, karena ada iming-iming terkait dengan masalah uang, janji-janji politik yang tidak rasional.

Situasi yang kondusif ini semestinya juga bisa menghadirkan pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Dalam kehidupan sehari-hari saja, rakyat masih memilah dan memilih, apalagi dalam Pilpres. Mau beli beras, misalnya, rakyat pasti akan mencari beras mana yang lebih berkualitas. Beras yang bersih, tidak ada kutunya, tidak ada sisa-sisa gabah maupun batu. Lebih penting lagi dalam persoalan pemimpin, tentu mereka tidak mau asal-asalan. Mereka harus mencari yang lebih baik, ibarat beras yang lebih bersih, bergizi, dan fresh.

Kalau membeli beras saja mereka sangat kritis, masak untuk memilih presiden, memilih anggota dewan malah asal-asalan. Ada yang campuran dengan kutu, gabah, pasir dan batu. Semestinya rakyat juga dididik untuk menghadirkan rakyat yang berdaulat, berkualitas, sehingga pilihannya pun berdaulat, berkualitas, dan kita bisa menyongsong Indonesia 2045 dengan baik.

Media sosial menjadi sarana kampanye yang efektif untuk menyampaikan gagasan, visi, dan misi, serta memperkenalkan kepada masyarakat. Namun, kampanye di media sosial tidak selalu berisi nilai-nilai positif, tetapi juga untuk kampanye negatif dan kampanye hitam termasuk menyebarkan fitnah dan hoaks. Bagaimana pandangan Bapak?

Seharusnya kita menyadarkan para aktor pembuat hoaks bahwa ternyata ada UU ITE yang bisa menjerat mereka yang memproduksi, menyebarluaskan berita bohong atau hoaks, apalagi kalau diarahkan untuk memengaruhi. Rakyat semestinya juga harus tahu bahwa banyak informasi yang hoaks, dan mereka juga mempunyai hati nurani, akal sehat, dan jiwa kritis untuk memilah-milah.

Rakyat bisa menyampaikan secara terbuka bahwa siapa yang ingin dipilih secara hoaks maka mereka itulah yang tidak akan dipilih. Rakyat hanya memilih pemimpin yang haq, bukannya hoaks. Kalau rakyat berani membuat deklarasi seperti itu, saya kira akan bermanfaat untuk mengoreksi politik hoaks, politik penyebar fitnah, politik yang tidak menghadirkan rakyat sebagai berdaulat.

Bagaimana mengeliminir informasi-informasi hoaks tersebut?

Mereka (rakyat) sendiri yang semestinya berani melaporkan kalau terjadi kampanye hoaks. Kemudian rakyat juga harus berani mengatakan bahwa yang penting bagi mereka bukan adu domba, bukan adu jangkrik. Mereka adalah rakyat pemilik kedaulatan tertinggi sehingga perlu diingatkan bahwa rakyat hanya akan memilih calon presiden atau calon anggota DPR/DPRD yang nirhoaks. Kandidat yang tidak melakukan dan menyebarluaskan hoaks, yang tidak menghalalkan hoaks, tidak demi menang kemudian permisif dengan hoaks.

Jadi, rakyat perlu membuat semacam deklarasi atau proklamasi yang berdaulat menolak hoaks dan tidak memilih Capres-Cawapres, anggota DPR/DPRD yang menolerir hoaks atau malah memproduksi hoaks, atau ingin menang, tapi dengan cara hoaks.

Bagaimana harapan Bapak untuk terselenggaranya Pemilu yang Luber dan Jurdil?

Sampai hari ini memang ada yang mengkritisi terkait dengan ketidakadilan, terbukti ada spanduk atau baliho dari calon tertentu yang kemudian digusur, sedangkan spanduk atau baliho calon yang lain tidak digusur. Itu memang bagian dari ketidakjujuran dan ketidakadilan. Dan, ini menjadi bagian yang sangat disayangkan kalau Bawaslu hanya diam dan malah terlihat permisif, bahkan membiarkan ketidakadilan ini berlanjut. Kalau tidak ada tindakan yang tegas dan terukur, peristiwa itu dapat menjadi pembenaran dan kekhawatiran tentang bagaimana nanti akan berbuat adil kalau sekarang saja tidak.

Menurut saya, di sini sangat penting peran dari media, termasuk rakyat dan mahasiswa untuk meneriakkan kembali bahwa siapa pun yang berlaku tidak adil dan tidak jujur maka justru tidak akan dipilih. Siapa pun yang membiarkan atau menikmati ketidakadilan dan ketidakjujuran ini tidak akan dipilih. Siapa pun yang membiarkan rakyat menjadi korban dari ketidakadilan dan ketidakjujuran, rakyat yang sudah sangat kritis ini penting sekali lagi mendeklarasikan bahwa mereka hanya akan memilih pemimpin yang jujur dan adil. ❑

Forum RT/RW Se-Jakarta Pusat

HNW Ajak RT/RW Sukseskan Pemilu Jadi Pesta Demokrasi Rakyat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan, fungsi dari RT/RW bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak golput, bisa memilih wakil maupun pemimpin negara dengan baik dan benar, agar hasilnya juga baik dan benar.

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., mengajak RT/RW berada di garda terdepan untuk menyukseskan Pemilu sebagai ajang pesta demokrasi kedaulatan rakyat, dengan memastikan bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak pilih tercatat atau terdaftar sebagai pemilih. Juga memastikan setiap warga yang berhak memilih mendapatkan undangan atau surat panggilan untuk memilih atau melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dengan demikian, lanjut Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa HNW, setiap warga bisa melakukan pencoblosan dengan baik dan benar, terhindar dari manipulasi, money politic, maupun intimidasi. Sehingga rakyat mendapatkan Pemilu yang benar-benar sesuai konstitusi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kerana, menurut HNW, sesuai ketentuan konstitusi, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, karena itu sangat dipentingkan bagaimana kedaulatan itu bisa dilaksanakan, dijaga, dan terpenuhi secara konstitusional. Salah satu agar kedaulatan itu bisa terlaksana adalah warga negara yang memiliki hak untuk memilih terdaftar sebagai pemilih dan bisa melaksanakan hak pilihnya.

"Di sinilah sebagian fungsi dari RT/RW, yaitu bagaimana menyukseskan kedaulatan rakyat dan rakyat kemudian mendapatkan haknya untuk memilih dengan baik dan benar. Karena itu RT/RW sangat penting untuk memastikan hak rakyat itu terdaftar sebagai pemilih, dan mendapat undangan untuk memilih di TPS," kata HNW ketika menerima delegasi Forum RT/RW Se-Jakarta Pusat di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023). Delegasi Forum RT/RW Se-Jakarta Pusat itu dipimpin ketuanya Joko Hardoyo didampingi para pengurus Forum RT/RW Se-Jakarta Pusat.

HNW mengatakan, penting untuk memaknai Pemilu sebagai salah satu dari momentum penting dalam perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa. "Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, jika membayangkan tahun 2045, maka Pemilu 2024 harus disukseskan sehingga dalam Pemilu ini terpilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang baik dan benar. Karena itu, rakyat harus diposisikan dalam

posisi yang berdaulat sehingga rakyat bisa melaksanakan kedaulatannya dengan baik dan benar juga," tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Dalam pertemuan itu, HNW juga menyinggung masih adanya warga yang terpengaruh dengan pemahaman anti politik dan demokrasi yang berujung pada ajakan untuk Golput. Pemilu adalah sarana konstisional untuk memperjuangkan dan merealisasikan (sebagian atau keseluruhan) kemaslahatan bagi warga dan menjauhkan mereka dari (sebagian atau keseluruhan) kemudharatan yang bisa menimpa umat, bangsa, dan negara. Maka, di sinilah fungsi dari RT/RW bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak golput, bisa memilih wakil maupun pemimpin negara dengan baik dan benar, agar hasilnya juga baik dan benar.

Jadi, tegas HNW, agar bisa mewujudkan cita-cita reformasi dan Proklamasi Kemerdekaan NKRI, jangan sampai puluhan triliyun rupiah dari APBN sebagai ongkos penyelenggaraan Pemilu menjadi mubazir. "Forum RT/RW bisa bersama rakyat sukseskan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang hadirkan pilihan berkualitas supaya hasilnya pun berkualitas untuk menyong-song Indonesia Emas Tahun 2045," pungkasnya. ❑

Lantik PAW Anggota MPR

Bamsoet Ingatkan Jelang Pemilu Hati-hati Jangan Terprovokasi

Indonesia harus berpegang teguh pada amanat Konstitusi untuk menentang setiap aksi kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, memasuki tahun 2024, selain dihadapkan pada Pileg dan Pilpres yang mengharuskan kita hati-hati agar tidak terprovokasi, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada kondisi sosial kebangsaan yang ditimbulkan akibat gejolak geo-politik global terhadap kondisi perekonomian dunia. Antara lain, menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah yang membuat cadangan devisa turun signifikan, dari USD 134,9 miliar pada September 2023 menjadi USD 133,1 miliar pada Oktober 2023.

"Tantangan lainnya terkait kondisi iklim yang semakin tidak bersahabat. BMKG merilis fenomena cuaca El Nino akan berlangsung setidaknya hingga akhir tahun 2023. Berbagai sektor akan terdampak oleh fenomena cuaca ini, mulai dari jumlah produksi energi dari PLTA yang menurun, hingga sektor pertanian yang mengalami penurunan produksi tanaman pangan akibat terganggunya siklus masa tanam, gagal panen, kurangnya ketahanan jenis tanaman, atau penyebaran hama yang aktif pada kondisi kering. Karena itu, segenap pemangku kepentingan, utamanya pemerintah, diharapkan segera mengambil langkah mitigasi dan antisipasi terhadap dampak negatif yang terjadi," ujar Bamsoet dalam pelantikan anggota MPR RI pengganti antar waktu, di Gedung MPR RI, Jakarta,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selasa (14/11/23).

Anggota MPR RI yang dilantik, yakni Dadang S. Muchtar dari Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, serta Andi Najmi Fuaidi dari Fraksi PKB, daerah pemilihan Jawa Tengah IX.

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena, Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah, serta Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR RI Mujib Rahmat.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di saat dunia masih dihadapkan pada konflik Rusia dan Ukraina yang belum usai, serta eskalasi ketegangan geopolitik global di berbagai wilayah yang terus meningkat, saat ini komunitas global juga dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina.

Menyikapi kondisi ini, Indonesia harus berpegang teguh pada amanat Konstitusi untuk menentang setiap aksi kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Sikap tegas dan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, selaras dengan amanat Konstitusi, bahwa penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dihapuskan dari muka bumi.

"Indonesia juga harus mendorong hadirnya langkah-langkah strategis dan nyata dari segenap komunitas internasional, untuk membuka akses bantuan internasional masuk ke wilayah Palestina, serta membantu mewujudkan perdamaian abadi di tanah Palestina," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan, sebagai lembaga yang merepresentasikan daulat rakyat, MPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan konstitusi terus berjalan. MPR merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD.

Namun, perubahan-perubahan tersebut dilandasi oleh itikad kebangsaan yang baik, diperjuangkan demi tujuan kolektif, dan bukan dimaksudkan untuk sekedar memenuhi hasrat politik atau kepentingan kelompok. Seluruh elemen bangsa harus dapat mengambil pembelajaran dari amendemen terhadap Konstitusi yang telah dilakukan sebanyak empat tahap sepanjang periode MPR 1999-2004.

"Melalui amendemen tersebut, kita telah menata ulang sistem ketatanegaraan kita, dan secara rigid mengatur perlindungan akan hak-hak kewarganegaraan yang mengacu pada pengakuan komprehensif atas hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya, konstitusi sedianya hadir untuk memastikan demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih baik, dan bukan sebaliknya," pungkas Bamsoet. ❑

Kunjungi Pj. Gubernur Sumut

Fadel Muhammad Bahas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam kunjungannya ke Sumatra Utara baru-baru ini, Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menyampaikan konsep 'Lumbung Pangan' kepada Pj. Gubernur Sumut, Hassanudin. Konsep Lumbung Pangan kini gencar diupayakan realisasinya di Provinsi Gorontalo, provinsi di mana Fadel pernah menjabat gubernur selama dua perode.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa ketahanan pangan di lingkup daerah harus selalu diperhatikan para kepala daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan, masyarakat tercukupi kebutuhan dasarnya, di tengah musim panas atau kemarau panjang melanda Indonesia dan memasuki pergantian musim ekstrim saat ini.

"Untuk itu, kuantitas dan kualitas produk pertanian daerah harus selalu mendapat perhatian lebih pemerintah provinsi.," ujar Fadel Muhammad usai bertemu dan berdialog dengan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, di Ruang Kerja Gubernur, Kompleks Kantor Pemprov Sumut, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Senin (13/11/2023).

Turut hadir mendampingi Fadel Muhammad, Hana Hasanah Shahab yang tak lain istri Fadel Muhammad, dan Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Dr. Badikineta Sitepu.

Kepada PJ Gubernur Sumut, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini juga menyampaikan konsep 'Lumbung Pangan' yang saat ini gencar disosialisasikan dan diupayakan realisasinya di Provinsi Gorontalo.

"Pj. Gubernur merespon baik hal itu. Saya rasa, ketika semua daerah bisa mewujudkan lumbung pangan maka ketahanan pangan nasional akan semakin mudah terwujud. Bahkan, Indonesia bisa dengan mudah melakukan ekspor pangan ke luar negeri," katanya.

Merespon hal tersebut, Pj. Gubernur Sumut Hassanudin menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Pimpinan MPR RI, sekaligus anggota DPD RI Fadel Muhammad, untuk berdialog seputar pertanian dan ketahanan pangan.

"Dalam perbincangan dengan beliau, saya mendapatkan banyak bimbingan dan masukan yang luar biasa bermanfaat buat saya dalam rangka membangun dan menyempurnakan potensi-potensi pertanian dan Provinsi Sumut ini," ujarnya

Jadi, menurut Hassanudin, apa yang disampaikan Fadel Muhammad akan dijadikan bahan kajian strategis di Provinsi Sumut yang kemudian akan ditindaklanjuti.

"Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan MPR Fadel Muhammad serta salam hormat saya untuk seluruh Pimpinan MPR lainnya," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara Dr. Badikineta Sitepu menyampaikan bahwa banyak hal akan dilaksanakan Pj. Gubernur Sumut menyangkut pertanian dan ketahanan pangan.

"Saya yakin, Pj. Gubernur dengan program strategisnya, akan mampu mengelola semua potensi yang ada di Sumut, sehingga Sumut bisa menggali potensinya secara maksimal dan bahkan mampu ikut menjaga ketahanan pangan secara nasional," katanya. ❑

Terima Pengurus Bamus Betawi

Bamsoet Dorong Penguatan Pelestarian Seni dan Budaya Betawi

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah dan DPR RI agar dalam merevisi UU No.29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta turut memasukKan unsur penguatan pelestarian seni dan budaya Betawi sebagai bagian dari kekayaan bangsa sekaligus unsur pertahanan nasional. Sehingga revisi UU yang dihasilkan bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melestarikan seni dan budaya Betawi dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya Bamus Betawi.

"Dengan demikian bisa terbentuk collaborative governance untuk menghadapi perubahan status Jakarta dengan disertai pemajuan kebudayaan Betawi melalui peran aktif dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga walaupun sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, berbagai situs sejarah, kebudayaan, kearifan, dan tradisi lokal seni dan budaya Betawi bisa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Bamus Betawi, di Jakarta, Kamis (16/11/23).

Pengurus Bamus Betawi yang hadir, antara lain Ketua Majelis Adat Brigjend (purn) Abd Syukur, Sekretaris Majelis Adat Jamaksari, Ketua Dewan Kehormatan/ Pendiri Rusdi Saleh, Ketua Umum Eki Pitung, Sekjen Yudi M., Bendahara Umum M. Buchori, dan Ketua Bidang Perempuan Desi Febrianti.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mendukung rencana Bamus Betawi untuk membangun Tugu Empat Pilar sekaligus mencanangkan Kota Empat Pilar di DKI Jakarta. Guna menunjukkan kebesaran hati masyarakat Betawi yang menekankan bahwa DKI Jakarta bukan hanya milik

masyarakat Betawi saja, melainkan milik semua warga bangsa.

"Berkat kebesaran hati masyarakat Betawi, DKI Jakarta bisa menjadi kota inklusif yang membuka diri pada para pendatang dari berbagai suku dan daerah. Sikap inklusivitas ini menjadikan DKI Jakarta sebagai 'Indonesia mini', sebuah kota multi-kultural yang ditempati lebih dari 39 suku dengan masing-masing adat budayanya," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pentingnya menjaga ketahanan budaya dan memajukan kebudayaan nasional ini mempunyai dasar pijakan yang kuat, karena diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 32 ayat 1 dinyatakan, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

"Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan adanya dua peran penting kebudayaan, yaitu dalam membentuk jati diri bangsa, dan dalam menyikapi modernitas dan laju peradaban zaman. Oleh karena itu, keberadaan para pelestari seni dan budaya seperti Bamus Betawi menjadikan DKI Jakarta bisa terus menjaga nama baik sebagai kota "istimewa". Yaitu kota yang toleran, inklusif, menghormati dan menjunjung tinggi kemajemukan, dan menjadi cerminan wajah Indonesia yang penuh harmoni dan kedamaian," pungkas Bamsoet. ❑

Silaturahim Nasional Anak Bangsa

Bamsoet Ajak Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat

Pemilu sebagai implementasi demokrasi harus diselenggarakan dengan tidak mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan, survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni 2023 mencatat sekitar 56% responden merasa khawatir terjadinya keterbelahan dan polarisasi rakyat pada Pemilu 2024. Jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga menunjukkan sekitar 70% responden merasa khawatir bahwa polarisasi rakyat yang terjadi pada Pemilu 2019, yang melahirkan "dikotomi" cebong dan kampret, akan kembali terulang pada Pemilu 2024.

Bamsoet menekankan, agar kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan maka seluruh elemen bangsa harus aktif menyuarakan dan menjaga kondusivitas bangsa. Mengingat penyelenggaraan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Untuk mewujudkan Pemilu damai dan bermartabat kita dapat merujuk pada beberapa indikator. Antara lain, netralitas TNI-Polri dan ASN, tingkat pelanggaran Pemilu yang rendah, tidak ada intimidasi dan diskriminasi, tidak mencederai nilai-nilai demokrasi, serta meningkatnya literasi politik dan rasionalitas pemilih.

"Selain itu, kita juga harus meminimalisir faktor risiko, mulai dari penyediaan dan distribusi logistik Pemilu hingga keselamatan panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 bisa dijalankan dengan riang gembira, bukan dengan penuh permusuhan dan kebencian. Apalagi, sampai membuat

perpecahan kebangsaan," ujar Bamsoet dalam Silaturahim Nasional Anak Bangsa Tahun 2023, di kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Jakarta, Kamis (23/11/23).

Turut hadir, antara lain Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Pembina Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) Irjen Pol (Purn.) Sidarto Danusubroto, Komisioner KPU Idham Cholik, Ketua Umum FSAB Suryo Susilo, Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Eko Margiyono, serta Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 harus diakui ada kecenderungan kenaikan jumlah pelanggaran Pemilu. Pada Pemilu 2014 jumlah pelanggaran mencapai 10.754 kasus, dan naik menjadi 15.052 kasus pada Pemilu 2019, yang sebagian besar adalah masalah administratif. Pada Pemilu 2019, pelanggaran kasus pidana Pemilu tercatat sebanyak 348 kasus, atau meningkat 58,3% jika dibandingkan dengan Pemilu 2014.

"Peningkatan jumlah pelanggaran tersebut dapat dimaknai dari dua sudut pandang. Bisa jadi pengawasan BAWASLU semakin ketat sehingga semakin banyak kasus pelanggaran yang terungkap atau pelanggaran Pemilu masih dianggap lumrah dan sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera. Kita berharap, di Pemilu 2024 nanti pelanggaran Pemilu, baik dari sisi administrasi maupun pidana bisa diminimalisir," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam penyelenggaraan Pemilu, harus ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi seluasnya, bukan informasi yang sudah terkooptasi atau dimonopoli oleh kepentingan politik tertentu. Pemilu sebagai implementasi demokrasi juga harus diselenggarakan dengan tidak mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Merujuk pada laporan the Economist Intelligent Unit yang dirilis pada Februari 2023, indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,71 atau mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya.

"KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Sebanyak 56% di antaranya atau sekitar 114 juta pemilih adalah generasi muda pada kisaran usia 22 hingga 30 tahun, separuh diantaranya adalah pemilih pemula. Artinya, kualitas hasil Pemilu 2024 juga akan ditentukan oleh tingkat rasionalitas dan kematangan politik dari para pemilih muda dan para pemilih pemula, dalam menggunakan hak pilihnya," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi BPJS dan Ketenagakerjaan

Sjarifuddin Hasan: Program BPJS ada Sejak Zaman Presiden SBY

Perjalanan untuk menyejahterakan rakyat bukan perkara gampang. Ada proses panjang harus dilalui, antara lain pemerintah wajib mendorong agar pertumbuhan ekonomi semakin baik. Bila ekomomi baik maka anggaran untuk BPJS, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan akan tersedia.

DALAM kunjungan kerja (sehari) di Kota Bogor, Jawa Barat, 22 November 2023, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., hadir dan menjadi narasumber dua kegiatan sosialisasi, yaitu: Pertama, bertema Program BPJS Ketenagakerjaan; Dan, kedua, Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial.

Kegiatan sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan berlangsung di Gedung Wanita, Kota Bogor. Acara ini diikuti sekitar 200 warga masyarakat yang datang dari segenap penjuru kota, dan dihadiri oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor, Dolik Yulianto.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, dalam paparannya mengemukakan tentang asal usul bagaimana program BPJS ini ada. Syarief Hasan, begitu dia disapa, menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memberi amanah kepada negara untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. "Kalau negara tidak bisa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menyejahterakan rakyatnya, berarti negara gagal," tuturnya.

Pria asal Sulawesi itu mengakui, perjalanan untuk menyejahterakan rakyat bukan perkara gampang. Ada proses panjang yang harus dilalui, antara lain pemerintah wajib mendorong agar pertumbuhan ekonomi semakin baik. "Bila ekomomi baik maka dapat dipastikan anggaran untuk BPJS, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan akan tersedia," katanya.

Untuk membuat perekonomian tumbuh, kata Syarief Hasan, pemerintah harus mempersiapkan dan menjalankan semua program pembangunan.

Pada tahun 2004, di Indonesia kali pertama digelar pemilihan presiden secara langsung. Pada pilpres itu, SBY terpilih menjadi presiden. Selama masa pemerintahan presiden asal Pacitan, Jawa Timur, itu perekonomian tumbuh rata-rata di angka 6%. "Sebelumnya tidak lebih dari 4%," tutur Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden SBY itu.

Dari pertumbuhan itu membuat APBN mencapai Rp 2.800 triliun. "Sebelumnya sangat rendah, sekitar Rp 400 triliun," ungkapnya. Dari perekonomian yang cerah di masa SBY itulah, tutur Syarieh Hasan, membuat pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 17,6% menjadi 10,96%, lalu pengganggguran turun dari 9% menjadi 5,94%. "Itu semua karena dampak dari pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan," paparnya.

Atas dasar pertumbuhan perekonomian bagus, cerita Gurubesar Universitas Negeri Makassar itu, SBY selanjutnya menginisiasi dan memperkenalkan program BPJS. "BPJS kali pertama dicetuskan oleh Pak SBY. Jadi, kita harus terima kasih pada Beliau," ujarnya.

Syarief Hasan menyatakan senang, meski SBY sudah tidak lagi menjadi presiden, Alhamdulillah program BPJS diteruskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, intinya, rakyat arus sejahtera. Disebut sejahtera, menurut Syarief Hasan, bila rakyat mendapat kebutuhan bahan pokok, itu pertama. Lalu, kedua, rakyat mendapat lapangan kerja yang mudah. Ketiga, kemiskinan berhasil ditekan. Keempat, pendapatan perkapita rakyat semakin tinggi. "Pendapatan perkapita rakyat pada zaman SBY sangat luar biasa," ujarnya.

Syarief Hasan berpesan, BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Perlindungan itu yang meng-cover rakyat Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Untuk itu, dia menegaskan, agar peserta program BPJS Ketenagakerjaan loyal dan setia pada sistem perlindungan diri itu. "Jangan di saat masa sulit baru mencari BPJS," tuturnya.

Usai sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, di hari yang sama, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan selanjutnya hadir dan menjadi narasumber Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Acara berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bogor Utara, diikuti sekitar 200 peserta datang dari berbagai kecamatan di Kota Hujang itu. Selain Syarief Hasan, juga menjadi narasumber sosialisasi ini adalah Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Firdaus Rakhmat, SE.

Dalam pemaparannya, Syarief Hasan menuturkan, dengan mengikuti acara ini, kita menjadi tahu akan hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. "Jangan hanya tahu hak tetapi lupa kewajiban," ucapnya. Jadi, menurut Syarief Hasan, setiap tenaga kerja sangat penting memahami hak dan kewajiban agar para tenaga kerja bisa semakin sejahtera.

Syarief Hasan meminta agar semua pihak dapat menjaga hubungan kerja. "Bila ada masalah bisa dimusyawarahkan. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bila hubungan kerja berjalan lancar maka perekonomian bangsa ini akan menjadi lebih bagus," pungkasnya. ❑

Sosialisasi Germas

Syarief Hasan: Hidup Itu Harus Sehat

Faktor kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Negara atau pemerintah harus hadir memberi pelayanan kesehatan dan akses pendidikan yang baik.

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menyosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kepada warga masyarakat Kecamatan Cipanas yang berlangsung di Sport Hall Hotel Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Sabtu (18/11/2023). Syarief Hasan mengatakan, sosialisasi Germas agar masyarakat menjaga kesehatan sehingga bisa beraktivitas dan produktif. Kesehatan merupakan sendi yang penting dalam keluarga.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Hidup itu harus sehat. Tujuan kita bernegara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artinya, masyarakat harus sehat, adil, dan sejahtera," katanya di depan sekitar 200 warga masyarakat Kecamatan Cipanas. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Menurut Syarief Hasan, faktor kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus mendapat akses layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Syarief Hasan mencontohkan jika ada anggota keluarga yang sakit maka semua biaya pengobatan diupayakan demi kesembuhan.

"Kalau keluarga itu sosial ekonominya berada sedikit di atas garis kemiskinan, karena pengeluaran untuk biaya pengobatan membuat keluarga itu bisa miskin. Faktor kesehatan bisa membuat keluarga jatuh miskin," tegas Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Tidak hanya faktor kesehatan, lanjut Syarief Hasan, faktor pendidikan yang rendah juga bisa mendorong orang masuk dalam kategori miskin. Rakyat harus mendapat akses dan layanan pendidikan. Jika tidak, pendidikan yang rendah sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Dua faktor itu, yakni kesehatan dan pendidikan, sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Negara atau pemerintah harus hadir memberi pelayanan kesehatan dan akses pendidikan yang baik. Saya mendorong agar masyarakat bisa menjaga kesehatan dan memanfaatkan kesempatan memperoleh pendidikan," paparnya.

Syarief Hasan menambahkan, agar bisa meningkatkan layanan dan akses pendidikan

maka pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. “Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik kepada rakyat,” tuturnya.

Syarief mengungkapkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 mencapai 6%. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2014 hingga saat ini berada di kisaran 5%. “Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif masih baik dibanding negara-negara lain. Sehingga pelayanan kesehatan dan akses pendidikan masih lebih baik. Pemerintah masih menjamin pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Syarief Hasan juga menyampaikan pesan kepada peserta sosialisasi untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. “Rakyat agar memanfaatkan pesta demokrasi dan menggunakan hak kedaulatannya untuk memilih demi kepentingan rakyat. Dengan berpartisipasi memilih maka rakyat ikut mendorong pemerintahan lima tahun ke depan dapat meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya.

Pada hari yang sama, petang hari, Syarief Hasan juga menyosialisasikan Germas kepada warga masyarakat Kecamatan Campaka, Cianjur Selatan. ❑

Bertemu Jamaah Tarekat Naqsabandi Al-Kholidi

Fadel Muhammad: Para Alim Tidak Pernah Berhenti Berbuat Baik

Para alim tidak mengenal kata pensiun, meski usianya sudah uzur. Pengabdian tanpa henti kepada agama serta masyarakat, hingga hari tua.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN jamaah Tarekat Naqsabandi Al-Kholidi, Wakil Ketua MPR RI yang juga mantan Gubernur Gorontalo dua periode, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengatakan, masa pengabdian para alim tidak ada batasnya, dan tidak akan pernah berhenti. Pengabdian baru akan berhenti setelah datang kematian.

Karena itu, para alim tidak mengenal kata pensiun, meski usianya sudah uzur. Pengabdian tanpa henti kepada agama serta masyarakat, hingga hari tua, menurut Fadel, juga dilakukan oleh ulama tasawuf dan Mursyid Tarekat Naqsabandi Al-Kholidi, Prof. Dr. Kadirun Yahya. Pintu rumahnya selalu terbuka bagi mereka yang mencari bantuan. Beliau tidak pernah merasa sibuk untuk membantu masyarakat.

Fadel menceritakan, kenal dekat dengan Prof. Dr. Kadirun Yahya. Dia mengaku, banyak belajar kepada beliau dan memiliki pengalaman yang sangat mendalam. Salah satunya saat beliau memberikan batu cincin kepada Fadel, dan batu itu dijadikannya sebagai azimat. “Saat saya tengah dalam kesulitan, batu itu saya pakai, Alhamdulillah semua persoalan segera selesai,” ungkap Fadel saat menjadi narasumber acara Temu Tokoh Nasional/Kepemudaan/ Keagamaan/ civitas akademika di Kabupaten Gorontalo. Senin malam (29/11/2023).

Temu Tokoh Nasional yang berlangsung di Surau Karya, Alqah Zikir Tarekat Almuktabarah Naqsabandi Al-Kholidi, Kelurahan Dutulanaa, KecamatanLimboto, Kabupaten Goronmgtalo, itu diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Forum Generasi Muda Tarekat Naqasabandi Al-

Kholidi Provinsi Gorontalo. Acara dihadiri oleh Syech KH. Ahmad Mulia,. Ketua Tarekat Naqsabandi Al-Kholidi Provinsi Gorontalo, yang juga murid dari Prof. Dr. Kadirun Yahya.

Lebih lanjut, Fadel menyatakan, banyak pelajaran yang diperoleh dari Prof. Dr. Kadirun Yahya. Salah satunya menyangkut menata dan menjaga hati. Ini penting karena hidup manusia dipengaruhi hati. Yaitu, segumpal darah dalam tubuh, yang menentukan baik buruknya seseorang. Kalau darah itu baik maka baik semua, demikian sebaliknya, itulah hati.

"Salah satu cara menjaga hati yang saya pelajari dari Prof. Dr. Kadirun Yahya adalah tidak boleh ada prasangka buruk atau su'udhon. Karena prasangka buruk bisa merusak hati," kata Fadel lagi. Oleh karena itu, agar jauh dari prasangka buruk, salah satu yang harus dilakukan umat manusia adalah selalu bersyukur.

Seperti dilakukan Nabi Sulaiman sebagaimana tersurat pada Alquran, Surah An-Naml ayat 40. Bunyinya: 'Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.' Maka, tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata: 'Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Dan, barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi," pungkas Fadel. ❑

Dialog Media Elektronik (Radio)

Fadel Muhammad: Pemilu Harus Jurdil, Penuh Ide dan Inovasi Berkualitas

Pemilu 2024 bukankah ajang main-main atau sekedar coba-coba. Nasib seluruh rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia dipertaruhkan di ajang demokrasi tersebut.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menyerukan agar rakyat Indonesia menyambut dengan semarak serta berpartisipasi aktif dalam perhelatan pesta demokrasi Indonesia lima tahunan Pemilu 2024. "Hindari golput, polarisasi politik yang berlebihan, sampai kepada konflik karena perbedaan pilihan," ujar Fadel Muhammad.

Seruan itu tidak hanya ditujukan kepada rakyat, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini juga menyerukan kepada para peserta Pemilu, baik itu partai politik, para caleg serta para Capres dan Cawapres agar ikut aktif dalam menjalankan dan mengawasi jalannya pesta demokrasi agar berlangsung secara jujur dan adil (jurdil).

Diingatkan Fadel Muhammad, polarisasi dan keberpihakan pasti terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Satu yang harus diperhatikan bersama adalah bagaimana mengelola perbedaan itu yang pada akhirnya mengerucut pada satu kesepakatan bersama, yakni untuk kemajuan bangsa dan negara.

Untuk itulah, Fadel mengajak agar dalam proses berjalannya tahapan-tahapan Pemilu hingga terpilihnya parpol pemenang pemilu,

para anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden, tidak monoton. "Harus muncul ide-ide, gagasan, pikiran serta inovasi baru yang segar dan berkualitas, untuk membangun Indonesia lebih baik pasca Pemilu," katanya, di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Selanjutnya, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini mengungkapkan, salah satu contoh gagasan yang bagus dan bisa dimunculkan adalah, kepala-kepala daerah harus menjadi kepanjangan tangan Presiden dan satu visi dan misi dalam melakukan program-program pembangunan nasional. Jangan sampai, antara pemerintah pusat dan daerah berbeda visi.

"MPR secara khusus melihat hal itu menjadi suatu yang sangat baik untuk dijalankan. Sehingga MPR mengeluarkan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seperti GBHN di masa Orde Baru, tapi PPHN lebih disempurnakan lagi. Tujuannya, dengan PPHN, arah rencana pembangunan nasional bisa lebih terfokus, seiring sejalan, dengan sinergitas tinggi antara pusat dan daerah, serta berkesinambungan," terang Fadel

Intinya, tegas Guru Besar bidang_*Public Sector Entrepreneurship* pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini, semua hal tersebut tidak boleh diabaikan. Sebab, Pemilu 2024 bukankah ajang main-main atau sekedar coba-coba. Nasib seluruh rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia dipertaruhkan di ajang demokrasi tersebut.

"Satu lagi, aparatur penegak hukum harus menjaga netralitasnya, menjaga dengan baik berjalannya pemilu agar suasana kondusif tetap terjaga hingga akhir penyelenggaraan pemilu," tandas Menteri Kelautan dan Perikanan RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

MPR sendiri, lanjut Fadel Muhammad, memiliki kepedulian dan perhatian yang besar terhadap berjalannya Pemilu yang berkualitas. Untuk itulah, MPR selalu menggelar berbagai pertemuan, diskusi dengan berbagai elemen masyarakat, selain untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang pemilu yang baik dan dampaknya kepada rakyat, juga menyerap aspirasi masyarakat antara lain tentang keinginan dan harapan-harapan mereka terhadap hasil pemliu.

Seluruh pesan, seruan, ajakan, dan harapan Fadel Muhammad seputar Pemilu 2024 tersebut disampaikannya dalam kegiatan tapping acara Dialog MPR RI bersama salah satu stasiun radio Indonesia di Jakarta, dengan mengambil tema: 'Peran MPR RI Sebagai Rumah Kebangsaan Dalam Mengawal Pemilu Serentak 2024'.

Dialog MPR RI melalui media elektronik (Radio) ini merupakan salah satu program Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, yang memiliki maksud dan tujuan untuk: *Pertama*, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wewenang, tugas, dan struktur kelembagaan, serta peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Dan, *kedua*, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ❑

Lantik PAW Anggota MPR

Bamsoet Ingatkan Jaga Persatuan dan Kesatuan

"Marilah kita bergandengan tangan, bersatu padu dan bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita. Jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian bangsa ini terpecah belah," kata Bamsoet mengingatkan

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kembali mengingatkan, sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah masa kampanye. Para elite politik serta kontestan Pemilu harus senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran dalam menghadapi Pemilu 2024. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi, seperti golput, money politics, politik identitas, ujaran kebencian, dan provokasi.

"Mari kita lakukan kampanye secara damai, sehat, dan beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau menyerang calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain tanpa memaksakan pilihan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua memiliki niat dan harapan yang baik untuk bangsa dan negara. Marilah kita bergandengan tangan, bersatu padu dan bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita. Jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bangsa ini terpecah belah," ujar Bamsoet dalam Pelantikan Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu, di MPR RI, Senin (4/12/23).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Lestari Moerdijat. Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu yang dilantik, antara lain Handayani dari Fraksi PKB daerah pemilihan Jambi, Rosiyati MH. Thamrin dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Selatan, Andhika Hasan dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Timur, serta Kamran Muchtar Podomi dari Fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Utara.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. Pemilu 2024 adalah kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.

"Tentunya, tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Pemilu sebagai cerminan implementasi demokrasi bukan sekedar persoalan "menang atau kalah," tetapi tentang upaya merawat "tenun kebangsaan" yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia Merdeka. Maka, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan pesan kebencian, akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.

"Dalam demokrasi kita mengharapkan partisipasi, bukan sebatas mobilisasi. Tetapi, bagaimana partisipasi itu terwujud, jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level. Politik jangan menjadi semacam proses "beli putus," di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih," pungkas Bamsoet. ❑

Media Gathering Bali

Wujud Sinergitas dan Kolaborasi Wartawan Parlemen dan MPR

Siti Fauziah

Ahmad Muzani

Ariawan

BALI, 2-4 Desember 2023. Hari itu, sinergitas dan kolaborasi antara Setjen MPR RI, dalam hal ini Biro Humas dan Layanan Informasi, Setjen MPR RI, dan Kelompok Wartawan Parlemen (KWP) terbukti tetap solit. Menurut Siti Fauziah, SE., M.M., selama tujuh tahun menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Layanan Informasi, Setjen MPR, semua informasi mengenai kegiatan Pimpinan MPR dan kelembagaan MPR dapat tersampaikan secara positif ke masyarakat.

Tentu sinergi dan kolaborasi yang baik ini perlu dipupuk terus agar saling menguntungkan. Kerjasama tidak cukup hanya melalui penyelenggaraan diskusi rutin di ruang press room, atau pelayanan wawancara atau press release atau lainnya, tapi perlu juga ditingkatkan pendekatan personal antara wartawan KWP dan Biro Humas dan Layanan Informasi Setjen MPR. Maka, di sinilah pentingnya kegiatan Media Gathering yang memang sudah menjadi agenda rutin Setjen MPR RI setiap tahun.

Untuk tahun 2023 ini Media Gathering berlangsung di Bali. Ini adalah kegiatan Media Gathering kedua untuk tahun ini, setelah Media Gathering pertama pada awal tahun ini. Media Gathering langsung dikoordinasi oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, sekaligus merangkap Deputi Bidang Administrasi, dan Kepala Biro Humas dan Layanan Informasi MPR. Tercatat 88 wartawan, baik media cetak, elektronik, maupin online, ambil bagian dalam kegiatan Media Gathering di Pulau Dewata itu.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, tidak bisa hadir membuka acara ini karena ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Tapi, Pimpinan MPR yang telah menulis lebih dari 30 buku ini menyampaikan sambutannya melalui daring. Jadi, Pimpinan MPR yang membuka dan sekaligus menyampaikan sambutannya pada Media Gathering ini adalah Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Setelah sebelumnya, Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah menyampaikan laporannya, dan sambutan Koordinator KWP Ariawan. Acara pembukaan berlangsung Jumat (02/12), lepas magrib, di Bintang Bali Resot Kuta, Bali.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam sambutannya mengucapkan apresiasi atas kerjasama sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara wartawan Parlemen dan MPR selama ini. Sehingga, lanjut Bamsoet, pada setiap penyelenggaraan agenda kelembagaan MPR selalu mendapat dukungan peliputan media parlemen dengan sudut pandang pemberitaan yang positif dan lebih familiar bagi publik.

"Pada berbagai informasi kemajelisan di MPR tidak hanya dapat diakses dan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dijangkau oleh masyarakat luas, tapi juga dapat dicerna dan dipahami dengan baik," tambah Bamsoet.

Pimpinan MPR RI menyadari bahwa media massa, baik sebagai institusi publik maupun sebagai institusi sosial, memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ini menyatakan, media massa tidak hanya menjadi institusi "sekedar" menyebarkan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mengimplementasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus pemberitahuan bagi partisipasi publik.

Bamsoet berharap, menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, media massa memiliki peran penting dan strategis dalam mengondisikan suasana yang mengejukkan iklim politik kita, khususnya pemberitaan yang obyektif dan berimbang yang pada gilirannya mendorong terwujudnya masyarakat yang melek informasi yang dapat memilih dan memilah informasi secara cernat dan bijaksana. "Pemberitaan yang sehat juga berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus sebagai filter atas masih maraknya informasi yang menyesatkan atau hoak yang begitu menyebar melalui platform media," katanya.

Dengan mengambil tema: "Peran Media dalam Mewujudkan Rumah Kebangsaan MPR," Media Gathering MPR Tahun 2023 ini berlangsung tanggal 2 hingga 4 Desember 2023. Dalam acara pembukaan Media Gathering, baik pihak KWP maupun Biro Humas dan Layanan Informasi, menyampaikan harapannya agar tahun depan kerjasama ini lebih ditingkatkan lagi. Usai acara pembukaan, esoknya kegiatan Media Gathering dilanjutkan media visit ke obyek wisata, salah satunya menyaksikan pertunjukan Tari Kecak di Desa Adat Ungasan, di bibir Pantai Melasti.

Siti Fauziah Apresiasi Kolaborasi dan Sinergitas dengan KWP

Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI ,Siti Fauziah, SE., MM., mengapresiasi hubungan kolaborasi dan sinergitas selama ini antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan para jurnalis yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Melalui para jurnalis di KWP, informasi mengenai kegiatan Pimpinan MPR dan kelembagaan MPR dapat tersampaikan secara positif ke masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Siti Fauziah dalam Media Gathering MPR RI Tahun 2023 di Bintang Bali Resort, Kuta, Denpasar, Bali, Sabtu malam (2/12/2023). Media Gathering MPR RI tahun 2023 dengan tema "Peran Media Dalam Mewujudkan Rumah Kebangsaan MPR RI" dihadiri Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua KWP Ariawan, jajaran Biro Humas dan Layanan Informasi Setjen MPR, dan sebanyak 88 jurnalis KWP baik dari media online, cetak, maupun elektronik. Ini adalah media gathering MPR RI yang kedua pada tahun 2023 ini, setelah penyelenggaraan di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Siti Fauziah menyebutkan bahwa para jurnalis di KWP merupakan partner dari Sekretariat Jenderal MPR. "Mereka adalah partner MPR RI. Melalui para jurnalis KWP ini MPR bisa menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan para Pimpinan MPR RI secara positif," ujarnya.

Siti Fauziah mengungkapkan, selama ini Biro Humas dan Layanan Informasi MPR RI menjalin hubungan baik dengan para jurnalis di KWP. "Selama ini hubungan MPR RI dengan para wartawan di KWP berjalan dengan baik. Kami juga mengharapkan adanya dukungan dan masukan dari para jurnalis untuk meningkatkan sinergi yang lebih baik lagi ke depan. Hal yang sudah baik tentu kita akan lanjutkan," pintanya.

Siti Fauziah yang akrab disapa Ibu Titi mengatakan, Media Gathering MPR RI Tahun 2023 di Bali merupakan usulan dari para

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

wartawan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Bali adalah salah satu destinasi yang digemari para wartawan. "Jadi, ada satu hari kita akan mengeksplore destinasi Bali," katanya.

Media Gathering MPR RI ini, lanjut Ibu Titi, menjadi satu momentum di masa kampanye Pemilu ini, sebelum pesta demokrasi pada tahun 2024. Dalam momentum itu, Siti Fauziah berharap, para wartawan juga memiliki sikap netral dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. "Kita mendukung agar situasi masa kampanye ini bisa berlangsung dengan tertib dan damai," ucapnya.

Siti Fauziah berharap, media gathering MPR RI masih bisa berlanjut pada tahun depan. "Atas dukungan Pimpinan MPR RI Media Gathering MPR untuk menjalin silaturrahim dan sinergitas dengan para jurnalis ini bisa terus berlanjut pada tahun depan," harapnya.

Siti Fauziah berterimakasih kepada wartawan di KWP karena selama tujuh tahun menjadi Kepala Biro Humas dan Layanan Informasi telah berhasil membuat satu buku yang berisi tentang kegiatan sebagai Kepala Biro Humas dan Layanan Informasi MPR. "Buku ini masih dalam penyempurnaan, dan nanti kita akan luncurkan bersama KWP," tutur Siti Fauziah yang juga merangkap sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Biro Humas dan Layanan Informasi Setjen MPR.

Sementara itu Ketua KWP Ariawan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan MPR dan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR yang telah bersinergi dengan KWP. "Setelah dua tahun Media Gathering MPR sempat terhenti karena pandemi Covid 19, pada tahun ini MPR telah dua kali mengadakan media gathering," ujarnya.

Ariawan menyebutkan, salah satu sinergitas dengan MPR RI di antaranya melalui Diskusi Majelis MPR RI yang secara rutin berlangsung setiap Rabu setiap pekan. "Diskusi Rumah Kebangsaan ini akan lebih ditingkatkan lagi pada tahun depan," ujarnya.

Ariawan juga berharap kolaborasi dan sinergitas antara KWP dan Biro Humas dan Layanan Informasi MPR RI bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. "Media Gathering ini menjadi ajang silaturahim setelah beraktivitas di lingkungan parlemen. Semoga kolaborasi dan sinergi bisa ditingkatkan," ucapnya.

Pembukaan Media Gathering MPR RI diakhiri dengan pengundian doorprize di antaranya televisi, kulkas, laptop, handphone, sepeda gunung hingga logam mulia.

Ahmad Muzani: Jurnalis Agar Menguatkan MPR Sebagai Rumah Kebangsaan

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani berharap, para jurnalis yang mengikuti perkembangan politik di seputar Senayan (MPR, DPR, dan DPD) bisa menyajikan cara pandang yang lebih edukatif dan berperspektif tentang kehidupan kebangsaan. Karena itu, MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi kokoh dan kuat.

"Proses politik yang terjadi saat ini dalam upaya meyakinkan rakyat hanyalah proses demokrasi yang wajar. Saya meyakini bingkai pers dan pemberitaan dari para jurnalis adalah bingkai yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, serta penguatan demokrasi," katanya ketika membuka Media Gathering MPR RI Tahun 2023 di Denpasar, Bali, Sabtu malam (2/12/2023).

Media Gathering MPR Tahun 2023 dengan tema: "Peran Media dalam Mewujudkan Rumah Kebangsaan MPR" dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, SE., MM., Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Ariawan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Indro Gutomo, serta sebanyak 88 jurnalis yang sehari-hari meliput kegiatan di MPR, DPR, dan DPD.

Ahmad Muzani mengatakan, tahun ini adalah tahun politik menjelang Pemilu 2024.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Namun, tahun politik ini jangan sampai membuat suasana kebangsaan menjadi pengap, sesak, apalagi sempit. "Pernyataan-pernyataan yang disampaikan elit politik haruslah pernyataan yang memberikan optimisme, mencerahkan, menggembirakan, dan menunjukkan persatuan di atas segalanya," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Muzani mengakui bahwa proses demokrasi sekarang ini untuk memberi pengaruh kepada rakyat dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya memang membuat suasana hangat bahkan panas. Karena itu, dia berharap, para elit untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang membuat kehidupan kebangsaan kita yang kesannya semakin sempit, dan rumit.

"Saya percaya elit politik kita memiliki cakrawala dan cara pandang yang begitu luas tentang bangsa. Dalam pandangan kami, harus dijaga suasana kebangsan kita suasana yang harmonis, kekeluargaan, dan menjaga persaudaraan di antara anak bangsa," katanya.

Menurut Muzani, sejarah bangsa Indonesia telah memperlihatkan bahwa keruwetan, kerumitan, bahkan persengketaan, berujung kembali pada persaudaraan. Dia mencontohkan keruwetan nasib negara tidak jelas, pada akhirnya kembali ke NKRI tahun 1950, perdebatan UUD dan dasar negara dalam Konstituante yang tidak selesai akhirnya bisa selesai dengan Dekrit Presiden tahunn1959, begitu juga peristiwa pemberontakan PKI tahunn1965, reformasi tahun 1998 dan amandemen UUD karena tuntutan reformasi, semua bisa diselesaikan.

"Semua pemimpin bangsa akhirnya kumpul kembali untuk memikirkan masa depan Indonesia. Ini adalah sebuah proses kembali pada satu meja. Itulah meja pemimpin bangsa Indonesia," tuturnya.

Muzani menambahkan pemenang Pemilu nanti harus merangkul sesama anak bangsa. "Itulah yang menjadi tradisi bangsa kita. Jika para pemimpin politik kita melakukan hal ini tentu ini akan melegakan kehidupan demokrasi kita. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Yang berlaga adalah sesama anak bangsa, sesama saudara kita. Mereka adalah perekat bangsa Indonesia. Setelah selesai kontestasi Pemilu, semua kembali kumpul dalam ikatan Indonesia Raya. Itulah sejatinya proses kebangsaan kita. Itulah cara Indonesia berdemokrasi," paparnya.

Pada akhirnya Muzani berharap para jurnalis agar tetap produktif dan memikirkan bangsa dengan cara sesuai kapasitasnya sebagai wartawan. "Saya lihat banyak jurnalis senior yang bisa memberi semangat kepada para jurnalis lainnya untuk tetap berkarya dan memberi pengabdian kepada bangsa dan negara yang lebih baik lagi," pungkasnya. ❑

Mengurai Prosedur Amandemen UUD

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Akademisi dari kampus ternama bersama Badan Pengkajian MPR membedah tata cara perubahan UUD. Diurai ada beberapa prosedur untuk bisa melakukan amandemen. Terungkap, prosedur amandemen konstitusi di Indonesia masih cenderung elitis dan kurang memberi ruang memadai bagi partisipasi publik.

BERTEMPAT di Kota Yogyakarta, pada Oktober 2023, Badan Pengkajian MPR bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Univesitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menggelar *focus group of discussion* (FGD).

FGD dengan tema: *Tata Cara Perubahan UUD NRI Tahun 1945* dihadiri oleh Prof. Hendrawan Supratikno (Fraksi PDI Perjuangan), Sri Wulan (Fraksi Nasdem), Ferdiansyah (Fraksi Partai Golkar), Supriyanto (Fraksi Partai Gerindra), Dr. H. Jon Erizal, SE., MBA., (Fraksi PAN), dan Anna Latuconsina (anggota MPR dari Kelompok DPD). Lalu, dari pihak kampus, hadir Dr. Abdul Gaffar Karim, S.Sos., M.Si.,(UGM), Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., (UII), dan Dr. Nanik Prasetyo Ningsih, SH., MH., (UMY).

Dalam makalahnya, Dr. Abdul Gaffar mengatakan, prosedur amandemen konstitusi di Indonesia masih cenderung elitis dan kurang memberi ruang memadai bagi partisipasi publik. Proses konsultasi publik yang diatur dalam undang-undang masih diterapkan dengan cara yang juga elitis, tanpa peluang yang benar-benar memadai bagi masyarakat luas untuk turut memengaruhi rencana amandemen. Ini perlu diperbaiki dengan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk turut memberikan pendapatnya tentang sebuah rencana amandemen konstitusi. Peluang itu bisa disediakan dengan menerapkan referendum yang regulasi dan metodenya ditata-ulang, atau minimal dengan melakukan konsultasi publik yang punya daya jangkau lebih luas daripada yang selama ini ada.

Lebih lanjut dikatakan, prosedur untuk mengubah konstitusi dapat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan politik. Prosedur dan persyaratan khusus untuk mengubah suatu konstitusi dapat ditemukan dalam teks konstitusi itu sendiri atau dalam undang-undang dan peraturan hukum yang relevan. Prosedur-prosedur ini juga dapat berubah seiring berjalannya waktu melalui amandemen terhadap konstitusi itu sendiri, yang mencerminkan norma-norma politik dan sosial yang terus berkembang. Namun demikian, terdapat beberapa prosedur dan tren umum yang sering terlihat dalam proses amandemen konstitusi di seluruh dunia.

Diuraikan prosedur yang ada, di antaranya: *Amandemen Legislatif*. Di banyak negara, amandemen konstitusi diusulkan dan disahkan oleh badan legislatif, seringkali memerlukan suara mayoritas

yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk legislasi reguler. Misalnya, diperlukan dua pertiga mayoritas di kedua majelis legislatif, seperti yang terjadi di AS, Kanada, Inggris, India dan Australia.

Referendum. Di beberapa negara, amandemen konstitusi harus disetujui melalui referendum nasional. Hal ini memungkinkan warga negara untuk memberikan suara langsung terhadap usulan perubahan konstitusi. Persyaratan khusus untuk bisa lolos sangat bervariasi, termasuk ambang batas partisipasi dan persetujuan pemilih. Mekanisme referendum ini diterapkan di Swiss, Irlandia, Itali, Prancis, dan Rusia.

Konvensi. Beberapa negara mengadakan majelis atau konvensi khusus untuk mengusulkan amandemen konstitusi. Konvensi-konvensi ini seringkali terdiri dari perwakilan yang dipilih atau ditunjuk, dan rekomendasi mereka mungkin perlu diratifikasi oleh masyarakat atau badan legislatif. Ini pernah diterapkan di Amerika Serikat tahun 1700-an, serta belakangan di Irlandia dan Islandia.

Executive action. Di beberapa negara, kepala negara atau pemerintahan mungkin mempunyai kekuasaan untuk mengubah konstitusi melalui perintah atau keputusan eksekutif. Hal ini biasanya terjadi di sebuah sistem otoriter, seperti Korea Utara dan Venezuela.

Prosedur Campuran. Banyak negara menggunakan kombinasi metode di atas, yang memerlukan, misalnya, mayoritas legislatif yang diikuti dengan referendum publik.

Abdul Gaffar menyebut, amandemen konstitusi seringkali memerlukan tingkat dukungan yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang biasa. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perubahan terhadap hukum dasar negara mendapat dukungan luas dan bukan merupakan hasil dari mayoritas politik yang bersifat sementara.

Beberapa negara memiliki *procedural safeguards* tambahan, seperti persyaratan agar amandemen diperdebatkan dan disahkan dalam beberapa sesi legislatif atau dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memastikan pertimbangan yang cermat. Sejumlah konstitusi juga menyertakan *entrenchment clauses* yang membuat ketentuan tertentu (misalnya, hak-hak dasar) lebih sulit untuk diubah dibandingkan ketentuan lainnya. Kertentuan-ketentuan tertentu itu harus disepakati oleh mayoritas yang lebih besar, atau mempersyaratkan referendum, untuk bisa diubah. Di beberapa negara, masyarakat dapat mengusulkan amandemen konstitusi melalui proses *polular initiative*, yang biasanya dilakukan dengan pengumpulan tanda tangan atau dukungan dari masyarakat sebelum usulan amandemen diajukan.

Diuraikan kembali oleh Abdul Gaffar, terdapat dua persoalan pokok yang banyak disebut-sebut dalam sejumlah kajian, terkait dengan tata cara amandemen konstitusi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU MD3:

Kompleksitas dan proses yang panjang. Proses amandemen konstitusi Indonesia

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

cenderung rumit dan panjang. Proses itu membutuhkan suara mayoritas di MPR. Hal ini dapat mempersulit penerapan perubahan konstitusi, terutama jika terdapat penolakan yang signifikan. Di sisi lain, prosedur amandemen konstitusi dapat dimanipulasi untuk tujuan politik. Persyaratan mayoritas suara di MPR, ditambah dengan dominasi partai politik tertentu, berpeluang meloloskan amandemen yang cenderung mengabdi pada kepentingan kelompok atau faksi tertentu. Artinya, prosedur amandemen konstitusi di Indonesia bisa mempersulit pelaksanaan reformasi konstitusi yang komprehensif bila diperlukan. Kompleksitas proses tersebut dapat menghambat kemampuan untuk mengadaptasi konstitusi terhadap perubahan realitas sosial dan politik.

Terbatasnya keterlibatan warga negara: Proses amandemen konstitusi di sangat bergantung pada elit politik dan tidak cukup mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat luas, karena memang tidak ada proses pelibatan masyarakat yang komprehensif. Memang ada ketentuan mengenai referendum jika MPR hendak melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam UU. No. 5/1985 tentang Referendum. Namun, aturan ini tidak digunakan ketika MPR benar-benar melakukan serangkaian amandemen terhadap UUD 1945 di awal reformasi. Ada keterbatasan partisipasi langsung masyarakat dalam proses amandemen, yang sengaja dibuat oleh elit politik. Bagi kelompok mayoritas, hal ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun, ada peluang besar bahwa proses amandemen mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak kelompok minoritas. ❑

Membuka Keterlibatan Masyarakat

Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.

DALAM FGD yang digelar di Yogyakarta, Nanik Prasetyo Ningsih dalam makalahnya mengungkap, tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 24 sampai dengan pasal 32 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI sudah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 dari sisi syarat formil.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dikaji mengenai tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan pasal 24 ayat (2) UU MD3 dan pasal 101 ayat (2) Tata Tertib MPR RI yang menyatakan bahwa: "Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat

mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Apabila ketentuan ini dibuat dengan mengacu ketentuan Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa: "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan", maka sebenarnya ketentuan ini telah menambahkan satu norma yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni larangan untuk mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur yang tidak dapat dilakukan perubahan terbatas pada bentuk negara, berarti hal-hal yang diatur oleh UUD 1945 dapat diubah. Pembukaan UUD 1945 satu kesatuan dengan pasal-pasal yang ada, namun tidak dapat disederajatkan. Karena Pembukaan sebagai basic norm dari muatan materi yang ada dalam UUD 1945. Di samping itu, Pembukaan UUD 1945 harus di nilai sebagai garis politik hukum negara yang sifatnya permanen. Kandungan nilai dalam pembukaan UUD 1945 tidak hanya sebatas pada pernyataan dari founding father ketika memproklamirkan kemerdekaan negara.

Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai

instrinsik yang harus menjadi acuan dalam membentuk hukum juga kebijakan yang berkaitan dengannya. Nilai instrinsik adalah sebagai berikut: "Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Karakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia." Nilai instrinsik merupakan sistem nilai-nilai, cita-cita yang harus diterjemahkan ke dalam produk-produk hukum. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah satu kesatuan sebagaimana terdapat pada Alinea ke-4. Hamid Attamimi telah menempatkan Pancasila.

Sebagai grundnorm dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatasi Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm dan Batang Tubuh UUD 1945 sebagai staatsgrundgesetze. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting, karena di sanalah tertuang norma fundamental negara (staatsfundamental-norm), tujuan bangsa dan tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.

Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 sehingga tidak dapat diubah sama sekali, merupakan kesepakatan MPR pada tahun 1999 ketika melakukan perubahan UUD 1945 untuk pertama kalinya. Dan, kesepakatan ini memang tidak dituangkan dalam Pasal 37 UUD 1945, karena pada dasarnya bila melihat ketentuan Pasal 37 menyatakan bahwa yang menjadi objek perubahan UUD 1945 adalah "pasal-pasal Undang-Undang Dasar, bukan Pembukaan UUD 1945, sebagaimana disebutkan dengan jelas pada Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4), sebagai berikut: "(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mendasarkan pada pembahasan di atas, maka sebaiknya ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 101 ayat (2) Tata Tertib MPR RI tidak perlu menyebutkan larangan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 karena sudah dengan sangat jelas norma dalam UUD 1945, bahwa bagian UUD 1945 yang dapat diubah adalah pasal-pasal UUD 1945.

Kedua, tata cara Perubahan UUD 1945, baik dalam UU MD3 maupun Tata Tertib MPR RI belum membuka peluang keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan UUD 1945. Biar bagaimanapun UUD 1945 adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian pembentukannya juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mensyaratkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab (meaningful participation). Meaningful participation disebutkan pertama kali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). ❑

Setjen MPR Terima Kunjungan Studi Banding Universitas Esa Unggul

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DEPUTI Bidang Pengkajian dan Permasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Hentoro Cahyono, menerima perwakilan dari Universitas Esa Unggul (UEU) di Ruang Delegasi Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Maksud kedatangan delegasi UEU yang terdiri dari Kabiro Pengembangan Kerjasama Institusi UEU, Dr. Ayu Larasati, beserta Wakil Dekan FEB, dosen dan mahasiswa UEU ke MPR RI adalah untuk melakukan Studi Banding dan Kuliah Umum dalam upaya meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai tugas dan wewenang MPR bagi rakyat.

Studi banding mahasiswa Universitas Esa Unggul ke MPR RI dengan maksud untuk mempelajari tugas, fungsi, dan kegiatan lembaga tersebut. Dengan demikian, studi banding ke MPR RI ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa dalam memperdalam pemahaman mereka tentang politik, tata negara, dan sistem pemerintahan

Kepada delegasi civitas academica UEU, Hentoro Cahyono menjelaskan, keanggotaan MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Sedangkan tugas dan wewenang MPR meliputi: 1.Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2. Melantik presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR; 3.Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya; 4. Melantik wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang jabatan presiden jika ada ketidakpastian. ❑

DER

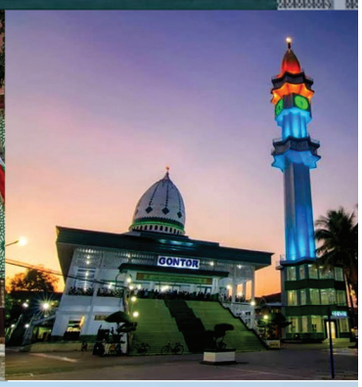

100 Tahun Gontor

Dari Tegalsari Menuju Dunia

Tak dapat disangkal lagi, Pondok Modern Darussalam Gontor adalah sebuah nama yang popular, bahkan menjadi rujukan bagi dunia pesantren di Indonesia. Alumni pondok pesantren ini disegani dan diterima tidak hanya dalam dunia pendidikan Islam, namun juga dalam percaturan politik nasional. Sebelum menjelma menjadi pesantren modern, kiprahnya diawali dari Pesantren Tegalsari. Di pesantren ini pernah nyantri Paku Buwono II, Ronggowarsito, Pangeran Diponegoro, dan HOS. Tjokroaminoto.

Pondok Gontor juga melahir tokoh-tokoh hebat lainnya, tercatat nama Wakil Perdana Menteri Idham Chalid, Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Ketua Muhammadiyah Dien Syamsuddin, Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, serta sejumlah tokoh besar lainnya pernah mondok di pesantren Gontor.

Kini pesantren yang pusatnya di Ponorogo itu telah berkiprah seratus tahun (satu abad), serta telah dan akan terus menyumbangkan alumninya untuk kemajuan bangsa, bahkan dunia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI SALAH satu resto di Kemang, Jakarta Selatan, Oktober 2023, berkumpullah puluhan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Di antara mereka adalah Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc.MA., (HNW), mantan Menteri Agama Dr. KH. Lukman Hakim Saifuddin, mantan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie, Wakil Ketua Komisi Informasi Jakarta Luqman Hakim Arifin, dan Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Jakarta KH. Masrur.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Siang itu, mereka (para alumni Pondok Gontor) yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya punya agenda menggelar konferensi pers, berkenaan dengan akan digelarnya kegiatan 'Tajammu dan Jalan Sehat 100 Tahun Gontor'.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ulang tahun Gontor yang diselenggarakan di Jakarta. Konferensi pers dilakukan agar informasi yang disampaikan tersebar luas di tengah masyarakat, terutama bagi alumni Gontor itu sendiri. Dengan demikian rasa syukur semakin banyak dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dampak positifnya juga dirasakan oleh makin banyak komponen umat, bangsa, dan negara.

HNW, begitu Hidayat Nur Wahid biasa disapa, yang juga salah satu alumi Gontor tahun 1970-an menjelaskan, *Tajammu* (ungkapan khas alumni Gontor untuk kegiatan kumpul-kumpul) dan *Jalan Sehat 100 Tahun Gontor* yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, merupakan salah satu bentuk syukur bagi Gontor dan alumninya. "Kita bersyukur hadirnya Gontor penuh manfaat yang riil dirasakan oleh umat, bangsa, dan Negara," ujar HNW.

HNW menyakini, kehadiran Gontor merupakan karunia dari Allah SWT. Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, kehadiran pondok pesantren yang berpusat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, telah melahirkan puluhan ribu alumni. Dari Gontor sudah lahir 20-an cabang dan alumni yang telah melahirkan 600-an pondok pesantren, dan cucu alumni Gontor telah mendirikan 300-an pesantren.

Alumni Gontor juga berkiprah nyata di tengah masyarakat, baik dalam posisi non formal maupun formal, di pelosok daerah hingga ke pusat berbangsa dan bernegara. "Alumni Gontor berkiprah di beragam kehidupan, bahkan ada yang menjadi Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, menteri, wakil menteri, duta besar, rektor, serta jabatan strategis lainnya," ujarnya.

Kiprah alumni Gontor yang berada di berbagai tempat itu, menurut alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu menunjukkan pondok pesantren yang sekarang berdiri di banyak tempat itu diterima sangat baik oleh masyarakat dan negara. "Dan, semuanya menjadi spirit positif kehidupan berkeummatan, serta membawa manfaat bagi bangsa dan Negara," tuturnya.

Lebih lanjut, HNW menyatakan, hadirnya pondok pesantren yang di dalamnya ada Gontor di tengah masyarakat terbukti membawa maslahat dan menghadirkan harapan umat, sehingga ketika terjadi era disrupsi dan *pos thruth*, di mana masyarakat tidak mementingkan nilai-nilai kehidupan, agama, ternyata pondok pesantren mampu terus hadir, diminati oleh masyarakat, dan bisa menjadi benteng nilai-nilai kehidupan berkeummatan dan berkebangsaan.

Dia menambahkan, kehadiran pondok pesantren selalu menyemangati, membersamai, dan memberi solusi sehingga keberadaannya layak untuk disyukuri, dibantu dan dibela. Agar kehadiran pesantren seperti Gontor semakin bisa mewujudkan semangat hadirkan manfaat yang lebih banyak dan luas.

Beberapa hari setelah konferensi pers, ribuan alumni Gontor berserta keluarga dan masyarakat luas memenuhi Lapangan Mo-

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

nas. Di sana mereka menggelar acara Tajammu dan Jalan Sehat 100 Tahun Gontor.

Hadir dalam acara jalan sehat itu, HNW; para Pimpinan PMDG, antara lain KH. Hasan Abdullah Sahal; KH. M. Akrim Mariyat dan Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi. Juga Nampak anggota Badan Wakaf Gontor dan Tokoh Alumni Gontor, seperti Prof. Hamid Fahmi Zarkasyi (Rektor UNIDA), Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, KH. Muhammad Danial, KH. Muhammad Nasir Zein, Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, KH. Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menag), Ust Suhaili Kalla, Ust Abdurrahman Fachir Sekjend PMI, dan La Ode M. Safiul Akbar (Komut Pelindo).

Dalam sambutan di hadapan ribuan peserta jalan sehat, HNW mengatakan, wujudkan persaudaraan dan persatuan adalah misi penting kehadiran Gontor. Hal demikian sudah menjadi ajaran dan darah daging buat keluarga besar Gontor. Hal ini juga tercermin dari penyematan kata 'Darussalam' dalam penyebutan nama pondok, yang maknanya 'Kampung Damai'.

Karena merupakan sesuatu yang sangat penting maka dalam upaya turut menjaga dan merawat persatuan, Gontor sudah sejak dahulu mengajarkan kepada para santrinya, juga kepada bangsa Indonesia, untuk selalu menjaga dan mempererat ukhuwah bahkan menjadi perekat umat.

"Persaudaraan sendiri adalah pilar yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian," ujarnya. Lebih lanjut, HNW mengatakan, persaudaraan dalam konteks keumatan, kebangsaan, kenegaraan maka realisasi misi ukhuwah Gontor semakin diperlukan di tengah kehidupan bangsa dan negara saat ini yang dihadapkan atau dipertemukan dengan berbagai perkembangan, baik lokal dan global.

"Karenanya, sangat penting bagi Keluarga Besar Gontor, baik santri maupun alumni, yang semakin banyak tersebar di seluruh Indonesia, untuk membawa dan mewujudkan pesan perdamaian bagi seluruh umat dan bangsa. Karena negeri ini adalah negeri kita semua yang juga warisan perjuangan para ulama dan pesantren, termasuk Gontor yang sudah berdiri sebelum Indonesia diproklamasikan. Agar diingatkan bahwa semua yang ada di Indonesia adalah saudara se-agama atau sebangsa dan setanah air, juga sekemanusiaan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf PMDG itu.

Disampaikan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu pelaksanaan kegiatan Tajammu dan Jalan Sehat 100 Tahun Gontor ini adalah sebagai salah satu cara Gontor mendidik umat dan bangsa, dengan mempraktikkan ukhuwah dan menyebarkan perdamaian untuk Indonesia dan dunia. Pesan lain yang juga ingin disampaikan dalam kegiatan akbar ini adalah menyebarkan perdamaian dengan badan yang sehat.

Lebih lanjut dikatakan, sebagaimana di Gontor yang sangat mementingkan olahraga dan kesehatan, maka untuk menciptakan perdamaian yang langgeng diperlukan kesehatan yang prima. Para pelaku penyebar kedamaian juga harus dalam kondisi yang sehat, baik jiwa maupun raganya, sehingga bisa menghadirkan kedamaian secara nyata dan berlangsung lama.

"Kita lihat, puluhan ribu massa santri

Gontor dan keluarganya yang datang di satu tempat area Monas ini membawa pesan penting soal persaudaraan/perdamaian dan kesehatan. Sehingga, acara berlangsung lancar tanpa kendala dan disukai masyarakat, karena dampak akhirnya juga sangat bagus," tuturnya.

Dalam kegiatan yang berbarengan dengan *car free day* itu juga diisi Petisi Tanda Tangan Peringatan 100 Tahun Gontor Merajut Kebersamaan untuk Persatuan Indonesia. Kemudian, dimeriahkan dengan atraksi santri dari berbagai pesantren dan alumni Gontor di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, seperti marching band, reog ponorogo, debus banten, sisingaan, pantomim, hadroh, silat, paskibra, pramuka, ondel-ondel Jakarta, tari saman, dan tari dari berbagai daerah.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Untuk menjadi pondok pesantren besar seperti saat ini, jalan panjang telah dilalui oleh Gontor. Menurut *Wikipedia*, Gontor berdiri tidak secara tiba-tiba. Diawali berdirinya Pondok Pesantren Tegalsari. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari pada tahun 1680 di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Lokasi pesantren ini berjarak sekitar 3 km dari lokasi Gontor yang saat ini berdiri, dan berjarak 10 km dari Kota Ponorogo.

Pada masanya, Tegalsari merupakan pesantren yang termasyhur sehingga banyak orangtua menyantrikan anaknya di sana. Tersebut, mereka yang pernah nyantri di Tegalsari adalah Raja IX Mataram dan Sultan I Surakarta Paku Buwono II, Sastrawan Ranggawarsita, Pemimpin Perang Jawa Pangeran Diponegoro, dan Bapak Bangsa H.O.S. Cokroaminoto.

Seperti diberitakan dalam *Wikipedia,* mereka yang pernah memimpin Tegalsari adalah Kiai Ageng Hasan Besari, Kiai Ilyas, Kiai Hasan Yahya, Kiai Hasan Besari II, Kiai Hasan Anom, dan Kiai Hasan Khalifah. Mereka berada dalam rentang waktu antara tahun 1680 hingga 1883.

Lebih lanjut diungkap, pada pertengahan Abad XIX, di masa Kiai Hasan Khalifah, Tegalsari mengalami kemunduran. Satu persatu santrinya mengundurkan diri, sehingga jumlah santrinya menurun. Para santri yang tetap bertahan di sana, di antaranya Raden Mas Sulaiman Djamaluddin. Santri itu bukan anak sembarangan. Ia memiliki garis keturunan langsung dengan Keraton Kasepuhan Cirebon.

Kiai Hasan Khalifah pun menikahkan puteri bungsunya Oemijatin dengan Sulaiman Djamaluddin. Sulaiman Djamaluddin tidak hanya dijadikan mantu, namun juga diberi tugas mendirikan pesantren baru untuk meneruskan Tegalsari.

Wasiat dari Kiai Hasan Khalifah dilaksanakan oleh Kiai Sulaiman Djamaluddin. Seperti diberitakan *Wikipedia*, dengan membawa 40 santri dari Tegalsari, Kiai Sulaiman Djamaluddin bersama Nyai Oemijatin mendirikan Pondok Gontor (Lama). Lokasi di mana pondok berdiri saat itu masih berupa *alas gung lewang lewung* atau hutan belantara, tak heran bila tempat itu kerap dijadikan persembunyian bagi perampok, penjahat, penjudi, dan penyamun.

Sama dengan Tegalsari, Gontor (Lama) mengalami nasib yang sama. Masa keberlangsung Gontor (Lama) hanya selama tiga generasi. Tercatat tiga generasi yang pernah memimpin Gontor (Lama) adalah Sulaiman Djamaluddin sebagai pendiri Gontor (Lama), Archam Anom Besari putera dari Sulaiman Djamaluddin, dan Santoso Anom Besari putera dari Archam Anom Besari.

Dalam perjalanan waktu, Kiai Santoso Anom Besari menikah dengan Roro Sudarmi. Sudarmi merupakan keturunan Raden Mas Sosrodiningrat yang merupakan Bupati Madiun. Di usia yang terbilang masih muda, Kiai Santoso Anom wafat pada tahun 1918. Ia meninggalkan 7 anak yang masih kecil. Di sinilah yang membuat Gontor (Lama) mengalami nasib yang sama dengan Tegalsari, yakni redup bahkan mati.

Meski orangtuanya tidak ada, tiga dari anak Kiai Santoso Anom Besari, yakni Ahmad Sahal (1901 – 1977), Zainuddin Fananie (1908 – 1967), dan Imam Zarkasyi (1910 – 1985), tetap melanjutkan pendidikannya baik di pesantren tradisional maupun lembaga pendidikan modern. Setelah mereka menempuh pendidikan dari berbagai tempat, mereka kembali ke Gontor, dan pada tanggal 20 September 1926/12 Rabiul Awwal 1345, mereka mengikrarkan berdirinya PMDG. Ketiga sosok ini di kalangan Gontor disebut sebagai Trimurti pendiri PMDG yang sekarang popular disebut dengan Gontor. Disebutkan, mereka menghidupkan kembali Gontor (Lama) dengan kurikulum yang pada masa itu tak biasa, yakni memasukkan unsur pendidikan dan gaya hidup yang modern.

Selanjutnya, dalam *Wikipedia* dikatakan, pada 12 Oktober 1958/ 28 Rabi'ul Awwal 1378, para pendiri PMDG mewakafkan Gontor kepada umat Islam. Suatu langkah yang mulia, sebab dari sini Gontor menjadi milik umat Islam bukan milik perseorangan. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Seribu Inspirasi Satu Gontor

Gontor berdiri dari berbagai inspirasi. Pengaruh pendidikan yang ada di India, Mesir, dan Afrika Utara, membuat pesantren yang terpusat di Ponorogo itu menjadi lembaga pendidikan yang memadukan ilmu umum dan agama, punya prinsip kesederhanaan, dan tinggal bersama dalam satu atap.

Percakapan menggunakan bahasa Inggris dan Arab menjadi kebiasaan di sana setelah pendiri Gontor ikut Kongres Umat Islam di Surabaya tahun 1926. Berprinsip: "Berdiri di atas dan untuk semua golongan" agar pesantren yang selalu dikunjung oleh Presiden itu terbebas dari sikap fanatisme.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MENINGGALNYA Kiai Santoso Anom Besari sebagai pimpinan Pondok Pesantren Gontor (Lama) tidak hanya membuat duka bagi istri dan ketujuh anaknya. Takdir tersebut juga membuat pesantren yang didirikan oleh Kiai Sulaiman Djamaluddin itu berakhir.

Istri Kiai Santoso Anom Besari, Nyai Santoso, tidak mau larut dalam kesedihan. Dirinya ingin ketujuh anaknya menjadi manusia yang berguna bagi umat, bangsa, dan negara. Untuk itu, Nyai Santoso menyekolahkan tiga dari tujuh anaknya, yakni Ahmad Sahal, Zainuddin Fannanie, dan Imam Zarkasyi, ke berbagai lembaga pendidikan yang tidak hanya bercorak pesantren, namun juga lembaga pendidikan umum. Nyai Santoso berharap, agar mereka meneruskan kembali pesantren yang telah didirikan oleh kakek buyutnya.

Dalam *gontor.ac.id*, disebutkan, ketiga putera Kiai Santoso Anom Besari itu tertarik dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Mesir, Mauritania (Afrika Utara), dan India. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut adalah: *Pertama*, Universitas Al-Azhar. Lembaga pendidikan yang berada di Mesir itu dalam web Gontor dikatakan terkenal dengan keabadiannya. Al-Azhar bermula dari sebuah masjid yang didirikan oleh penguasa Mesir dari Daulah Fatimiyyah. Lembaga pendidikan itu telah hidup ratusan tahun dan telah memiliki harta wakaf yang mampu memberi beasiswa kepada siswa dari seluruh dunia.

Kedua, Pondok Syanggit. Lembaga pendidikan yang ada di Mauritania itu dikelola dengan jiwa keikhlasan. Para pengasuh mendidik murid-murid siang-malam serta menanggung seluruh kebutuhan santri.

Ketiga, Universitas Muslim Aligarh. Perguruan tinggi ini berada di India yang menerapkan pendidikan modern yang membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan umum dan agama, serta

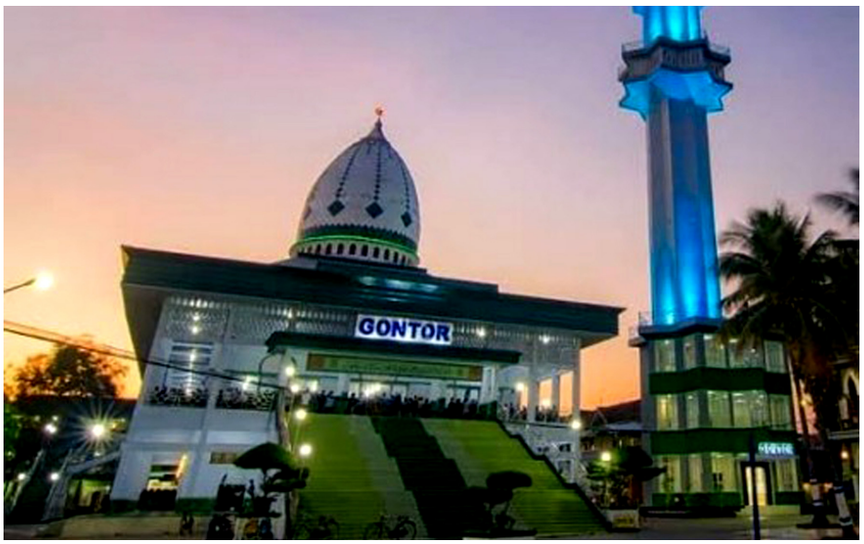

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memjadi pelopor *revival of Islam*.

Keempat, di negara Hindustan itu terdapat Perguruan Santiniketan. Didirikan oleh Rabindranath Tagore, filosuf Hindu. Santiniketan dikenal dengan kedamaiannya. Ia berada di kawasan hutan, serba sederhana dan telah mampu mengajar dunia.

Keempat lembaga pendidikan tersebut menjadi inspirasi bagi ketiga putera Kiai Santoso Anom Besari. Semua ingin dikemas dalam satu model. Untuk merealisasi keinginan tersebut maka pada 20 September 1926/ 12 Rabi'ul Awwal 1345 dibuka kembali Pesantren Gontor dengan sebutan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Dalam *gontor.ac.id* disebut para pendiri PMDG ingin menyintesakan keempat lembaga pendidikan di atas pada Gontor.

Tidak hanya terinspirasi dari lembaga pendidikan di atas yang melahirkan kembali Gontor. Ada satu peristiswa besar yang selanjutnya juga menjadi inspirasi bagi pesantren yang berada di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, itu sehingga menjadi beda dengan pesantren lainnya.

Peristiwa besar apa itu? Dalam *gontor.ac.id* diceritakan, pada tahun 1926 di Surabaya digelar Kongres Umat Islam Indonesia. Kongres itu dihadiri oleh tokoh nasional dan ulama dari berbagai daerah. Di antara mereka, seperti HOS Tjokroaminoto, Kiai Haji Mas Mansoer, H. Agoes Salim, AM. Sangaji, dan Oesman Amin.

Dalam kongres digelar berbagai agenda dan pembahasannya. Setelah berkongres ada kesepakatan bahwa mereka akan mengutus wakil umat Islam Indonesia untuk mengikuti Konferensi Umat Islam Internasional yang digelar Makkah, Arab Saudi. Sebelum diputuskan siapa yang ditunjuk untuk menjadi duta, di antara peserta kongres saling tatap dan saling tunjuk. Mereka 'kebingungan' siapa di antara mereka yang bisa berbahasa internasional, sebab syarat untuk bisa mengikuti konferensi internasional itu harus mahir bahasa Inggris dan atau bahasa Arab.

Mereka bingung, sebab pada masa itu masih jarang orang yang menguasai bahasa asing, terutama Inggris dan Arab. Setelah dicari-cari akhirnya HOS. Tjokroaminoto dan KH. Mas Mansoer ditunjuk menjadi duta ke kongres internasional di Makkah. Alasannya, karena HOS Tjokroaminoto bisa berbahasa Inggris dan KH Mas Mansoer menguasai bahasa Arab.

Syarat yang berat itu rupanya menginspirasi Ahmad Sahal, yang juga menjadi peserta kongres di Surabaya, akan pentingnya bahasa asing sehingga selanjutnya di Gontor santrinya diwajibkan untuk belajar dan menggunakan bahasa Inggris dan Arab dalam percakapan sehari-hari selama berada di lingkungan pesantren. Kebiasaan yang demikian membuat Gontor memiliki kelebihan dibanding pesantren lainnya, dan metoda seperti ini ditiru oleh pesantren-pesantren lainnya.

Banyak peristiwa yang menjadi inspirasi para pendiri PMDG untuk menjadikan Gontor bukan pesantren biasa. Pada masa itu, di tahun 1920-an, muncul berbagai pergerakan mahasiswa dan ulama. Pada masa-masa itu lahir organisasi yang berlatar suku dan agama (Islam) dan selanjutnya juga berdiri berbagai macam organisasi dengan latar ideologi yang datangnya dari asing hingga kemunculan organisasi partai politik.

Mereka tidak hanya berdiri dan bergerak, namun juga membuat lembaga-lembaga pendidikan dan amal usaha lainnya. Dalam *gontor.ac.id* disebut dalam lembaga pendidikan itu ditanamkan pelajaran tentang partai atau golongan sehingga timbul fanatisme golongan. Sedangkan para pemimpinnya terpecah karena masuknya benih-benih perpecahan yang disebarkan oleh penjajah.

Berangkat dari sinilah Gontor mempunyai prinsip lembaga pendidikan harus dibebaskan dari kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Prinsip inilah yang membuat Gontor punya 'mantra' *Berdiri Di Atas dan Untuk Semua Golongan*. Prinsip inilah yang membuat siapa saja bisa masuk pesantren itu, dan terbukti tokoh-tokoh besar dari NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya, banyak dan pernah dididik di Gontor. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Inilah Para Santri Gontor

Suatu lembaga pendidikan itu maju atau tidak bisa dilihat dari kiprah alumninya. Di bawah ini beberapa alumni dari ribuan alumni Gontor. Dilihat dari jabatan yang pernah diemban alumninya terbukti pendidikan pesantren yang pusatnya di Ponorogo itu sangat berkualitas dan untuk berada di berbagai golongan.

Idham Chalid

Hasyim Muzadi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Idham Chalid

Pria ini kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus 1921. Ayahnya bernama Muhammad Chalid. Ayahnya adalah seorang Penghulu. Idham Chalid sendiri merupakan anak ke-5 dari 9 bersaudara. Saudaranya terdiri dari empat laki-laki, dan empat perempuan.

Di MPR dan di kalangan politisi, terutama PPP dan NU, sosok Idham Chalid adalah sosok yang sangat popular. Jabatan yang pernah dipangkunya adalah: Ketua PBNU terlama dalam sejarah, yakni periode 1956-1984, deklarator sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda, Ketua MPR/DPR 1971-1977, Menteri Kesejahteraan Rakyat 1968 -1971, serta beberapa jabatan penting lainnya, seperti Ketua DPA.

Di *Wikipedia* disebutkan, sejak kecil ia dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk sekolah rakyat (SR) langsung duduk di kelas dua. Di sekolah, bakat pidatonya terlihat. Setelah lulus dari SR, dirinya melanjutkan pendidikan di Madrasah Ar-Rasyidiyyah. Di madrasah ini, dia mendapat berbagai macam ilmu pengetahan ditambah dengan pembelajaran bahasa-bahasa asing, seperti Arab dan Inggris.

Selepas dari madrasah, oleh orangtuanya, Idham Chalid dikirim ke Ponorogo, Jawa Timur. Di kota ini dia disantrikan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Kegemarannya belajar bahasa asing di madrasah diteruskan di Gontor. Di Gontor selain belajar ilmu-ilmu agama juga giat belajar bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Ia tamat dari Gontor tahun 1943. Setelah nyantri dirinya melanjutkan pendidikan di Jakarta. Bekal bahasa asing yang didapat di madrasah dan Gontor sangat membantu dirinya di masa pendudukan Jepang. Pada masa itu, ia diminta oleh pemerintah Jepang sebagai penerjemah dalam pertemuan-pertemuan dengan ulama. *

Hasyim Muzadi

Di kalangan NU, nama Hasyim Muzadi termasuk popular. Dia merupakan Ketua Umum PBNU periode 2000-2010. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, 1943, itu merupakan sosok yang suka berorganisasi. Saat menempuh pendidikan di IAIN Sunan Ampel Malang, tahun 1968, ia menjadi Ketua I PMII Cabang Malang. Setelah aktif di tingkat cabang, selanjutnya bisa duduk di kepengurusan pusat.

Di tahun 1992, kiprah berorganisasi di NU mulai terlihat sinarnya setelah dirinya menjadi Ketua NU Wilayah Jawa Timur, sebelumnya menjadi anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PPP. Pada tahun 1999, dalam Muktamar NU, dia terpilih menjadi ketua umum.

Dalam Pilpres 2004, Hasyim Muzadi menjadi cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Pasangan ini berhasil lolos dalam putaran pertama, namun dalam putaran kedua, pasangan itu kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla di putaran kedua.

Pria yang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, itu pernah nyantri di Gontor. *

Din Syamsuddin

Nama Din Syamsuddin tak asing lagi bagi warga Muhammadiyah, sebab pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958, itu merupakan Ketua Umum Muhammadiyah Periode 2005-2010 dan 2010-2015. Setelah berkiprah di Muhammadiyah, pria yang memiliki nama asli Muhammad Sirajuddin Syamsuddin itu menjadi Ketua Umum MUI.

Banyak jabatan yang pernah dipegang oleh pria yang pernah menjadi Politisi Partai Golkar itu. Jabatan yang pernah diaktifi, seperti *Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations, Chairman World Peace Forum, Honorary President World Conference on Religions for Peace.* Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI, *Vice Secretary General World Islamic People's Leadership. President Asian Committee on Religions for Peace,* Ketua Indonesian Committee on Religions for Peace.

Dirinya bisa beraktifitas lintas organisasi, bangsa, dan negara, sebab pendidikan yang ditempuh sangat mendukungnya. Pendidikan yang pernah ia geluti adalah, Pondok PMDG, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan University of California, Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat. *

Nurcholish Madjid

Disebut dalam *Wikipedia*, pria yang akrab dipanggil Cak Nur itu merupakan seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan. Pada masa muda, ia merupakan aktivis HMI hingga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PB HMI. Sebagai anggota HMI, pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, itu merupakan satu-satunya anggota yang mampu menjadi ketua umum selama dua periode.

Nurcholish Madjid

Din Syamsuddin

Sebagai seorang pemikir Islam, dalam *Wikipedia* disebutkan, ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat.

Dirinya lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Dusun Mojoanyar, Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan anak dari pasangan KH. Abdul Madjid dan Fatonah. Ayahnya termasuk pendukung Masyumi. Sedang ibunya puteri Kiai Abdullah Sadjad dari Kediri.

Setelah nyantri di Gontor, ia melanjutkan pendidikan di IAIN Jakarta 1961-1968. Di masa-masa ini sembari menjadi Ketua Umum PBHMI, ia merumuskan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Buku ini selanjutnya menjadi buku pegangan ideologis HMI. *

Yudi Latif

Sebelum kuliah di Universitas Padjadjaran (Unpad), pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 26 Agustus 1964, itu menempuh pendidikan di Gontor. Bekal yang kuat diperoleh di pesantren itulah yang membuat jenjang pendidikannya terbilang luar biasa. Setelah di Unpad dia melanjutkan pendidikan di Australian National University, baik Program S2 maupun S3.

Sebagai seorang akademisi, banyak jabatan yang pernah didudiki, seperti Deputi Rektor Universitas Paramadina, Direktur Reform Institute, Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Anggota Dewan Pendiri Nurcholish Madjid Society (NCMS), Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Anggota Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Dewan Pakar Yayasan Nabil (Nation Building), dan pernah menjabat Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Saat menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideoologi Pancasila dan dalam suatu acara yang digelar oleh Penghimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia, Yudi Latif mengatakan, ini sungguh suatu kebahagiaan bagi saya sebagai alumni PMDG sekaligus sekarang diberi Amanah sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kenapa saya gembira? Menurut Yudi Latif, karena tema (seminar) pada hari itu adalah "Pesantren Sebagai Benteng NKRI dan Pengawal Moral Pancasila". ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Yudi Latif

Sarasehan Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan

Fadel Muhammad Dengar Keluhan para Nelayan dan Pedagang Ikan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DALAM acara Sarasehan di Love Beach, Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (21/11/2023), Wakil Ketua MPR Prof. Ir. H. Fadel Muhammad dengan seksama mendengar keluhan yang disampaikan oleh para peserta sarasehan, yang terdiri dari para nelayan dan pedagang.

Berbagai persoalan mengemuka dalam kesempatan itu, antara lain berat dan berbelitnya beban nelayan. Betapa tidak, menurut para nelayan dan pedagang ikan, hampir seluruh perizinan dan pengurusan administrasi harus dilakukan langsung ke pusat. Belum lagi persoalan pembelian bahan bakar minyak, pembatasan wilayah penangkapan ikan, minimnya sarana berlabuh, tempat pelelangan ikan yang tidak kondusif, dan juga faktor kerusakan laut yang semakin parah sehingga membuat keberadaan ikan semakin menjauh.

Terhadap berbagai keluhan yang dikemukan oleh para nelayan dan pedagang itu, Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, menyatakan prihatin. Dia berjanji akan membantu mengurai persoalan nelayan, yang diakuinya berbelit dan memberatkan. Beratnya beban nelayan, menurut Fadel, karena hampir seluruh perizinan dan pengurusan administrasi harus dilakukan langsung ke pusat. Kondisi tersebut berbeda dibanding era Presiden Habibie yang telah mendesentralisasikan berbagai perizinan ke daerah, tidak melulu harus ke pemerintah pusat.

Tidak sekedar persoalan administrasi, lanjut Fadel, nelayan juga menghadapi persoalan menyangkut pembelian bahan bakar minyak, pembatasan wilayah penangkapan ikan, minimnya sarana berlabuh, tempat pelelangan ikan yang tidak kondusif hingga faktor kerusakan laut yang semakin parah yang membuat keberadaan ikan semakin menjauh. Selain itu, minimnya upaya konservasi lingkungan juga banyaknya sampah serta sisa tambang minyak, membuat kawasan laut semakin tidak layak bagi tempat hidup ikan-ikan tangkapan.

Persoalannya semakin pelik, menurut Fadel, karena hampir semua perizinan harus diurus ke pusat. Kalau pemerintah daerah diikutsertakan, niscaya problematikanya bisa disederhanakan. "Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi para nelayan dan pedagang ikan," kata Fadel Muhammad yang dalam sarasehan itu berperan sebagai narasumber.

Sebagai narasumber, Fadel Muhammad memang membahas materi yang bertema: 'Melalui Tata Usaha Nelayan dan Pedagang Ikan Kita Membangun Kedaulatan Maritim yang Kokoh, Menjaga Kekayaan Laut, dan Memperkuat Identitas Bangsa di Samudra Global."

Jadi, tegas Fadel, sudah tidak waktunya seluruh izin harus diurus di pusat. Cukup di daerah, seperti saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Pengurusan izin ke pusat dibutuhkan hanya untuk urusan yang besar. Dan, itu bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Apalagi, menurut Fadel, kamajuan IT sudah berkembang sangat pesat, yang semestinya bisa memudahkan urusan administrasi.

"Dahulu, bukan hanya perikanan, yang perizinannya dilimpah ke provinsi, tapi juga pertanian. Berkat pelimpahan tersebut, pertanian Gorontalo maju sangat pesat, di mana-mana orang tanam jagung yang hasil dan penjualannya sangat jelas," ungkap Fadel.

Meski banyak kendala dan hambatan, Fadel meminta para nelayan tetap bekerja dengan tekun. Karena kebutuhan sehari-hari hanya akan bisa terpenuhi kalau kita tetap bekerja.

"Jangan malas, karena anak-anak harus tetap sekolah. Jangan sampai mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kita boleh susah, tapi anak-anak harus bisa mencapai cita-citanya, dengan syarat pendidikannya jalan terus," pungkasnya. ❑

Forum Tematik Bakohumas

Siti Fauziah: Perlu Masukan untuk Pengembangan Media Sosial MPR

Peran media sosial sekarang ini sangat penting, bahkan paling penting di antara media-media yang lain

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PLT. SEKRETARIS Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE., MM., menyebutkan, melalui Forum Tematik Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan), Biro Humas MPR RI mendorong sinergi dan sharing pengalaman bersama Humas lembaga dan instansi lain, untuk pengembangan media sosial dan Kehumasan MPR. Di era saat ini media sosial sangat penting sebagai media komunikasi publik untuk menumbuhkan citra positif dan trust pada masing-masing lembaga atau kementerian.

Siti Fauziah menjelaskan, MPR RI menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas ini untuk pengembangan Humas dan menyerap pengalaman lembaga atau instansi lain untuk pengembangan media sosial dan kehumasan MPR RI.

"Humas adalah garda terdepan bagi setiap lembaga atau instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat," kata Siti Fauziah usai membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas MPR RI, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Forum Tematik Bakohumas MPR yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pengembangan Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Publik" ini dihadiri Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, S.Sos., MSi., serta peserta dari praktisi Humas lembaga dan instansi. Sedangkan narasumber FGD ini adalah Indro Gutomo, SH., MH., (Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR RI), Novalita Sari (Senior Media Specialis Kementerian Kelautan dan Perikanan), Ario Setiawan (Koordinator Tim Medsos MPR RI).

Lebih lanjut, Siti Fauziah mengungkapkan, pada era digital saat ini media sosial memainkan peran sangat penting untuk komunikasi publik. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong MPR untuk meningkatkan dan mengembangkan media sosial. Saat ini, MPR RI sudah memanfaatkan media sosial X (twitter), facebook, instagram, dan youtube untuk komunikasi publik. Baru pada tahun 2023 ini, MPR membuat media sosial TikTok.

"Jadi, kalau dibandingkan dengan lembaga atau instansi lain, media sosial MPR RI memang belum berkembang. Ketika mempublikasikan satu kegiatan atau even, kita berhati-hati karena MPR adalah lembaga politik. Jadi, kita sangat hati-hati dan memilih apa yang bisa dipublikasikan di media sosial. Kita hanya mempublikasikan konten mengenai kelembagaan MPR di media sosial," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Siti Fauziah, MPR sudah melakukan inovasi dalam pengembangan media social, termasuk konten-konten di media sosial. "Namun, pengembangan itu belum cukup. Karena itu dalam Forum Tematik Bakohumas ini kita mengharapkan masukan, saran, dan sharing pengalaman dalam pengembangan media sosial. Misalnya, penggunaan influencer atau buzzer," tuturnya.

Siti Fauziah menambahkan, MPR akan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi. MPR pun sedang merintis pembuatan Podcast dan TV MPR. "MPR akan terus bersinergi dengan Humas lembaga atau instansi lain untuk pengembangan media sosial MPR. Inilah alasan MPR menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema media sosial. Melalui Forum Tematik Bakohumas ini, MPR menyerap pengalaman lembaga lain untuk pengembangan media sosial dan kehumasan MPR," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan, Forum Tematik Bakohumas yang membahas tentang media sosial bukan hanya menjadi perhatian MPR, tetapi juga lembaga dan instansi lainnya, baik di pusat maupun daerah. "Dunia media sosial adalah dunia yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan cara-cara baru yang terus berkembang. Media sosial ini dipakai semua orang, tidak seperti media konvensional yang terbatas," katanya.

"Karena itu, Forum Tematik Bakohumas ini sangat penting karena bisa diperoleh materi tentang bagaimana Humas lembaga dan instansi pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menjalankan

komunikasi publik supaya masyarakat mendapatkan persepsi positif tentang lembaga-lembaga pemerintahan," sambungnya.

Usman Kansong menambahkan, ujung atau tujuan komunikasi publik yang dilakukan Humas lembaga atau instansi pemerintah adalah citra positif pemerintah dan trust dari masyarakat kepada pemerintah. "Humas lembaga atau instansi pemerintah perlu mengembangkan kompetensi dalam memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi publik untuk menyeimbangkan informasi tidak akurat yang menyesatkan bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Usman Kansong.

Jadi, "Peran media sosial sekarang ini sangat penting, bahkan paling penting di antara media-media yang lain. Harapan kita agar Humas lembaga atau instansi pemerintah dapat menjadikan media sosial sebagai medium komuniksi publik yang efektif dalam mendiseminasi program dan kebijakan pemerintahan," ujarnya. ❑

Prof. Dr. Muryanto Amin, M.Si
Rektor Universitas Sumatera Utara

Perlu Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

PENINGKATAN kualitas pendidikan tinggi di Indonesia harus kita upayakan semaksimal mungkin. Sebab, jika perguruan tinggi di Indonesia sudah masuk 500 teratas versi *QS World University Rankings,* maka terwujudnya Indonesia Emas sudah di depan mata. Ini perlu dukungan semua pihak, *stakeholders*, terutama di legislatif.

Salah satu yang saya tekankan adalah penajaman pembelajaran tentang Pancasila dan multikultural di perguruan tinggi, Di USU sendiri memang menjadi agenda yang akan dibicarakan secara detil di tingkat pembelajaran yang ada di USU sendiri dan di sekitar USU.

Memang untuk mewujudkannya perlu dipikirkan dan dibuat perencanaan dan tahapan-tahapannya harus kita rumuskan. Sekarang ini, yang sudah kita buat dengan Pemko Medan baru di level SD dan SMP. Memang terus diingatkan lagi dan tidak boleh berhenti. Stepnya masuk dulu, lalu kita buat evaluasi terus menerus, sampai ini menjadi kebijakan nasional,

Pembahasan soal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia sangat baik dan saya harap makin luas lagi kedepnnya. ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ki Gendeng Ardianto
Dalang asal Blitar, Jawa Timur

Penanaman Karakter Bangsa Efektif Melalui Seni Budaya

BANGSA Indonesia sangat lekat oleh seni dan budaya, itu sudah berjalan ratusan tahun. Banyak budaya di seantero negeri ini yang mengajarkan dan memiliki falsafah yang baik untuk menanamkan karakter dan jati diri bangsa.

Seperti di Jawa ada seni wayang kulit. Cerita yang disajikan penuh dengan pembelajaran, tata krama yang baik. Seni jawa wayang kulit ini tidak hanya disenangi oleh orang Jawa saja, tapi sudah meluas di daerah- daerah lain, demikian juga dengan seni budaya daerah lain yang banyak ada di Jawa. Seperti saya diundang untuk melakukan pagelaran wayang kulit di Provinsi Gorontalo.

Hal ini membuktikan bahwa persatuan dan toleransi yang kuat antar anak bangs aitu bisa direkatkan dengan seni dan budaya. Untuk itulah, saya berharap seni budaa daerah harus terus dijaga eksistensinya jangan sampai redup atau malah hilang. Hal ini membutuhkan kesadaran dan kerjasama semua pihak baik itu pemerintah dan rakyat. ❑

DER

Muhammad Ikhwan AM

Sang Penjaga Alam Karst Rammang-Rammang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MAHATMA Gandhi, seorang politikus yang juga tokoh spiri tual asal India pernah mengingatkan bahwa "Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Namun, tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah."

Kalimat tersebut terdengar sederhana, namun maknanya sangat mendalam. Dan, di era modern sekarang ini keserakahan membuat bukan hanya sebuah negara mengalami kerusakan, tetapi juga dunia terancam dalam bahaya. Dan, itu sudah banyak contohnya.

Di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi Kabupaten Maros, sifat serakah manusia nyaris melumatkan karst atau batu gamping yang ada di sana. Apalagi, keberadaan karst selalu memantik minat untuk dieksploitasi. Baik untuk dipergunakan sebagai bahan semen, marmer atau setidaknya menjadi batu pondasi.

Pada 2013, izin eksploitasi rammang-rammang karst di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dikeluarkan pemerintah kepada salah satu investor tambang batu marmer dan gamping. Namun, sebelum alat-alat berat didatangkan, masyarakat setempat sadar ancaman yang bisa timbul akibat eksploitasi lahan tersebut. Antara lain, musnahnya habitat keragaman hayati yang hidup di sekitar wilayah tersebut.

Setelah melalui perang urat syaraf bahkan nyaris memancing keributan, izin penambangan tersebut akhirnya dibatalkan. Kemudian pada 2015, rammang-rammang karst itupun dibuka untuk kegiatan wisata. Pelan tapi pasti, masyaraklat sekitar yang semula tidak mendapat efek ekonomi secara langsung mulai memperoleh keuntungannya sendiri.

Keberhasilan masyarakat menghalau kerusakan alam dan membatalkan izin eksploitasi rammang-rammang karst di Kabupaten Maros ini tak lepas dari kerja keras dan keberanian Muhammad Ikhwan AM (42) atau yang dikenal dengan nama Iwan Dento. Aktivis lingkungan Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, ini menjadi motor bagi warga, menolak hadirnya perusahaan tambang batu gamping dan marmer.

Iwan Dento selalu berdiri paling depan saat ada pihak-pihak yang ingin merusak keutuhan karst rammang-rammang. Dan, itu terjadi tidak hanya satu dua kali saja. Bukan hanya menolak eksploitasi, Muhammad

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ikhwan AM juga berusaha mengubah cara pandang masyarakat terhadap gugusan batu gamping. Gagasan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari karst rammang-rammang tanpa merusak fisik dari lingkungan. Salah satunya adalah menjadikan gugusan batu gamping sebagai ekowisata.

"Bagi saya, penyelamatan karst merupakan bentuk penyelamatan ruang hidup. Serta penyelamatan identitas, karena di wilayah itu masih terdapat berbagai peninggalan prasejarah langka dan berusia tua," kata Muhammad Ikhwan beberapa waktu lalu.

Penyelamatan rammang-rammang, kata Muhammad Ikhwan, juga bermakna mempertahankan flora dan fauna dari kepunahan. Melestarikan gugusan batu gamping juga berarti menyelamatkan sumber air yang sangat berguna untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Perintis Lingkungan

Berkat perjuangan Muhammad Ikhwan itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganugerahkan penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan, sebagai penjaga alam Karst Rammang-Rammang.. Penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar, di kantor KLHK, Jakarta, Selasa (6 Juni 2023), bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia atau World Environment Day.

Menanggapi penganugrahan penghargaan tersebut, Iwan mengaku bahagia karena perjuangganya selama 15 tahun mengamankan rammang-rammang mendapat pengakuan negara. Namun, penghargaan itu bukan tujuan akhir dari usaha pelestarian rammang-rammang. Penghargaan itu berarti pengakun negara terhadap gagasan penyelamatan yang didukung masyarakat.

"Saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang selama ini terlibat dan berujuang bersama menyelamatkan rammang-rammang karst. Piala ini adalah penghargaan bersama, jadi ibarat sepakbola, saya hanya disimbolkan saja sebagai kapten yang memegang pertama medali itu," katanya merendah.

Dengan penghargaan itu, Iwan bersama teman-temannya semakin bersemangat menjaga serta melestarikan karst. Dengan penghargaan kalpataru yang didapatnya, Iwan juga berharap bisa terlibat dalam upaya pemanfaatan karst tanpa merusak lingkungan.

Harapan itu tak terlebihan, apalagi rammang-rammang itu sudah menjadi bagian dari Geopark Maros-Pangkep yang telah diakui UNESCO. Artinya, akan ada intervensi dunia terhadap aktivitas-aktivitas ekstraktif yang terjadi di kawasan karst Maros Pangkep, terutama di Rammang-rammang.

"Masyarakat meminta dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan tentang karst rammang-rammang. Bagaimanapun, mereka adalah masyarakat setempat yang akan merasakan langsung dampaknya jika terjadi eksploitasi berlebihan di sana," ungkapnya.

Iwan sadar, ada sebagian masyarakat yang tidak sependapat dengan idealismenya menjaga keutuhan karst. Alasan utamanya adalah persoalan ekonomi. Karena itu, ia berprinsip selalu bersama masyarakat atau bekerja kolektif setiap kali melakukan kegiatan di wilayah itu. Iwan juga selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintah, seperti yang sudah berjalan selama ini. ❑

MBO

Boikot, Banyak Cara Mendukung Palestina Merdeka

Peperangan antara Palestina dan Israel entah kapan berakhir. Dengan peralatan dan jumlah personil Palestina (Hamas) jauh kecil dibanding Israel, pejuang Palestina tak kenal menyerah untuk memerdekakan diri. Perlu dukungan dari pihak lain agar perjuangan tidak hanya lewat pertempuran, tapi cara lain adalah dengan cara melakukan boikot terhadap produk Israel. Hal demikian disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagaimana pendapat wakil rakyat soal boikot produk Israel?

Syahrul Aidi Maazat, Anggota MPR Fraksi PKS

Berbagai Cara Kita Lakukan Untuk Palestina Merdeka

BAHWA sesungguhnya yang terjadi di Palestina itu bukanlah konflik, namun yang terjadi adalah penjajahan. Kalau konflik nanti ya semacam tak ada yang benar dan yang salah. Kalau dalam paradigma yang dibangun oleh negara kita melalui UUD NRI Tahun 1945 dan diucapkan Presiden Soekarno, selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya maka selama itu pula kita menolak dan menentang penjajahan Israel atas Palestina.

Konflik itu terjadi bukan antara Hamas dan Israel, karena Hamas di Tepi Barat ada, bukan saja di jalur Gaza. Di Tepi Barat berapa orang-orang Palestina mati, adakah kebebasan bagi rakyat Palestina di sana? Tidak ada, hak mereka tidak ada. Memang mereka bisa makan, minum, dan segala macam tetapi untuk ibadah, aktivitas mereka diperiksa. Dalam jangka 7 tahun terakhir, lebih 10.000 orang di Tepi Barat mati ditembak. Kita saksikan ada perempuan sudah menyerah dan bertekuk lutut di tempat, bagaimana perlakuan orang-orang Israel di Jerussalem. Cerita miris itu bukan hanya pengakuan dan ungkapan orang Palestina saja, namun oleh orang Israel sendiri yang sekarang tinggal di Amerika.

Ini adalah penjajahan. Hamas adalah pejuang. Sekarang dibangun opini oleh Amerika, Israel, dan Barat bahwa Hamas adalah teroris dan dipaksa negara-negara yang memang punya ketergantungan kepada

Syahrul Aidi Maazat FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Amerika untuk mengatakan, itu adalah teroris. Propaganda yang demikian sampai Arab Saudi pun mengiyakan.

Politik Arab Saudi sekarang berbeda dengan kepemimpinan yang dulu-dulu. Seperti Raja Faisal dulu tidak memandang pejuang Palestina itu sebagai teroris, tetapi itu adalah pejuang. Perang Palestina – Israel bukan hanya perang secara fisik, tai juga perang pemikiran karena memutarbalikkan fakta yang luar biasa, terang benderang. Untunglah sekarang ini media tidak seperti dulu karena ada media sosial menunjukkan fakta-fakta yang bisa mengungkap hal lain.

Kalau tema kita masalah boikot, hal demikian salah satu usaha masyarakat, tapi kalau pemerintah memang secara terbuka mungkin tidak akan melakukan hal itu. Boikot itu sah-sah saja, karena memang dari berbagai upaya perlu kita lakukan, dan kalau sebuah produk yang memang nyata-nyata menyatakan memberikan sekian persen hasilnya untuk Israel, itu memang harus kita boikot.

Apalagi itu didukung oleh Fatwa MUI. Memang akan ada resiko dan segala macam. Kita tidak berbicara muslim atau non-muslim, namun bicara sebagai rakyat Indonesia yang pegangan kita dalam bersikap untuk kebijakan politik luar negeri adalah UUD NRI Tahun 1945. ❑

AWG

Dave Akbarshah Laksono, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Perlu Dibuka Komnunikasi Agar Ada Solusi

SITUASI konflik antara Palestina dan Israel bukan persoalan sekali dua kali, sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, namun sudah lintas generasi dan juga sudah berumur ratusan tahun. Masalah ini sekarang lebih kompleks dan rumit karena melibatkan sejumlah negara adi daya.

Presiden Indonesia Joko Widodo juga sudah menyampaikan permasalahan ini dalam Pertemuan OKI di Riyadh, Arab Saudi. Joko Widodo juga sudah menyampaikan ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden rupanya bergeming, tetap mendukung eksistensi Israel, dan juga tidak akan mengizinkan ataupun membiarkan sampai terjadinya gencatan senjata.

Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong solusi-solusi yang bisa dilakukan secara permanen. Kalau kita lihat sejumlah proses perdamaian yang dilakukan, seperti Perjanjian Oslo Tahun 1993 antara Pemimpin PLO Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, setiap kali ada konflik ya hilang kembali, ada fakta lagi dan ada konflik maka hilang lagi.

Selama pertempuran masih digunakan oleh kekuatan-kekuatan luar maka pertempuran itu akan semakin memperumit. Nah, sekarang posisi Indonesia saja yang harus dipertegas, baik secara multilateral maupun unilateral dengan negara-negara Barat.

Dave Akbarshah Laksono

Bagaimanapun Israel adalah sekutunya negara Barat, hanya negara kecil di antara wilayah Timur Tengah yang begitu luas namun dukungan negara Barat sangat besar. Untuk itu kita akan terus mendorong agar ada titik temu perdamaian dari kedua belah pihak. Bila memungkinkan ada solusi yang bisa ditengahi oleh Indonesia.

Sama seperti kita juga mendorong untuk adanya titik perdamaian Ukraina – Rusia. Joko Widodo sampai turun langsung untuk berbicara. Memang, semua proses yang tidak mudah tetapi di sini kita harus memainkan peran kita untuk bisa terjadi komunikasi.

Sekali lagi bagaimana kita bisa membuka saluran komunikasi karena seberapa rumitnya persoalan, seberapa kompleksnya situasi, bilamana tidak ada komunikasi tidak ada saluran untuk berbicara ya pasti tidak akan ada titik temu. Jadi, yang pasti itu kita harus mendorong agar terjadinya komunikasi sehingga solusi apapun yang bisa kita ciptakan ataupun yang kita dorong itu bisa kita kedepankan. ❑

AWG

Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

Saya Punya Dua Perempuan *Hebat*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEPERTI kata pepatah, air tenang menghanyutkan. Setidaknya, begitulah gambaran sosok seorang Dr. Almuzzammil Yusuf, M.Si., (68), Wakil Ketua Fraksi PKS MPR RI, yang saat ini juga memegang amanah sebagai Co-Captain Timnas AMIN pada kontestasi Pemilihan Umum 2024 pada 14 Februari 2024.

Dalam pergaulannya, ayah enam anak dan kakek dari delapan cucu ini adalah sosok yang bersahaja. Itu bisa dilihat, salah satunya, dari cara berpakaian, tampil wajar dan tak berlebihan. Selain sederhana, Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2005-2007 dan 2012-2014 ini juga dikenal murah senyum. Selain itu, Almuzzammil adalah sosok yang jauh dari kontroversi, tidak banyak bicara, apalagi yang sampai terlihat emosional.

Di ranah politik, nama Almuzzammil nyaris tak pernah diterpa kabar miring. Keengganannya berpolemik adalah salah satu alasan pria kelahiran Tanjung Karang, 6 Juni 1965, ini jarang dikejar para wartawan, pun demikian dengan para netizen. Praktis, semua pekerjaannya rampung dalam kesenyapan, tidak hura-hura, apalagi huru hara.

Tetapi, di balik kurang populerannya itu, Almuzammil adalah satu dari sedikit politisi pilih tanding yang sudah bercokol di Senayan hingga empat periode. Sebutan itu, bukan sekedar sematan tanpa alasan, tetapi Muzammil memang memiliki deretan panjang prestasi politik yang jarang dimiliki sejawatnya, baik sebagai salah satu tokoh di Partai Keadilan Sejahtera maupun politisi Senayan.

“Dalam hidup saya, saya bersyukur memiliki dua perempuan yang luar biasa, yaitu: Ibu dan istri saya, keduanya adalah perempuan hebat yang selalu mendukung, tanpa pernah meminta dan menuntut apapun,” ungkap Almuzzammil kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Sang ibu, Ratna Riana, senantiasa berpesan agar Muzzammil menjaga nama baik keluarga. Sang ibu tidak pernah meminta, apalagi menuntut barang-barang kemewahan, seperti mobil, rumah, uang ataupun kesenangan lainnya. Padahal, jasa sang ibu sangat besar,

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW.

Ibu Ratna Riana tidak hanya melahirkan, menyusui dan membesarkan, tetapi juga seorang ibu yang tak pernah putus mendoakan anaknya, Almuzzammil. Jadi, kata Muzzammil, orang yang tidak meminta dan menuntut materi apapun pada dirinya adalah orang yang paling berjasa, yaitu ibunya.

Sedangkan istrinya, Nurul Hidayati K. Ubaya, SS., MBA., adalah sosok yang ikhlas menerima setiap pemberian maupun ucapan suaminya. Seperti ibu mertua, sang istri tidak pernah menuntut apapun, sejak sebelum maupun selama Almuzzammil menjadi anggota dewan. Sang istri, seolah menjadi bayang-bayang dari kebaikan ibunya dan itu diikuti anak-anaknya

"Kalau banyak suami sibuk memenuhi tuntutan istrinya, saya tidak mendapat tuntutan apapun, sebagaimana ibu saya, dan itu sangat meringankan. Dan, karena istri saya juga begitu, anakpun meniru tidak pernah menuntut apapun. Jadi, alhamdulillah saya diringankan oleh Allah, inilah yang namanya takdir," kata Muzzammil.

Sementara yang sering membuatnya repot, menurut Almuzzammil, malah orang lain. Bukan saudara sekandung maupun saudara jauh. Dan, itu membuatnya merasa tidak penting untuk selalu diurusi.

Partai Kader

Meski hari-hari Almuzzammil membersamai tim nasional pemenangan Anies-Muhaimin dalam kontestasi pemilu terus disorot kamera, tetapi baginya mengurus partai lebih berat. Padahal, Almuzzammil sendiri sudah terlibat dalam Timnas sejak lebih dari setahun silam. Namun, baginya itu belum sebanding dengan kesakitan selama mengurus partai. Sebab, mengurus partai jauh lebih rumit dan harus terus-menerus dirawat, terbukti pekerjaan mengurus partai sudah dijalaninya sejak lama, hampir 24 tahun,

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tetapi kapan akan berakhir, ia tidak pernah tahu.

"PKS itu Partai Kader, jadi praktis kita tdak pernah berhenti bekerja. Mulai dari menghimpun, mengembangkan potensi, hingga menyiapkan mereka untuk meneruskan estafet perjuangan. Semua dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu lama," kata Muzzammil menambahkan.

Sebagai Anggota Komisi I DPR RI, menyikapi dinamika munculnya pro kontra terhadap dukungan kepada perjuangan Palestina, Almuzzammil berpendapat, besar kecilnya dinamika tersebut, tak lepas dari keberadaan media sosial. Dulu, orang harus diwawancara dahulu agar viral, sekarang melalui medsos orang sudah bisa membuat dirinya sendiri menjadi viral, dan itu bisa dilakukan dengan sangat mudah.

Karena itu, Ia tak ambil pusing dengan munculnya sebagian kecil fihak yang menentang bantuan bangsa dan negara Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina.. Yang penting, masyarakat dan negara tetap memegang konstitusi, bahkan sejak zaman Bung Karno, bangsa Indonesia sudah menuntut Palestina merdeka.

"Kita belum bisa membayar jasa Palestina kepada Indonesia, selama mereka masih terjajah oleh Israel. Palestina adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan kita, setelah Mesir dan itu membuat kemerdekaan kita diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia," tegas Muzzammil.

Striker U-16

Kalau sekarang, sulung sembilan bersaudara pasangan Muhammad Yusuf Jaiz dan Ratna Riana berkarier di Senayan, sesungguhnya capaian tersebut tidak mengagetkan. Karena sejak remaja Muzzammil sudah bercita-cita untuk berkarier di Senayan sebagai pemain bola. Maklum, saat itu pada 1981, Muzzammil sudah tercatat sebagai striker Timnas U-16. Untuk sampai di posisi tersebut, tim yang dibelanya, yaitu U-16 DKI Jakarta di final mengalahkan U-16 Jawa Barat.

Karena kemenangan tersebut, Muzzammil sempat bermain ke luar negeri, di beberapa negara. Namun, perjalanan hidupnya berkata lain, pada saat semestinya ia membela Timnas U-17 tahun 1982 Muzzammil memilih tidak berangkat ke Singapura, tetapi malah ikut kegiatan rohis pada peringatan Hari Qurban.

"Saat itu saya sudah tertarik ikut kegiatan rohis, dan meninggalkan bola. Padahal, posisi saya di team cukup strategis. Bahkan, beberapa teman seangkatan saya, dikemudian hari menjadi pemain bola nasional. Antara lain Wahyu Tanoto, Iswadi Idris dan Berti Tutuarima. Meski meninggalkan bola, demi rohis, akhirnya saya tetap berkarier di Senayan, meski bukan sebagai pemain bola, melainkan anggota dewan," ungkapnya.

Dalam upayanya agar kembali terpilih menjadi anggota legislatif ke lima kali secara berturut-turut, Almuzzammil mengakui usahanya tidak seberat dulu saat pertama menjadi caleg. Ketika itu, dia nyaris tidak memiliki modal untuk maju menjadi caleg. Satu-satunya modal yang dipunyai adalah nama besar ayahnya, seorang aktivis yang disegani baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Pencalegan pertama, saya diuntungkan oleh nama besar Bapak, sehingga mudah diterima di semua golongan. Kalau sekarang, insya Allah lebih ringan, karena semua potensi, mulai dari dana reses sampai kunjungan dapil sudah saya salurkan tanpa kurang sepeserpun. Teorinya, orang-orang lama sudah dikenal dan mudah diterima oleh masyarakat," tambahnya.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Di luar kerja-kerja politik yang dilakukan selama 20 tahun, Muzzammil juga dikenal oleh masyarakat berkat kerja-kerja nyata yang dilakukan selama ini. Antara lain, dalam 20 tahun terakhir, sekitar 80 masjid dan musala didirikan. Pendirian tempat ibadah itu tak lepas dari kedekatannya dengan pimpinan Yayasan Bulan Sabit Merah, Hilal Akhmar, dari Abu Dhabi, yang terus mendukung bantuan dana pembangunan masjid dan musala.

Selain itu, Almuzzamil juga mendirikan dua stadion futsal yang bisa digunakan masyarakat secara cuma-cuma. Bukan hanya berolahraga, stadion tersebut juga bisa dipakai untuk acara pertemuan, juga pernikahan, yang semuanya dikelola masyarakat. ❑

MBO

Biodata

Nama Lengkap : **Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M. Si**
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang, 6 Juni 1965
Istri : Nurul Hidayati K Ubaya, SS., MBA., dengan 6 anak, 8 cucu

Pendidikan:

- S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia
- S2 Ilmu Komunikasi Politik Univ. Sahid
- S3 Ilmu Komunikasi Politik Univ. Sahid
- International Relation (second certificate) CAS-Islamabad, Pakistan
- Pendidikan Bahasa Inggris di Sidney, Australia
- Pendidikan Bahasa Arab di Kairo Mesir

Riwayat Pekerjaan:

- Anggota MPR/DPR 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024
- Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2005-2007, 2012-2014
- Wakil Ketua Baleg DPR RI 2007-2009
- Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2015-2017
- Wakil Ketua Fraksi PKS MPR RI 2014-2019, 2019-2024
- Tim Sosialisasi Empat Pilar MPR RI 2004-sekarang

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di BINUS

Bamsoet Dorong Penguatan Sistem Hukum Nasional

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Dosen Tetap Universitas Borobudur dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menekankan pentingnya penataan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, terkadang putusan yang diambil oleh satu hakim dengan hakim lainnya bisa berbeda, padahal objek yang diadilinya sama. Hakim dan sistem peradilan harus memiliki kode etik dengan aturan yang jelas dan bisa ditegakkan, sehingga baik hakim maupun rakyat bisa tahu kapan ada perilaku yang melanggar batas.

"Hakim dan peradilan harusnya memiliki standar etika tertinggi, bukan justru memiliki standar etika terendah. Terlebih seiring proses pematangan kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya diperlakukan sebagai sebuah prosedur yang harus ditaati, melainkan juga harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga hukum yang seharusnya mengayomi dan memberikan rasa aman, tidak justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Simposium Hukum Nasional, di Binus University, Jakarta, Selasa (14/11/23).

Turut hadir, antara lain Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Nusantara, Nofel Saleh Hilabi, dan Kepala Jurusan Business Law Binus University, Ahmad Sofian. Para pembicara lainnya, antara lain Fahri Bachmid, Marjan Miharja, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, dan Abd. R.Rorano S. Abubakar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setelah sekitar 104 tahun menggunakan KUHP warisan produk Belanda yang dimulai pada tahun 1918, melintasi 7 periode kepemimpinan Presiden Indonesia dan 14 periode DPR RI, akhirnya Indonesia bisa memiliki UU KUHP yang dihasilkan sendiri oleh anak bangsa. Kehadirannya turut memperkuat sistem hukum nasional.

"Saat saya memimpin DPR RI di periode 2018-2019, pembahasan RUU KUHP sudah hampir selesai. Namun, karena waktu periode DPR RI sudah hampir berakhir, akhirnya pembahasan tersebut di take over dan dilanjutkan oleh DPR RI periode 2019-2024. Dalam setiap pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI senantiasa mengedepankan prinsip transparan, teliti, dan partisipatif. Sehingga sudah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan publik," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum

UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, penguatan sistem hukum nasional harus menjadi pilar pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam visi Indonesia 2045 menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Mimpi yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya aparatur penegak hukum yang berintegritas, serta penyelenggara negara dan warga negara yang taat hukum.

"Secara filosofis, penegakan hukum yang berkeadilan juga harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila kedua Pancasila, yaitu: 'Kemanusiaan yang adil dan beradab,' yang menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Serta sila kelima, yaitu: 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama DPD Partai Golkar Kebumen

Bamsoet Ajak Hindari Konflik Horisontal Jelang Pemilu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen, Bambang Soesatyo, mengingatkan, salah satu tantangan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini berupa potensi konflik horisontal di tengah kontestasi politik. Sejarah mencatat pada setiap penyelenggaraan Pemilu selalu meninggalkan residu persoalan. Karenanya, menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak tahun 2024, harus dihindari paradigma klise, di mana kontestasi politik menjadi pemantik lahirnya konflik horisontal.

"Kontestasi politik tidak boleh memicu polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Kita harus bercermin dari pengalaman sejarah, bahwa konflik yang terlahir dari kontestasi politik, seringkali meninggalkan trauma dan bekas luka yang lama sembuhnya," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kamis (16/11/23).

Hadir, antara lain Deputi Sekjen Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI Hentoro Cahyono, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, serta para fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Kebumen.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, dalam konsepsi negara demokrasi, Pemilu harus dimaknai sebagai ajang adu gagasan, dan momentum untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Artinya, Pemilu tidak seharusnya melahirkan percikan-percikan konflik, apalagi sampai mengorbankan ikatan soliditas kebangsaan di antara sesama anak bangsa.

"Tentunya, kita mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, dapat mengawal proses Pemilu yang jujur, adil, damai, berkualitas, dan yang tidak kalah pentingnya, juga bermartabat. Pada akhirnya nanti, siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, adil dan makmur," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, bangsa Indonesia juga tengah menghadapi ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi politik global. IMF memperkirakan sepertiga ekonomi dunia akan mengalami penyusutan. Bank Dunia memprediksi terjadinya resesi ekonomi global.

Kondisi ini diperburuk oleh belum kondusifnya iklim geo politik global yang masih dijejali oleh perang Rusia-Ukraina,

eskalasi ketegangan Cina-Taiwan, potensi konflik di Semenanjung Korea, memburuknya hubungan Turki dan Yunani, ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan, dan saat ini diperburuk oleh agresi militer Israel ke Palestina.

"Di sisi lain, hegemoni ekonomi politik oleh negara-negara juga menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi negara seperti Indonesia. Dengan kekayaan sumberdaya yang kita miliki, letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudera yang perairannya dilintasi 40% jalur perdagangan laut dunia, menempatkan kita sebagai "center of gravity" dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rentan terhadap pengaruh dan infiltrasi asing, serta ancaman keamanan maritim," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama DPD Partai Golkar Banjarnegara

Bamsoet Dorong Penguatan Ideologi Pancasila dan Cegah Politik Pecah Belah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen, Bambang Soesatyo, mengingatkan, agar memasuki tahun politik ini, kita semua mampu menahan diri agar tidak terjebak ke dalam politik pecah belah sekaligus mengaku prihatin atas melemahnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Merujuk pada hasil survei yang dirilis tanggal 17 Mei 2023, Setara Institute dan INFID (Forum on Indonesian Development) mengungkapkan bahwa 83,3% pelajar SMA berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen atau dapat digantikan.

Hasil survei ini harus disikapi dengan serius. Terlebih, temuan ini kontras dengan hasil beberapa survei sebelumnya, meskipun dengan sampel responden yang berbeda. Misalnya survei SMRC pada bulan Juni 2022 yang menyatakan, 82% masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah. Selanjutnya, hasil survei Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dan Litbang KOMPAS pada bulan Januari 2023 mengungkap bahwa 86,1% mahasiswa tidak setuju jika Pancasila diganti.

"Fenomena tersebut mengisyaratkan setidaknya dua hal penting. Pertama, bahwa proses internalisasi Pancasila belum sepenuhnya menjangkau generasi muda bangsa, khususnya kalangan pelajar SMA. Kedua, bahwa persepsi dan sikap generasi muda terhadap ideologi negara bersifat dinamis, sehingga perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, Jumat (17/11/23).

Hadir, antara lain Deputi Sekjen Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI Hentoro Cahyono, Badan Kesbangpol Banjarnegara Erwan Adi Priyanto, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, serta para fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, persoalan lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah demoralisasi generasi muda bangsa. Ini tergambar dari maraknya keterlibatan generasi muda dalam berbagai aksi kriminalitas, anarkisme, dan vandalisme, perilaku seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. BNN (Badan Narkotika Nasional) mencatat, selama periode 2022-2023 saja, ada sekitar 4,8 juta penduduk usia produktif tercatat sebagai pengguna narkoba.

'Terkait dengan fenomena demoralisasi tersebut, kita juga merasakan mulai memudarnya identitas dan jati diri ke-Indonesiaan, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti sopan santun, keberadaban sikap dan perilaku, mulai tergerus dan terpinggirkan oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, salah satu upaya menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai

bidang, khususnya pendidikan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan Pancasila.

"Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai. Bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Tetapi juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada setiap diri orang Indonesia," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Purbalingga

Bamsoet Ajak Kader Partai Golkar Terapkan Ekonomi Pancasila

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo, mengingatkan masih adanya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat Indonesia. Hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,36%%. Artinya, masih ada sekitar 25,9 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Angka tersebut sebenarnya lebih kecil dibandingkan angka kemiskinan pada September 2022, sebesar 9,57% atau 26,36 juta orang. Meskipun demikian, angka ini tidak lebih baik dari catatan pada periode sebelum pandemic, yakni sebesar 9,22%. Artinya,, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu memulihkan kondisi perekonomian nasional," ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/23).

Hadir dalam acara tersebut wakil ketua DPRD sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga Tenny Juliawaty, Kepala Kesbangpol Purbalingga Pandi, Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga, dari Polres, Kejari serta para fungsionaris Partai Golkar Purbalingga.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, penurunan angka kemiskinan tersebut juga tidak diimbangi oleh penurunan angka ketimpangan distribusi pendapatan atau rasio gini sebesar 0,388. Angka ini meningkat dari bulan September 2022 yang tercatat sebesar 0,381, dan semakin menjauh dari target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 sebesar 0,374.

Sebagai data pembanding, World In-equality Report tahun 2022 mencatat bahwa meskipun tingkat kekayaan masyarakat In-

donesia meningkat signifikan sejak tahun 1999, namun tingkat ketimpangan kekayaan masih cenderung stagnan. Rasio kesenjangan pendapatan pada tahun 2021 berada di level 1 banding 19. Artinya, jumlah penduduk terkaya memiliki pendapatan rata-rata 19 kali lipat lebih tinggi dari jumlah penduduk termiskin.

"Kesenjangan ekonomi ini tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena, jika merujuk pada survei Litbang KOMPAS, bahwa 19,2% terjadinya aksi radikalisme di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi, bangsa Indonesia sudah sepatutnya mengingat landasan paling fundamental dari konsep bela negara, yaitu perasaan senasib sepenanggungan yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan.

"Tidak hanya itu, ada pula keberadaan sistem ekonomi Pancasila yang dapat diterapkan sebagai sebuah sistem yang khas dan asli. Tidak "latah" mengikuti salah satu dari dua kutub besar perekonomian global di antara kapitalisme atau sosialisme," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sistem perekonomian yang merujuk Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan secara yuridis konstitusional telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial akan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

"Pemulihan perekonomian dapat ditekankan pada peningkatan ekonomi sektor riil, seperti memberikan kemudahan permodalan dan stimulus bagi pertumbuhan dunia usaha secara adil, baik bagi pelaku usaha kecil maupun besar. Secara garis besar, pemulihan perekonomian berdasarkan sistem ekonomi Pancasila diupayakan melalui langkah-langkah strategis yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama FORHATI Nasional

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Perempuan di Politik

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, perempuan memiliki peran penting dalam Pemilu 2024. Dari daftar 204,81 juta jiwa pemilih tetap yang ditetapkan KPU, sebanyak 102,58 juta atau lebih dari 50% adalah pemilih perempuan. Menandakan bahwa masa depan bangsa, tergantung ke arah mana suara para perempuannya.

Bangsa Indonesia juga patut bangga terhadap peran politik perempuan Indonesia yang cukup maju, bahkan jika dibandingkan Amerika Serikat (AS). Terlihat dari Amandemen Kesetaraan Hak (Equal Rights Amendment) untuk mengesahkan prinsip kesetaraan gender, termasuk hak perempuan dalam Konstitusi AS, mengalami

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

stagnasi selama puluhan tahun. Sejak diusulkan pertama kali pada tahun 1920-an, dan diberi tenggat waktu ratifikasi hingga tahun 1982, hingga kini usulan amandemen tersebut masih terkendala. Indonesia bahkan sudah memiliki Presiden perempuan, yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Serta Ketua DPR RI perempuan, yakni Ibu Puan Maharani.

"Persentase jumlah menteri perempuan dalam setiap kabinet pemerintahan pasca reformasi, juga terus meningkat dan menjadi yang terbesar di dunia. Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie (1998-1999), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), dan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), masing-masing rata-rata memiliki dua menteri perempuan. Di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada empat menteri perempuan (2004-2009) dan lima menteri perempuan (2009-2014), Presiden Joko Widodo ada sembilan menteri perempuan (2014-2019), dan lima menteri perempuan (2019-2024)," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Nasional, di MPR RI, Jakarta, Ahad (19/11/23).

Turut hadir, antara lain Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Ulla Nuchrawati, dan Koordinator Presidium FORHATI Nasional Cut Emma Mutia Ratna Dewi. Hadir pula anggota Presidium FORHATI Nasional Wa Ode Nurhayati, Jamilah Abdul Gani, Anita Aryani, dan Sri Novakandi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks pemberdayaan gender Indonesia juga terus menguat. Tahun 2022, indeks pemberdayaan gender mencapai skor 76,59 atau masuk kategori tinggi.

"Artinya, secara umum ada peningkatan dari aspek keterlibatan perempuan dalam parlemen yang telah mencapai 21,9%, peningkatan partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional yang hampir mencapai 50% dan peningkatan kontribusi pendapatan perempuan yang mencapai 37,22%. Meskipun keterlibatan perempuan di parlemen sudah meningkat hingga mencapai 21,9%, namun masih belum optimal memenuhi kuota 30% yang disediakan bagi keterwakilan perempuan di parlemen," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengungkapkan "wajah" perempuan Indonesia saat ini, dilihat dari berbagai perspektif dan data statistik, utamanya dikaitkan dengan isu kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Dari perspektif komposisi demografi, berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, persentase penduduk laki-laki mencapai 50,6%, hampir sama banyaknya dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 49,4%.

"Laporan Indeks Kesenjangan Gender Global (Global Gender Gap Report 2023) tahun 2023 yang dirilis World Economic Forum (WEF), Indonesia memiliki skor sebesar 0,697 poin. Meskipun skor indeks tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, namun dari peringkat, capaian tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 87 dari 146 negara, atau naik 5 peringkat dari capaian tahun 2022," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama FKPPAL

Bamsoet Tekankan Pentingnya Netralitas TNI dalam Pemilu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya setiap personil TNI untuk menjaga netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang semakin menghangat. Seluruh keluarga personil TNI juga wajib menjaga kondusivitas bangsa, agar jangan sampai Pemilu 2024 berujung dengan perpecahan.

Sebagai warga kehormatan TNI AL dan juga penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir TNI AL serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam TNI AL dan Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, Bamsoet mengapresiasi kontribusi personil TNI AL, khususnya Korps Marinir, dengan julukan "Hantu Laut" Baret Ungu, yang selalu berhasil meredakan kerusuhan dan menenangkan massa demonstrasi di penghujung aksi. Tanpa pukulan, tanpa tendangan, massa rusuh bisa bubar, dengan melakukan pendekatan yang humanis dan persuasif untuk menciptakan kondusivitas.

"Kita tentu berharap jangan sampai sebelum maupun sesudah penyelengggaraan Pemilu 2024 terjadi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi rusuh. Hak masyarakat untuk menyatakan pendapat memang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi permusuhan. Jika sampai ada potensi rusuh, saya yakin dan percaya keluarga besar TNI AL diminta atau tidak diminta, pasti siap membantu aparatur kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPP Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (DPP FKPPAL), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Ahad (19/11/23).

Turut hadir, antara lain KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Markos, Ketua Umum DPP FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan Ketua Panitia/Ketua DPD FKPPAL Jakarta Metro Tommy Hutapea.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain dengan FKPPAL, MPR RI juga telah bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun penerimaan aspirasi dengan keluarga besar TNI lainnya. Antara lain dengan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Perhimpunan Putra dan Putri TNI Angkatan Udara (P3AU), serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

"Dalam berbagai kesempatan tersebut, saya senantiasa mengajak kepada keluarga besar TNI untuk menjaga dan menghormati konstitusi yang ada pada saat ini. Tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Kendati banyak pihak menilai konstitusi yang ada saat ini telah mengalami banyak perubahan bahkan jauh dari pemikiran para Bapak pendiri bangsa, namun pada hakikatnya, konstitusi yang ada pada saat ini merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa. Dalam setiap perubahannya, sudah dilakukan secara konstitusional. Apabila dirasa masih ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan secara menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 sebelum amandanen pasca reformasi, ada mekanisme konstitusional yang tersedia dalam konstitusi kita, yaitu mekanisme amandemen," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar telah menempatkan Indonesia pada pusaran kepentingan global. Pada saat yang bersamaan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, patriotisme dan nasionalisme tidak lagi dimaknai secara sempit.

Di tengah modernitas zaman yang ditandai lompatan kemajuan teknologi dan derasnya arus peradaban, tantangan yang dihadapi dapat mewujud pada beragam paradigma. Misalnya, pada degradasi moral generasi muda bangsa, maraknya perilaku koruptif, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, serta terpinggirkannya ideologi bangsa.

"Di tengah kemajuan teknologi, dunia saat ini juga sudah memasuki era Internet of Military Things/Internet of Battle-field Things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal. Sebagaimana terlihat dalam perang Rusia - Ukraina, maupun perang Hamas - Israel," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, serta Dosen Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menambahkan, Internet of Military Things juga menunjukkan bahwa dunia semakin larut menghadapi perang Generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada Data dan Informasi. Setelah sebelumnya dunia mengalami perang G-I, yang dilakukan dengan Padat Manusia, G-II Manuver dan Tembakan, G-III Padat Teknologi, dan G-IV Asimetris. Pada G-1 hingga G-III, sasarannya pada sektor Militer, Fisik, dan Ekonomi. Pada G-IV sasarannya sektor politik. Sedangkan G-V pada sosial dan ideologi.

"Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan Tiongkok merupakan contoh negara yang telah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personil. Indonesia tak boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan Angkatan ke-IV, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI, menjadi keniscayaan. Sehingga bisa memperkuat Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara AU)," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Kudus

Lestari Moerdijat: Peran Generasi Muda dalam Mengimplementasikan Nilai Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BUTUH transformasi yang terus-menerus untuk mengimplementasikan setiap nilai kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan dan memperkokoh persatuan Indonesia. Peran generasi muda sangat penting dalam menumbuhkan nasionalisme yang kuat di tanah air.

"Kesadaran akan keberagamaan sesungguhnya adalah dasar yang menggelorakan semangat nasionalisme ketika sekelompok pemuda di masa lalu bersama menggaungkan Sumpah Pemuda dan berjuang untuk merebut kemerdekaan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ruang Serbaguna Universitas Muhammadiyah Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (16/11).

Hadir pada kesempatan itu, antara lain Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes., (Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus), Noor Hidayah, M. Kes., (Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kudus), para Dekan, Kepala Program Studi, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kudus.

Menurut Lestari, sesungguhnya sejak zaman dahulu kesadaran akan keberagaman ini telah ada, karena itu kita mengenal semboyan yang sampai hari ini kita pegang, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, ketika Islam masuk di Pulau Jawa sekitar abad ke-11, Sunan Kudus membawa ajaran Islam dengan tetap bersikap toleran terhadap ajaran dan kepercayaan masyarakat terdahulu.

Sikap itu, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, terlihat dari arsitektur Masjid Menara Kudus yang masih mempertahankan arsitektur di masa Hindu dan budaya tidak memotong dan memakan daging sapi.

Toleransi yang diterapkan tersebut, ujar Rerie, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat demi mewujudkan persatuan.

Modal dasar kesadaran akan keberagaman itu, menurut Rerie, sangat penting dalam menyikapi berbagai perubahan di sejumlah sektor kehidupan di era globalisasi saat ini.

Penguatan pemahaman dan pelaksanaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), tambah dia, harus konsisten dilakukan.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, peran generasi muda dalam menggali dan merefleksikan setiap nilai kebangsaan itu dalam perilaku keseharian sangat penting dalam proses pembangunan.

Rerie meyakini dengan berbekal semangat, idealisme dan kreativitas yang dimiliki, para pemuda mampu melestarikan dan mengamalkan nilai kebangsaan warisan para pendiri bangsa ini. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR di UNG

Fadel Muhammad: Sosialisasi Mengingatkan Kesepakatan para Pendiri Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menegaskan, Sosialisasi Empat Pilar MPR tidak dimaksudkan untuk menggurui, apalagi terhadap para dosen dan mahasiswa. Tetapi, sosialisasi diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat, terkait keputusan para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Apalagi, oleh undang-undang tentang MD3, ditegaskan bahwa salah satu tugas MPR adalah memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, MPR diharuskan senantiasa berkontribusi turut memperkuat pondasi bangsa. Dan. tugas tersebut diamanatkan kepada MPR RI, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dengan sosialisasi Empat Pilar diharapkan bisa menjadi pemahaman bagi semua untuk menjaga Indonesia. Terlebih bagi generasi muda yang tidak sempat mendapatkan muatan pendidikan Pancasila, paska reformasi," kata Fadel.

Pernyataan itu disampaikan Fadel Muhammad saat menjadi nara sumber kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Senin (20/11/2023). Diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Gerakan Muda Marhaenis, acara sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Rektor I Prof. Dr. Abdul Hafids Olii, S.Pi., M.Si., juga Kepala Perpustakaan UNG Dr. Ismet Sulila, SE., M.Si., serta istri wakil Ketua MPR Hana Hasanah, dan para mahasiswa sebagai peserta.

Pada kesempatan itu, Fadel menggunakan kesempatan untuk mengajak civitas academika UNG turut menjaga dan merawat sistem demokrasi yang berlangsung di Idonesia. Karena, hanya dengan demokrasi yang baik, pemilihan umum, baik eksekutif maupun legislatif, akan terselenggara dengan baik pula.

"Jangan sia-siakan Pemilu 14 Februari 2024, pilih para calon terbaik, agar bisa dipastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," ungkapnya.

Sebelum mengakhiri ceramah, Fadel mengajak para mahasiswa meningkatkan kapabilitasnya melalui pendidikan yang baik. Jangan sampai, masa muda lewat begitu saja tanpa belajar dan meningkatkan kemampuan diri sendiri.

"Kalau kita memiliki kemampuan yang baik, niscaya peluang dan kesempatanlah yang mencari kita, bukan sebaliknya. Setelah itu, kita butuh strategi untuk memilih apakah mengambil atau meninggalkan kesempatan yang kita punya. Akankah kita menjadi pegawai atau memilih jalur entrepreneur, tergantung jaringan yang dimiliki," pungkas Fadel. ❑

Sosialisasi Bersama Unsur Pemuda Jateng

Lestari Moerdijat: Perbaikan Kualitas Demokrasi Harus Konsisten

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERBAIKAN kualitas demokrasi harus konsisten dilakukan demi terwujudnya proses pembangunan yang berkeadilan dan menghasilkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegaduhan yang terjadi menjelang kontestasi pada tahun politik mendatang harus disikapi dengan bijaksana melalui pelaksanaan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis dan berkeadilan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/11), di depan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah dan Garda Pemuda NasDem serta komunitas pemuda di Jawa Tengah.

Menurut Lestari, semua pihak, termasuk para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar mengedepankan upaya agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan sejuk dan damai, sehingga bisa melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa saat ini dan di masa datang.

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, Pemilu 2024 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia karena diperkirakan 200 juta orang lebih ikut pesta demokrasi itu. Sehingga, ujar Rerie, peran masyarakat dan partai politik juga sangat penting dalam mewujudkan proses kontestasi yang berlangsung jujur dan adil.

Pada situasi itu, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, setiap anak bangsa harus mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus bangsa, yaitu: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD NRI Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan warisan pendiri negeri.

Mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan, ujar Rerie yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah salah satu nilai kebangsaan yang penting dan harus dipahami serta diterapkan di masa kontestasi antarsesama anak bangsa dalam upaya mendapatkan mandat rakyat Indonesia.

Rerie berharap, semua pihak, setiap anak bangsa bersama-sama mampu mewujudkan proses pembangunan, termasuk di bidang politik, yang lebih baik demi melahirkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menikmati keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua. ❑

Delegasi SMA Negeri 1 Leuwiliang

Indro Gutomo: Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan Sejak Usia Muda

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBANYAK 414 pelajar SMA Negeri 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (14/11/2023),memenuhi Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kehadiran delegasi yang dipimpin Wakil Kepala SMA Negeri 1 Leuwiliang, Supriatna, S.Pd., di Senayan, Jakarta, ini adalah dalam rangka mengikuti kegiatan 'Kunjungan Delegasi'.

Kehadiran mereka di komplek Parlemen diterima lansung oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR, Indro Gutomo, SH., MH., didampingi Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Dhina Winanda SI.Kom; dan Pustakawan Madya, Yusniar SH.

Dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Dhina Winanda ini, Indro Gutomo mengatakan, kehadiran para pelajar SMA Negeri 1 Leuwiliang ke MPR ini merupakan kebanggaan bagi MPR RI, karena generasi muda merupakan kekuatan bagi berdirinya bangsa dan negara ini. "Kami sangat terbuka bagi generasi muda. Dari merekalah sering kali ide-ide cemerlang muncul," paparnya.

Keterbukaan MPR, menurut Indro. sesuai dengan visinya sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Sebagai Rumah Kebangsaan maka lembaga negara ini terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat. "Seluruh lapisan masyarakat yang hadir di MPR akan kami terima, tak terkecuali generasi muda," tambahnya.

Indro menginformasikan bahwa selama ini MPR kerap dikunjungi oleh mahasiswa, santri, guru, organisasi pemuda, dan berbagai kalangan profesi lainnya. Semua lapisan masyarakat tersebut diterima tanpa dibeda-bedakan. Dalam forum tanya jawab, kata Indro, tak jarang mereka yang datang ke MPR mempunyai pertanyaan yang kritis. "Pertanyaan yang kritis itu wujud dari kepedulian masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya MPR RI," kata Indro .

Dalam kesempatan itu, Indro mengingatkan, pada tahun politis seperti sekarang ini, generasi muda agar tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah. "Generasi muda adalah aset bangsa. Semua kegiatannya harus mengacu pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Pupuklah

nilai persatuan dan kesatuan bangsa sejak dini," ungkapnya.

Selanjutnya, Indro mengingatkan bahwa salah satu tugas MPR RI adalah memasyarakatkan Empat Pilar MPR, khususnya nilai-nilai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. "Sejak muda adik-adik sudah bisa mendukung tugas MPR dengan mengedepankan nilai persatuan," ungkap pria asal Yogyakarta ini.

Lebih lanjut, Indro menjelaskan, saat ini bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 273, 8 juta jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak itu, 60% di antaranya adalah generasi muda. Di tahun 2045, bangsa ini akan memasuki masa Indonesia Emas penuh dengan bonus demografi. Pada masa itu yang akan mengisi pembangunan adalah anak-anak muda saat ini. "Termasuk anak-anak muda lulusan SMA Negeri 1 Leuwiliang", ujarnya.

Menyambut masa Indonesia Emas itu, Indro berharap, agar generasi muda jangan malas belajar. "Mulai saat ini harus semangat belajar. Tidak ada ceritanya generasi muda malas belajar," tandasnya.

Indro juga mengingatkan, generasi muda memegang peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Sejak sebelum kemerdekaan, generasi muda telah berkiprah untuk bangsa Indonesia. Dipaparkannya, pada tahun 1908 muncul Gerakan Budi Utomo yang dipelopori oleh pelajar dari STOVIA yang bernama Soetomo.

Selanjutnya, pada tahun 1928 generasi muda melakukan Kongres II Pemuda yang di mana dalam kongres itu dideklarasikan Sumpah Pemuda. "Tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 1945, 1966, hingga 1998, anak-anak muda Indonesia melakukan perubahan," tuturnya. "Dari rangkaian sejarah yang ada, generasi muda mempunyai peran penting, jadi berbanggalah menjadi generasi muda", tuturnya.

Dalam acara yang sama, Yusniar menjelaskan tentang Perpustakaan MPR. Perpustakaan MPR, menurut Yusniar, memiliki berbagai macam buku. Ada bebentuk cetak, ada pula berbentuk *e-book*. Dia mempersilahkan para pelajar untuk meminjam buku di Perpustakaan MPR. Apalagi, Perpustakaan MPR RI semakin mudah dijangkau dengan adanya aplikasi MPR RI digital library yang dapat diunduh di *playstore.* ❑

Forum Konsultasi Publik di Bali

Siti Fauziah: Masukan dari Mahasiswa dan Pelajar untuk MPR Lebih Baik

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PLT. SESJEN MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kehumasan MPR RI dengan tema: 'Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi dan Media Sosial,' di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/11/2023). Acara ini diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar.

Acara ini diikuti oleh para mahasiswa Unmas lintas fakultas dan perwakilan pelajar SMA Negeri 1 Kuta, Denpasar, Bali. Hadir dalam kesempatan itu Kabag Pemberitaan dan Hulembaga Biro Humas Setjen MPR, Indro Gutomo, SH., MH.; Rektor Unmas, Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.; Kepala SMA Negeri 1 Kuta, Drs. I Ketut Sumandhi Arta, M.Pd., dan Dr. Putu Kepramareni sebagai narasumber.

Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauzia, dalam arahannya menjelaskan bahwa kegiatan FKP ini bertujuan selain untuk memperkenalkan MPR, dan sekaligus mengajak para peserta memberikan masukan, ide, dan gagasan yang membangun, bermanfaat, dan berdampak baik buat bangsa.

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini, kami di MPR sudah sangat maksimal dan selalu berupaya dalam koridor yang diamanahkan UU. Namun, untuk lebih memaksimalkan kualitas sesuai harapan, kami sangat membutuhkan masukan dari rakyat, termasuk dari mahasiswa, pelajar, dan civitas academica perguruan tinggi," terangnya.

Terbukanya MPR kepada masyarakat, lanjut Siti Fauziah yang biasa disapa Ibu Titi, karena MPR adalah Rumah Kebangsaan, rumahnya rakyat Indonesia. Sebagai rumah besarnya rakyat, lanjut Bu Titi, MPR membuka tangan lebar-lebar untuk seluruh elemen masyarakat untuk berkiprah dan ikut andil dalam membangun bangsa.

Bentuk penyampaian aspirasi ke MPR, kata Bu Titi, tidak akan dipersulit. "MPR memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk datang langsung untuk menyampaikan aspirasinya, baik kepada para Pimpinan dan Anggota MPR maupun kepada Setjen MPR, atau hanya sekedar

mencari informasi bahkan hanya sekedar berwisata di area gedung MPR," ujarnya.

Ditambahkan Ibu Titi, selain datang langsung, masyarakat juga bisa berselancar di internet dan media sosial seperti *web* resmi MPR, aplikasi Buku Digital MPR, *YouTube* dan *Instagram*. Semua itu dipersiapkan untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat.

"Saya berharap agar acara ini berjalan lancar dan ketika selesai akan berdampak baik serta menambah wawasan pengetahuan kepada peserta," ujar Bu Titi.

Di sesi akhir, . Sesjen MPR dan Rektor Unmas menandatangani Nota Kesepahaman antara Setjen MPR RI dan Universitas Mahasaraswati Denpasar Tentang Penguatan Kehumasan dan Pengembangan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. ❑

FGD Kehumasan MPR RI

Indro Gutomo: FKP Lebih Difokuskan Kepada Generasi Milenial

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi, Indro Gutomo, SH., MH., mengungkapkan bahwa Setjen MPR memiliki beberapa program kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat untuk lebih mendekatkan MPR kepada rakyat. Salah satu yang terbaru adalah Forum Konsultasi Publik (FKP).

"Metode pelaksanaan dari program FKP ini adalah turun langsung ke masyarakat untuk meminta saran, masukan atau gagasan tentang pelayanan publik di MPR, dengan target peserta dari kalangan generasi milenial," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Indro Gutomo saat menjadi narasumber kegiatan FKP dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Kehumasan MPR RI di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Kamis (23/11/2023)/. FDG yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Unmas ini diikuti seratus peserta terdiri dari para mahasiswa Unmas Lintas fakultas dan perwakilan pelajar SMA Negeri 1 Kuta.

Acara FGD Kehumasan MPR bertema: 'Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi dan Media Sosial,' ini dibuka secara resmi oleh Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah, SE., MM. Hadir dalam acara itu Rektor Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd., Dr. Putu Kepramareni sebagai narasumber, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Drs. I Ketut Sumandhi Arta, M.Pd.

Lebih jauh, Indro Gutomo menyampaikan bahwa fokus peserta FKP kepada generasi milenial, karena bangsa kita sedang mendapatkan bonus demografi, di mana 60 persen lebih jumlah penduduk Indonesia adalah usia produktif, yang mencapai puncaknya pada tahun 2045. Jadi, pemuda memiliki peran yang sangat penting di situasi dan kondisi itu.

Menurut Indro, penyelenggaraan FKP pada prinsipnya, selain ingin mendapatkan masukan dari elemen masyarakat yang pernah berkunjung ke MPR dan memiliki wawasan soal MPR, juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat yang tidak mengenal MPR. "Di sinilah kesempatan kita untuk memperkenalkan pelayanan publik yang ada di MPR," terangnya.

Berbicara soal pelayanan publik di Humas Setjen MPR, jelas Indro, ada dua bidang pelayanan publik yakni: *Pertama*, Bidang Edukasi Ketatanegaraan. Ini bisa diperoleh dalam penerimaan aspirasi masyarakat yang datang ke MPR. "Di sini masyarakat bisa berdiskusi, menyampaikan aspirasi hingga berkunjung ke berbagai area di komplek MPR, seperti museum dan lainnya," tambahnya.

Kedua, Bidang Layanan Informasi. Bentuk pelayanannya berupa pelayanan penyuluhan perpustakaan, pelayanan informasi melalui PPID/Front Desk, *website* dan media sosial. PPID juga berperan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat atau pusat pengaduan masyarakat. Terkait medsos MPR RI, diharap mendapat masukan positif dari mahasiswa agar platform ini semakin mengena di hati generasi muda.

"Untuk saat ini dan ke depan, pelayanan publik seperti penerimaan delegasi, pelayanan perpustakaan dan media sosial akan selalu senantiasa disempurnakan lagi oleh MPR RI, mengingat pelayanan publik merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 34 ayat 3, dan juga UU Nomor 25 Tahun 2009," jelas Indro.

Di sesi akhir, Indro Gutomo berharap forum ini menghasilkan rekomendasi, dan setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti di MPR. ❑

Forum Konsultasi Publik MPR di Malang

Siti Fauziah: Media Informasi MPR Wujud MPR Mengikuti Perkembangan Teknologi

Kedatangan delegasi Setjen MPR kita harap membawa manfaat kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Ini merupakan salah satu upaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan generasi muda.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PLT. SEKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR, Siti Fauziah, SE., MM., menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara 'Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR dalam bentuk Sarasehan Kehumasan di Aula Gedung D, Kampus UIN, Kota Malang, Jawa Timur, 18 November 2023.

Kegiatan FKP yang diselenggarakan dalam bentuk Sarasehan Kehumasan itu diikuti oleh seratus orang mahasiswa/ mahasiswi Program Studi Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim. Acara yang untuk kesekian kalinya ini diselenggarakan oleh Setjen MPR RI bekerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim.

Selain dihadiri langsung oleh Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah, kegiatan FKP itu juga dihadiri oleh Kepala Subbagian Pemberitaan dan Layanan Informasi Setjen MPR, Dhina Kurnia Winanda SI. Kom., Kepala Subbagian Sistem Informasi Setjen MPR, Wafistrietman Corris, ST., MT., Kepala Program Studi Teknik Informatika UIN, Dr. Fachrul Kurniawan M.MT., dosen UIN Dr. Yunifa Miftachul Arif, MT., serta dosen UIN dan staf Setjen MPR lainnya.

Dalam sarasehan bertema: 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik MPR Melalui Pengelolaan Layanan Website MPR dan Setjen MPR' itu, Siti Fauziah menuturkan bahwa kehadiran delegasi Setjen MPR di kampus UIN ini adalah untuk memperkenalkan kelembagaan MPR.

Lebih lanjut, Bu Titi –sapaan Siti Fauziah – menginformasikan, lembaga MPR memiliki dua *web* resmi, yaitu: *mpr.go.id* dan *setjen.mpr.go.id*. "Keduan media informasi itu dimiliki oleh MPR sebagai wujud bahwa kita (MPR-*red*) mengikuti perkembangan teknologi informasi," ujarnya.

Dalam kesempatan memperkenalkan *web* resmi MPR itu, Bu Titi menjelaskan bahwa web-web yang dimiliki MPR ini akan terus berproses, mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Untuk menyempurnakan teknologi (web yang ada), kata Bu Titi, kami memerlukan masukan dari banyak pihak, termasuk dari para mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim .

"Nah, tujuan kita ke UIN adalah untuk meminta masukan dari mahasiswa," ujar Bu Titi. "Kalau tak ada masukan berarti web kita sudah bagus", tambahnya sembari tersenyum. Masukan dari mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UIN, menurut Bu Titi, diyakini akan memberi manfaat bagi keberadaan dan keberlangsungan *web* resmi MPR.

Jadi, kata Bu Titi, banyak informasi yang

disampaikan lewat web MPR. Tidak hanya rilis kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR, namun dinamika bagian dan subbagian yang ada di lingkungan Setjen MPR juga tersaji di web MPR. “Ada juga web yang mengupas Perpustakaan MPR,” tuturnya. “Dengan web itu kita tunjukkan koleksi perpustakaan yang memiliki, berupa berbagai macam buku, baik bentuk cetak maupun berupa e-paper”, tambahnya.

Lewat web yang ada, menurut Siti Fauziah, masyarakat bisa mengenal MPR. Bila mahasiswa UIN ingin berkunjung ke MPR maka harus lebih dahulu membuka web yang ada, sehingga saat datang ke komplek gedung wakil rakyat di Senayan, Jakarta, sehingga tidak bingung dan bisa langsung menanyakan hal-hal yang lebih mendalam tentang ke-MPR-an. “Kita terbuka menerima delegasi dari manapun, baik dalam jumlah besar maupun kecil,” ujarnya.

Sementara Kepala Program Studi Teknik Informatika UIN, Dr. Fachrul Kurniawan, M.MT., dalam kata sambutannya mengatakan, Sarasehan Kehumasan ini sangat luar biasa. Dia berharap, tahun depan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UIN bisa berkunjung ke MPR untuk mengetahui sistem teknologi informasi yang dikembangkan di sana. “Dengan studi banding ke MPR kita berharap akan mendapat banyak informasi tentang lembaga negara ini,” tuturnya.

Penjelasan tentang web MPR juga disampaikan oleh Wafistrietman Corris dan Analis Sistem Informasi Setjen MPR, Catur Priyo Wibowo S.Kom. Acara dilanjutkan forum tanya jawab. ❑

Forum Protokol MPR Tahun 2023

Siti Fauziah: Protokol Harus Mampu Mengelola Acara dengan Prima

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEJAK pukul 09.00 WIB, hari Selasa (21/11/2023), sejumlah delegasi dari kementerian, lembaga negara, dan non-kementerian mulai berdatangan ke komplek MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta. Delegasi yang berjumlah 74 orang itu kemudian memenuhi Ruang Delegasi MPR. Dan, mereka adalah peserta Forum Protokol MPR 2023.

Berbagai macam acara disiapkan untuk kegiatan ini, salah satunya adalah Talkshow. Untuk acara talkshow ini menghadirkan Kepala Bagian Umum Deputi Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Lisa Riana Muallim,S.Sos.,M.M. Dan, berperan sebagai moderator adalah Manager PT. Kereta Api Indonesia, Fritda Hermawanti.

Plt. Sesjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., selaku tuan rumah, mengatakan, Forum Protokol MPR diselenggarakan untuk meningkatkan hubungan silaturahim antarprotokol kementerian, non-kementerian, dan lembaga negara, sehingga diharapkan mampu untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan tugas bersama.

Lebih lanjut, Siti Fauziah mengayakan, protokol merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang protokol harus mempunyai kecakapan seperti tanggap, responsive, antisipatif, inovatif, dan terampil dalam melaksanakan tugas protokoler serta piawai dalam membina hubungan dengan pihak lain yang terlibat dalam acara pada berbagai waktu dan kesempatan.

Selain itu, menurut Bu Titi – sapaan akrab Siti Fauziah— seorang protokol harus mengerti dan memahami Undang-Undang Keprotokolan yang berlaku, dan juga dituntut mampu mengelola rangkaian acara dengan prima agar tercipta kesan mendalam serta citra positif.

Siti Fauziah mempunyai pengalaman dalam bidang keprotokolan. Dia mengungkapkan, petugas protokol perlu memiliki ketrampilan dan kecermatan. “Kalau ada satu hal yang tidak sesuai harus cepat mengambil tindakan yang diperlukan,” ujarnya. “Kalau di lapangan ada perubahan kita harus reaktif,” tambahnya.

Dia mencontohkan, kursi pimpinan sudah ditempatkan, tapi kemudian ada pihak lain yang memindahkan atau menggeser, hal

demikian tentu akan menimbulkan masalah. Untuk itu, kata Bu Titi, kursi yang ada harus dijaga. "Kalau tidak dijaga bisa berubah," paparnya.

Agar tidak terjadi hal seperti itu, kata Bu Titi, dia kerap melihat para protokol pada menjaga kursi pimpinan masing-masing di berbagai acara resmi agar jangan sampai kursi pimpinan dipindah. "Bener nggak?" tanya Bu Titi. Dan, pertanyaan itu dijawab serempak oleh para peserta, "bener."

Selain itu, kata Bu Titi, protokol harus cakap dalam berargumentasi, beradu pendapat, untuk menempatkan di mana posisi terbaik untuk pimpinan mereka. Perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat, ini mengatakan, MPR memiliki 10 pimpinan. Pimpinan MPR sering mengadakan kegiatan bersama dengan pimpinan kementerian dan lembaga negara lainnya. Intensitas kegiatan Pimpinan MPR dengan pihak lain sangat tinggi, dan ini tentunya tidak terlepas dari tugas keprotokolan.

"Dalam menjalankan tugas, seorang protokol dituntut untuk selalu bersikap profesional dengan memiliki kemampuan, seperti pengetahuan tentang keprotokolan, kemampuan dalam hubungan antarsesama, bermental kuat dan kepribadian tangguh, kreatif, terampil, serta cekatan.

Di akhirt sambutannya, Siti Fauziah berharap, dalam kegiatan yang bertema: 'Protokol Profesional dan Berkarakter,' itu dapat menjadi motivasi dan semangat bagi protokol dalam meningkatkan etos kerja dan menjadi protokol yang profesional dan berkarakter.

Dan, Siti Fauziah berharap, para peserta dapat memperoleh ilmu baru, serta meningkatkan kembali semangat dan rasa percaya diri protokol dalam melakukan tugasnya. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Forum Tematik Bakohumas MPR

Indro Gutomo: MPR Optimalkan Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Publik.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR, Indro Gutomo, SH., MH., menyebutkan, MPR telah memanfaatkan media social — seperti X atau Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan TikTok — sebagai bagian strategi komunikasi publik. MPR pun telah melakukan evaluasi terhadap pengembangan media sosial MPR, di antaranya melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi.

"Melalui Forum Konsultasi Publik, kita datang ke masyarakat terutama perguruan tinggi, kemudian kita memperkenalkan media sosial MPR, untuk mendapatkan masukan, saran, dan rekomendasi bagi pengembangan media sosial MPR sebagai salah satu strategi komunikasi publik MPR," katanya dalam Forum Tematik Bakohumas berbentuk Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

FGD bertema: "Pengembangan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Publik" ini oleh lebih dari 100 peserta dari kehumasan lintas kementerian dan lembaga. Tampil sebagai pembicara Novalitas Sari (Tenaga Ahli Bidang Komunikasi MPR dan Senior Spesialis Media Sosial di Kementerian Kelautan dan Perikanan), Ario Setiawan (Koordinator Tim Medsos MPR RI). Dan, acara ini dipandu oleh Dhina Kurnia Winanda, selaku moderator.

Lebih lanjut, Indro Gutomo menjelaskan, Biro Humas dan Layanan Informasi MPR juga telah melakukan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari strategi komunikasi publik. Di antaranya, penerimaan delegasi masyarakat, penyuluhan perpustakaan dengan memperkenalkan Perpustakaan Digital MPR. Lalu, PPID sebagai sarana bagi masyarakat secara langsung meminta informasi, bahkan pengaduan berkaitan dengan MPR. Serta kegiatan lainnya berupa diseminasi informasi di tempat publik, diskusi mingguan tentang isu aktual dengan wartawan parlemen. "Selain itu, kita juga menyebarkan informasi melalui sarasehan kehumasan," ujar Indro Gutomo.

Strategi komunikasi yang saat ini sedang giat dikembangkan, menurut Indro Gutomo, adalah media sosial. Sebagai gambaran, media sosial yang ada di MPR adalah X (Twitter), Facebook, Instagram, Youtube, dan TikTok MPR. Lebih lanjut Indro Gutomo menerangkan, Media Sosial MPR berisi beberapa hal, yaitu berita foto dan rilis kegiatan pimpinan yang disebarluaskan melalui platform media sosial. Kemudian, serba-serbi tentang MPR. Ada juga warna tentang keanekaragaman Indonesia, seni tari, seni budaya, serta kuis untuk menarik perhatian netizen, serta live streaming, youtube.

Terkait evaluasi media sosial, kami mengadakan Forum Konsultasi Publik. Strateginya adalah bukan diskusi, tapi MPR lebih mendengar saran untuk peningkatan media sosial yang ada di MPR. Semua aspirasi kita tampung dan ditindaklanjuti, lanjut Indo Gutomo. Banyak rekomendasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan FKP dengan beberapa perguruan tinggi itu. Rekomendasi itu, antara lain tentang pentingnya Empat Pilar MPR atau Budi Pekerti

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dimasukkan dalam kurikulum pendididkan. Wacana ini perlu digaungkan melalui media sosial MPR.

Rekomendasi lainnya adalah MPR perlu membuat TikTok yang saat ini sudah kami bentuk, perlu adanya MPR Corner atau Pojok MPR di setiap medsos yang ada di perguruan tinggi, perlunya pengayaan buku MPR Digital, tidak hanya tentang hukum dan ketatanegaraan tetapi juga kesehatan, Teknik, dan buku-buku lainnya, dan perlu *call to action* di Instagram. Artinya, jika ingin berkunjung ke MPR tidak perlu repot, karena selalu diingatkan ada petunjuk di Instagram MPR cara berkunjung ke MPR.

"Itu beberapa rekomendasi yang sedang ditindaklanjuti untuk memperkaya medsos MPR. Saya berharap di Forum Tematik Bakohumas ini juga ada rekomendasi-rekomendasi, dan sharing pengalaman pengelolaan media sosial di lembaga atau ementerian lain. Hal ini sangat positif karena di antara badan publik nantinya akan dapat saling mengadopsi strategi komunikasi yang mungkin belum ada di instansinya," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Media Sosial MPR, Ario Setiawan, merinci tentang pengelolaan media sosial MPR. MPR menggunakan media sosial Twitter (X) dan Facebook pada tahun 2013, kemudian Youtube mulai digunakan pada tahun 2015, Instagram pada tahun 2016, dan terbaru adalah TikTok yang merupakan tindaklanjut rekomendasi FKP MPR tahun 2023. "Banyak hambatan dalam pengelolaan media sosial MPR, namun ini merupakan tantangan yang menjadi pe- er tim medsos," katanya.

Dalam Forum Tematik Bakohumas MPR, Senior Media Specialist Novalita Sari menjelaskan tentang pentingnya media sosial untuk lembaga dan Kementerian, serta berbagai problem dan kiat untuk mengelola media sosial. "Ada tiga hal penting dalam pengelolaan media sosial, yaitu identitas, eksistensi, dan interaktif," katanya.

Kesimpulan dan rekomendasi dari Forum Tematik Bakohumas ini, antara lain adalah media sosial menjadi garda terdepan dalam menjaga citra badan publik sehingga perlu pengelolaan secara profesional, perlunya pembuatan SOP untuk menangani krisis komunikasi, pengaduan masyarakat bukan diselesaikan di media social, namun wajib diarahkan pada PPID masing-masing badan publik. ❑

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI

Merawat Stabilitas Polhukam dan Kredibilitas Demokrasi

PEMILIHAN Umum (Pemilu) Februari 2024 hendaknya tidak mengguncang stabilitas politik, hukum, keamanan (Polhukam) serta ketertiban umum. Sebaliknya, Pemilu 2024 harus menjadi cerminan semakin kokohnya kredibilitas demokrasi. Indonesia akan dimampukan untuk terus bergerak maju jika stabilitas Polhukam tetap terjaga dengan dinamika demokrasi yang terus mengalami proses pematangan.

Per Februari 2024, masyarakat Indonesia yang berhak memilih akan menggunakan hak pilihnya melalui Pemilu sebagai agenda lima tahunan yang wajib. Hari-hari ini, proses persiapan menuju pelaksanaan agenda itu sarat dinamika, sebagaimana bisa disimak semua orang melalui beragam saluran informasi. Namun, tetap perlu diingatkan bahwa di atas segala-galanya adalah kewajiban bagi segenap elemen masyarakat untuk selalu memberi bukti kepada komunitas internasional bahwa Indonesia baik-baik saja. Utamanya, karena pemilihan presiden dan anggota parlemen tahun 2024 adalah bagian dari proses pematangan demokrasi Indonesia.

Agar Indonesia yang sungguh baik-baik saja itu berwujud nyata, partisipasi semua orang dalam dinamika persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 itu hendaknya proporsional, agar segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Rivalitas peserta pemilu meraih simpati publik pasti tak terhindarkan. Namun, rivalitas itu hendaknya tidak menghadirkan ekses, dalam arti tidak harus menimbulkan guncangan pada aspek Polhukam serta ketertiban umum.

Karena Pemilu juga dimaknai sebagai pesta demokrasi, segenap elemen masyarakat ditantang untuk selalu menjaga dan merawat stabilitas Polhukam plus ketertiban umum sehingga semua orang bisa menikmati pesta itu. Sebab, stabilitas Polhukam dan ketertiban umum yang selalu terjaga akan memberi ruang dan waktu bagi semua orang untuk terus melangkah maju dan berkegiatan produktif, bukan sebaliknya dipaksa bergerak mundur karena faktor instabilitas.

Tema atau isu tentang urgensi merawat stabilitas Polhukam dan ketertiban umum menuju pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dikemukakan, ditekankan dan mendapat perhatian ekstra dari semua pemangku kepentingan. Dorongan ini tidak mengada-ada atau berlebihan, melainkan berpijak pada fakta bahwa hari-hari ini banyak komunitas merasa tidak nyaman menyikapi ragam aspek pada dinamika persiapan menuju Pemilu 2024 yang semakin menghangat dan udara dipenuhi berbagai berita hoax yang menyebarkan kebencian.

Tidak hanya merasakan, melainkan juga melihat langsung perang urat syaraf yang dilancarkan para elit politik itu dalam berbagai bentuknya. Dan, sebagaimana bisa disimak hari-hari ini, rasa dan penglihatan pada berbagai aksi itu kemudian mendorong banyak reaksi, baik dalam wujud pernyataan keprihatinan maupun munculnya semangat perlawanan terhadap berbagai manuver yang dilakukan para elit yang berseberangan itu. Semangat perlawanan itu mengemuka karena banyak

komunitas orang muda melihat pertikaian para elit politik itu telah dipertontonkan dengan begitu telanjang. Sebagian lainnya cemas akan masa depan demokrasi di negara ini karena gesekan para elit semakin tajam.

Reaksi, unjuk keprihatinan dan kekhawatiran itu telah disuarakan oleh para tokoh dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh sepuh dari lintas agama. Para budayawan pun telah bersuara dengan lantang. Tidak ketinggalan adalah suara para pegiat sosial, pegiat HAM (hak azasi manusia) hingga kelompok purnawirawan militer. Beberapa hari belakangan ini, komunitas mahasiswa pun tak hanya menyuarakan keprihatinan, sebagian malah mulai menunjukan sikap kritisnya. Menggunakan sarana media sosial, kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah pun tak mau ketinggalan menyatakan sikap dan menyuarakan keprihatinan.

Esensi dari reaksi, unjuk keprihatinan dan kekritisan itu semata-mata adalah keinginan mayoritas rakyat agar semua Pemilu 2024 berlangsung damai dan legitimate, karena semua pihak melaksanakannya dengan kepatuhan mutlak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, damai, bersih dan jujur. Semua bentuk penebaran kebencian dan berita-berita palsu dari para buzer yang hanya menimbulkan curiga dan ketidakpercayaan masyarakat hendaknya segera dihentikan. Masih ada waktu untuk meluruskan apa yang tidak wajar dan tidak patut itu. Ketidakwajaran dan ketidakpatutan itu tak perlu lagi dirinci, karena sudah menjadi pengetahuan dan perbincangan semua elemen masyarakat.

Pemilu damai dan legitiminasi Pemilu sepenuhnya menjadi tanggungjawab aparatur dan penyelenggara pemilu. Maka, aparatur dan penyelenggara Pemilu hendaknya tidak minimalis dalam menyikapi ketidakwajaran dan ketidakpatutan yang mengemuka sekarang ini. Apa yang terjadi hari-hari ini sungguh-sungguh telah melukai akal sehat banyak orang. Nyata terlihat adanya upaya pembodohan dengan menebarkan berita bohong atau hoax, tetapi masyarakat menolak diasumsikan sebagai komunitas bodoh, dan karena itulah banyak komunitas menyuarakan kritik dan keprihatinan.

Kalau berita-berita hoax dari para buzer itu dibiarkan, pembiaran ini diasumsikan bakal mereduksi legitimasi Pemilu 2024. Kalau asumsinya sudah seperti itu, hasil Pemilu seperti apakah yang akan dipersembahkan kepada negara-bangsa? Legitimasi Pemilu yang sudah mengalami reduksi akibat ketidakwajaran dan ketidakpatutan hanya akan menghadirkan masalah yang berkepanjangan. Dan, sebagaimana banyak catatan sejarah sudah memberi bukti, masalah yang terus bergejolak akibat kekecewaan pada hasil Pemilu selalu mengganggu stabilitas Polhukam dan ketertiban umum.

Karena itu, penyelenggara Pemilu didorong lebih pro aktif merespons segala sesuatunya. Otoritas negara diimbau untuk merespons semua dinamika itu dengan pendekatan yang proporsional pula. Langkah para petugas di lapangan harus terukur, dan selalu berada dalam kendali para atasan. Tindakan diluar kendali tidak boleh dibenarkan karena berpotensi menyulut konflik dengan para simpatisan peserta Pemilu 2024.

Hari-hari ini, sebagian kelompok masyarakat pun sedang merasakan ketidaknyamanan akibat naiknya harga sejumlah bahan pangan. Bahkan, harga beras dan cabai dalam periode satu tahun terakhir ini naik dalam skala yang mencengangkan. Sebagaimana telah diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat setidaknya ada sembilan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga lebih dari 10% dari harga acuan atau eceran yang ditetapkan pemerintah.

Faktor kenaikan harga bahan pangan di tengah persiapan Pemilu 2024 yang sarat ketidakwajaran dan ketidakpatutan itu hendaknya perlu diwaspadai, karena sangat mudah ditunggangi untuk menyulut emosi banyak orang. Urgensi merawat stabilitas Polhukam dan ketertiban umum menuju pelaksanaan Pemilu 2024 hendaknya mendapat perhatian ekstra dari semua pemangku kepentingan. ❑

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si., Anggota MPR Fraksi PAN

Pemilu Damai Adalah Sebuah Keniscayaan

ISU kecurangan dan ketidaknetralan menyeruak di tengah perhelatan Pemilu 2024 yang sudah memasuki tahap kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Isu ini mulai berembus dalam beberapa pekan belakangan ini. Awalnya, sinyalemen dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada pertengahan November lalu. Ia mewanti-wanti potensi kecurangan dalam rangkaian Pemilu 2024. Sinyalemen Megawati soal kecurangan ini kemudian mendapat sahutan dari berbagai pihak.

Setelah sinyalemen itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD., mengaku, menerima laporan mengenai kecurangan Pemilu di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Dari laporan itu disebutkan bentuk kecurangan, antara lain berupa dugaan pemasangan baliho partai politik dari pihak-pihak tertentu. Sebaliknya, terjadi penggusuran baliho partai politik tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Lalu ada juga pengaduan kantor-kantor cabang partai politik disambangi aparat.

Kala kecurangan dan ketidaknetralan bergulir, beredar salinan pakta integritas yang memuat nama Pj. Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Dalam pakta integritas itu, Pj. Bupati Sorong siap mencari dukungan dan kontribusi suara pada Pilpres untuk kemenangan Capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, di Kabupaten Sorong. Kasus hampir serupa juga terjadi di Majalengka.

Padahal, peserta Pemilu, termasuk pasangan Capres dan Cawapres, sudah menandatangani deklarasi untuk Pemilu damai pada saat memulai masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023. Untuk menanggapi hal itu, berikut penuturan anggota MPR dari Fraksi PAN, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si., yang juga anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Petikannya.

Untuk mewujudkan Pemilu dan kampanye damai terkait juga dengan isu netralitas dan kecurangan yang muncul belakangan ini. Artinya, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Apa tanggapan Bapak?

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi tentang kepemiluan, tentu Pemilu yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menjadi satu harapan dan keinginan. Kami di Komisi II DPR adalah orang yang paling bertanggungjawab bagaimana Pemilu itu dilangsungkan secara demokratis. Pemilu dilangsungkan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu dilakukan dengan jujur dan adil.

Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus taat asas hukum. Penyelenggara Pemilu harus tegak lurus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dia (penyelenggara Pemilu) tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, apakah dari pemerintah, begitu juga DPR, maupun peserta Pemilu. Ini saya tegaskan. Tujuannya adalah agar dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara memang benar-benar orang yang memiliki integritas, kapabilitas, dan kapasitas. Untuk merekrut para penyelenggara dibuat aturan, ada Timsel, fit and proper test.

Oleh karena itu, kita perlu uji di lapangan, apakah penyelenggaraan Pemilu sesuai

dengan keinginan dan harapan kita. Seperti sudah saya sebutkan, kalau Pemilu berjalan sesuai dan taat asas hukum, penyelenggara Pemilu tegak lurus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, saya yakin Pemilu pasti berjalan dengan damai. Jika dalam pelaksanaan dan tahapan-tahapan Pemilu kita lihat ada gonjang-ganjing, tentu ini bagian yang perlu kita kritisi, terutama juga dari media.

Bagaimana dengan indikasi adanya kecurangan atau ketidaknetralan aparatur dalam Pemilu, misalnya adanya pakta integritas Pj. Bupati Sorong, penggusuran baliho dan spanduk partai politik, dan lainnya. Bagaimana pandangan Bapak?

Belum lama ini kami di Komisi II melakukan RDP dengan penyelenggara Pemilu. Dalam rapat saya menekankan kepada Bawaslu agar bisa menciptakan Pemilu damai maka Bawaslu harus punya keberanian. Ini suatu yang urgen, Bawaslu harus bisa menegakan aturan-aturan pada masa kampanye yang dimulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, atau selama 75 hari. Pada masa kampanye itu penuh dengan dinamika.

Dalam masa kampanye akan muncul potensi ketidakdamaian kalau seandainya Bawaslu melakukan tebang pilih dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, memilih pelanggaran-pelanggaran yang ditindaklanjuti atau diproses, dan lain sebagainya. Karena itu, saya sangat tegas menyatakan bahwa Bawaslu harus punya keberanian, tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melakukan pelanggaran, baik calon presiden atau peserta Pemilu lainnya, para calon legislatif termasuk saya sebagai Caleg, Bawaslu harus memproses sebagai bagian untuk menuju pelaksanaan Pemilu damai.

Bagaimana untuk mengawasi, mengurangi atau meminimalisir adanya kecurangan dan ketidaknetralan dalam Pemilu 2024 ini?

Jadi, sebenarnya kunci dari semua persoalan kecurangan dan ketidaknetralan, tidak sepenuhnya dibebankan kepada Bawaslu. Tetapi, para jurnalis dan media massa juga mempunyai peran yang penting, karena mata pena jurnalis dan media sampai ke seluruh pelosok-pelosok atau dusun-dusun dan dibaca semua masyarakat. Kita berharap para jurnalis ini bisa memviralkan kecurangan sehingga memunculkan aspek

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

jera bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran itu.

Undang-undang memang sebagai piranti agar tidak ada satu pun peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran. Tetapi, yang paling signifikan dan strategis adalah bagaimana media mampu mengelaborasi dan menciptakan suasana damai dalam Pemilu melalui kritikan-kritikan terhadap pelanggaran. Saya yakin dengan viralnya peristiwa pelanggaran yang terjadi maka pelaku yang melakukan pelanggaran akan merasa malu. Kadang orang tidak merasa malu kalau menerima hukuman, tetapi manakala hukuman itu dalam bentuk informasi yang viral dari media maka muncul rasa malu pelaku. Ini cara yang ampuh. Jika ada pelanggaran atau kekerasan yang terjadi, kemudian viral dan menjadi berita, ini merupakan cara yang jitu. Karena itu, saya harap media harus memainkan peran seperti itu. Tujuannya adalah agar tercipta Pemilu damai yang akan menghasilkan pemimpin yang penuh dengan kedamaian.

Bagaimana menciptakan Pemilu damai dengan meminimalisir kecurangan dan ketidaknetralan?

Menurut saya, Pemilu damai adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada artinya demokrasi, tidak ada artinya Pemilu, jika dilakukan dengan berbagai cara tetapi tidak ada suasana damai. Adalah malapetaka jika Pemilu damai tidak terwujud. Karena itu, untuk melaksanakan Pemilu 2024, seluruh elemen masyarakat harus diupayakan satu langkah menuju pelaksanaan Pemilu yang dilakukan dengan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang damai pula. Kita berharap kepada KPU agar tetap berintegritas, independen, tegak lurus melakukan ketentuan undang-undang yang berlaku. KPU harus bekerja secara profesional.

Sukses perhelatan pesta demokrasi ini tentu sesuatu yang kita inginkan, ujungnya adalah jangan sampai terjadi malapetaka. Tetapi dinamika yang terjadi dalam Pemilu adalah juga sebuah keniscayaan. Artinya, kita berharap dalam Pemilu ini tidak boleh ada kampanye hitam (black campaign), memfitnah, hoaks, dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah bagaimana dengan demokrasi ini kita memberikan pencerahan kepada setiap elemen masyarakat. Saya kira peran media sangat besar. Saya kira pers ini sudah menjadi pemilih cerdas.

Pemilih cerdas adalah orang yang tidak mau diintimidasi, orang yang tidak mau digiring, dan orang yang mengetahui siapa calon yang akan dipilih baik presiden maupun Caleg karena telah mengetahui rekam jejaknya. ❑

Pelajaran Berharga dari Sosok *Bung Karno*

Anjasmara

AKTOR multitalenta **Anjasmara** kembali didapuk memerankan sosok fenomenal Presiden Pertama Indonesia, Bung Karno, dalam film layar lebar Hamka & Siti Raham (Vol 2). Film yang disutradarai oleh Fajar Bustami, setelah sukses film pertama, ini kembali menayangkan film biografi politik menceritakan persahabatan Buya Hamka dengan Presiden Ir. Soekarno.

Sementara sosok Buya Hamka—dalam film yang diproduksi oleh Falcon Pictures—ini diperankan oleh Vino G. Bastian, seorang jurnalis dan tokoh agama Islam terkemuka di Indonesia. Sedangkan istri Buya Hamka bernama Siti Rahmah diperankan oaudya Cynthia Bella. Film ini akan tayang di bioskop Tanah Air pada tanggal 21 Desember 2023.

Bagi Anjasmara inilah untuk keempat kalinya dia memerankan tokoh Bung Karno. Pertama di FTV, kedua dan ketiga teatrikal, dan keempat sekarang ini. "Jadi, tidak perlu pendalaman yang sulit," papar pemeran tokoh lucu dan absurd 'Si Cecep,' di Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Si Cecep, eh.. Anjasmara, mengaku, mendapat pelajaran berharga seputar kharisma dan kehidupan Presiden Soekarno. ❏

DER

Ajak Nonton Film Sembari Berdonasi Untuk Palestina

ARTIS, model, pemeran, produser film dan sutradara, **Lola Amaria**, mengaku miris melihat kondisi konflik di Palestina yang banyak memakan korban, terutama anak-anak. Atas dasar kemanusiaan, perempuan kelahiran Jakarta 30 Juli 1977, ini melakukan aksi penggalangan dana kepedulian pada Palestina..

Aksi tersebut dalam bentuk mengundang berbagai pihak untuk menyaksikan film dokumenter di XXI Epicentrum Walk-Kuningan, Jakarta, pukul 18.45 WIB. “Ya, menonton film sambil berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” kata artis yang memulai kariernya pasca menjuarai lomba model Wajah Femina 1997 ini, di Jakarta, Kamis (24/11/2023).

Acara nonton film sambil berdonasi ini juga dihadiri oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Setiap penonton dikenakan Rp 50.000 per tiket, tapi kalau niatnya menyumbang bisa Rp 100 ribu, atau bisa juga Rp 1 juta. Kita gak batasi. Intinya, bisa sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin,” katanya. ❑

DER

Lola Amaria

Megan Domani

Syuting di Paris Bawa Herbal Indonesia

MEGAN Domani, artis, model, bintang sinetron Indoensia kelahiran Montego Bay, Jamaica, 21, berkesempatan syuting selama delapan hari, pada September 2023, di Paris, Prancis, untuk film serial ‘Bad Boy vs Crazy Girls 2’.

“Ini pertama kalinya aku syuting di luar negeri, bisa dibilang lumayan *challenging* ya dari segi budayanya, orang-orangnya, semua berbeda. Cara syutingnya pun berbeda, lebih *chill* dibandingkan di Indonesia,” kata pemeran beberapa film: ‘Jodoh Yang Tertukar’, ‘Seleb’, dan ‘Cinta karena Cinta’ini, di kawasan Kemang, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Megan bercerita, kendala selama syuting di Paris, yang sangat terasa adalah faktor cuaca. “Cuaca di Paris lebih panas ketimbang di Indonesia. Namun, tiba-tiba berubah ekstrim menjadi dingin banget, sampai kita semua menggigil,” cerita Megan.

Karena kendala itulah, Megan mengaku, sempat masuk angin. Beruntung ia sudah siap sedia obat-obatan dari Indonesia. “Sempat masuk angin sih, tapi ya namanya orang Indonesia selalu bawa minuman herbal buat mengeluarkan angin-angin itu,” ujarnya seraya tertawa. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Gelaran Piala Dunia U-17
di Indonesia Dinilai Sukses

PANGGUNG kejuaraan sepakbola Piala Dunia U-17 di Indonesia telah berakhir. Hingar bingar kemeriahan pesta sepakbola dua tahunan itu menghasilkan, kesebelasan Jerman keluar sebagai juara. Di babak final, yang berlangsung di Stadion Manahan Solo (Jawa Tengah), Der Panzer Jerman, memupus asa Les Bleus dengan skor 4-3 dan berhak mengangkat piala.

Bagi Jerman, kemenangan itu mengulang keperkasaan mereka atas tim yang sama di level Eropa pada pertengahan tahun ini. Keberhasilan tersebut juga sekaligus merupakan klimaks yang sempurna. Karena, selama berjalannya kejuaraan, Perancis hanya pernah sekali kebobolan saat menghadapi Mali di babak semi final. Saat itu, Perancis bisa membalikkan keadaan atas Mali dan unggul dengan skor 2-1.

Sayang, hingar-bingar di dalam Stadion Manahan saat pertandingan final berlangsung tidak terasa sampai ke luar. Hanya, teriakan saja yang sesekali terdengar. Sementara arena sekitar Manahan tampak lengang. Tidak ada satupun pedagang makanan yang menjajakan dagangan, seperti lazimnya. Kios-kios yang biasa dipakai padagang kaki lima juga seluruhnya tutup, dan gelap. Tempat parkir yang biasanya penuh dengan kendaraan, juga kosong melompong.

Hanya terdapat beberapa orang saja yang terlihat berjalan mengitari kawasan stadion. Juga beberapa anak yang berfoto dengan latar belakang logo Piala Dunia U-17. Selebihnya terlihat sepi, hanya ada para petugas yang bergerombol di seputar kawasan, terus memantau dan menjaga keamanan.

Kerumunan penonton yang selalu terjadi di luar stadion pada saat berlangsungnya

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

laga final juga tidak ditemukan sama sekali. Apalagi jika berasumsi akan tersedia layar lebar bagi mereka yang tidak memiliki tiket masuk, semua itu sama sekali tak ditemukan. Nyaris sepi, padahal malam itu demikian istimewa, bukan hanya bagi Surakarta tetapi juga dunia.

Tanda-tanda bakal kesunyian di kawasan luar stadion Manahan sesungguhnya sudah terasa sejak sore. Saat itu, wilayah Surakarta, kota tempat berlangsungnya final sepakbola U-17 diguyur gerimis yang merata. Tetapi beruntung, hujan lebat tak turun. Bahkan, sesaat sebelum senja gerimispun berhenti dengan sendirinya.

Pasca gerimis reda, suhu udara yang biasanya cukup hangat sore itu malah terasa dingin. Dan, sejak itu, ratusan petugas terlihat makin waspada dalam berjaga. Jumlah mereka juga terus bertambah, seiring gelap menyelimuti Surakarta.

Tampak sekali, antusiasme masyarakat Solo untuk menyaksikan even final Piala Dunia U-17 sangat kecil. Tidak sebagus saat Persis Solo bertanding di Manahan. Terbukti, untuk mendekat ke stadion Manahan pun mereka tidak berminat. Akibatnya, suasana di luar Manahan begitu senyap.

Beberapa warga yang sempat ngobrol dengan Majalah *Majelis* berargumen, kurang tertarik dengan pertandingan U-17. Apalagi, jauh-jauh hari kesebelasan Indonesia sudah tersingkir dari arena pertandingan. Mereka juga beralasan tidak berminat menonton, karena para pemainnya belum terkenal.

Warga yang lain menuturkan, keengganannya menonton langsung ke stadion, karena tidak mendapat tiket masuk. Padahal, sudah beberapa kali mencoba mendapatkan tiket, tetapi hasilnya nihil. Karena itu lebih baik menonton di televisi.

Nonton Bareng

Meski partisipasi warga terhadap perhelatan Piala Dunia U-17 belum maksimal, tetapi sebagai tuan rumah kita patut berbangga. Terbukti, banyak fihak yang menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan Piala Dunia U-17 di Indonesia. Banyak dari kalangan pelatih, hingga pemain serta official yang menyatakan kekagumannya terhadap pelayanan panitia, serta penerimaan masyarakat di empat kota tempat berlangsungnya Piala Dunia U-17 tahun 2023.

Pelatih Jerman, Christian Wuck, misalnya, Ia merasa kagum dengan keramahan masyarakat Indonesia. Pasalnya, setelah anak asuhnya memastikan keluar sebagai juara, Christian Wuck merasa harus melambaikan tangan kepada warga masyarakat, dengan jumlah yang tidak pernah dia banyangkan sebelumnya.

Karena itu, ia mengaku bersyukur diberi kesempatan bertemu dan mengenal orang-orang yang sangat ramah. Bahkan, lambaian tangan itu harus dilakukan saat berangkat dan pulang latihan, selama di Indonesia.

Sementara kiper cadangan Perancis, Timothe Viel, mengaku terpesona dengan cuaca di Indonesia. Setelah sebulan tinggal di Indonesia, Timothe Viel sempat merasakan dua musim sekaligus, yaitu kemarau dan penghujan. Dengan iklimnya itu, Timothe menganggap, Indonesia adalah negara yang indah. Karena itu ia menyayangkan dirinya tidak pernah berkunjung ke Indonesia sebelumnya.

Sekalipun tidak hadir langsung ke stadion, bukan berarti Wong Solo tidak menyaksikan gelaran final. Buktinya, sebagian di antara mereka menggelar acara nonton bareng. Memakai layar lebar dan sound sistem secara swadaya, mereka menikmaati pertandingan dengan riang gembira.

Pemandangan tersebut, salah satunya bisa dilihat di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Di tempat ini, puluhan orang tampak ikut nonton bareng. Mereka berteriak dan mencemooh, sebagaimana laiknya penonton yang melihat langsung di stadion. ❑

MBO

Siti Fauziah, SE.,MM
Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI

Metamorfosis dari Seorang 'Pembuat Handycraft' Sampai Menjadi Birokrat Tangguh

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perjalanan hidupnya penuh warna. Sempat 'ga pede' karena pernah gagal mendaftar sebagai seorang PNS padahal nilai ujiannya paling tinggi, tapi kini wanita tangguh ini malah capai posisi puncak di birokrasi

TEPAT Pukul 10.00 di pertengahan Oktober pagi, penulis sudah tiba di ruangan Ibu Siti Fauziah. Hari itu, tepat seminggu beliau resmi diangkat sebagai Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI. (Karirnya memang sangat *moncer*. Sebulan kemudian, tepatnya bulan November, beliau sudah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas / Plt Sekretaris Jenderal MPR RI).

Selang 5 menit kemudian, beliau memasuki ruangan. Seperti biasa, ketika bertemu, harus belomba memberi salam, sebab beliau punya kebiasaan cepat sekali tersenyum dan menyapa terlebih dahulu. Belum sempat penulis 'menyetel' peralatan merekam, Ibu Siti Fauziah sudah 'duluan' mempersilahkan untuk minum dan meminta penulis mencoba camilan yang ada di meja.

Penulis mencoba mengulik kebiasaannya tersebut. Beliau hanya tertawa dan berceloteh singkat. "Emang ga boleh senyum sapa duluan, sudahlah murah, sehat, merupakan bentuk ibadah yakni sedekah dalam Islam," ujarnya.

Sesi wawancarapun kemudian berlangsung lancar, sesekali disela dengan goyunan segar.

Siti Fauziah atau biasa disapa Ibu Titi, merupakan nama lengkap dari sosok wanita birokrat tangguh ini. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 29 November 1965. Masa kecil Ibu Titi, bisa dibilang tidaklah mudah. Ia kerap berpindah rumah mengikuti orang tuanya.

Sampai usia usia 2 tahun, penggemar berat kulineran Sunda ini masih tinggal di Bandung, lalu pindah ke daerah Kayumanis, Jakarta. Lalu, pada tahun 1970, ia pindah ke wilayah Cilandak Jakarta.

Sejak kecil Ibu Titi dilingkari dengan lingkungan beragama yang kuat. Ia menjalani masa pendidikan mulai dari pendidikan TK, pendidikan dasar, menengah atas hingga pendidikan tingginya di Jakarta.

Pendidikan Taman Kanak-Kanaknya pada tahun 1970 dilaluinya di TK Mawar Jakarta, Pendidikan dasarnya di SD 1043 Jakarta. Pendidikan menengah pertamanya di SMP 68 Jakarta dan pendidikan

menengah atasnya di SMA 46 Jakarta yang dikenal sebagai SMA Texas. Ia kemudian meneruskan pendidikan jenjang S1 di Universitas Pancasila Jakarta lulus 1989, jenjang S2 di Universitas Kejuangan 45.

Setahun setelah lulus kuliah, tepatnya tahun 1990 Ibu Titi mencoba peruntungannya mengabdi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Tapi, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tahun itu, ia gagal.

"Padahal, menurut informasi nilai saya tertinggi. Tapi memang ada faktor 'X' yang membuat saya gagal masuk ke MPR saat itu," katanya.

Pasca lulus kuliah,memang saat-saat yang berat buat beliau, selain kegagalannya mendaftar di MPR, tepat ketika beliau lulus pada tahun 1989, sang ayahanda tercinta dipanggil sang Pencipta. Namun, ia teringat pesan ayahnya untuk terus mandiri. "Saya berusaha tegar waktu itu walaupun terasa sangat sedih," kenangnya.

Di sini ketangguhan dan kesabaran Ibu Titi teruji, sehingga baru di tahun 1991, ia bisa berhasil tembus masuk sebagai PNS Setjen MPR RI. Sebenarnya, sejak kuliah hingga dipanggil bekerja di Setjen MPR, Ibu Titi sudah mengembangkan bakat dagangnya, istilah kerennya jadi seorang 'entrepreneur' dengan membuat usaha konveksi produk *handycraft*.

"Jangan salah, walaupun menengah, tapi konveksi saya sudah terbilang cukup maju, karena produk saya sudah masuk ke toko-toko besar seperti Pasaraya, Matahari dan Metro," ungkapnya.

Ketika kesempatan bekerja di Setjen MPR terbuka, Ibu Titi dihadapkan pada dua pilihan besar yang sama-sama sulit yakni, terus melanjutkan usaha konveksinya atau menapaki karir sebagai PNS.

"Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengabdi di MPR. Walaupun niat saya ingin menjalankan keduanya, namun saya tidak ingin kehilangan fokus dan konsentrasi saya menjalankan tugas di MPR. Mantap saya putuskan untuk meninggalkan usaha konveksi dan terus fokus berkarir di MPR," katanya.

Serba serbi menjalankan tugas di Setjen MPR

Pertama kali bekerja di Setjen MPR, Ibu Titi ditempatkan di Bagian Keuangan. Dari sana, ia ditempatkan di Sesus Ahli, lalu dipindah dan dipercaya menjabat Kepala Sub Bagian di Asosbud (agama, sosial dan budaya).

"Bagian itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian, saya ditempatkan kembali di keuangan dan memegang beberapa jabatan sekaligus, antara lain sebagai bendahara dan verifikator itu di tahun 1999," imbuhnya.

Di tahun 2000, Ibu Titi masuk ke Panitia Ad Hoc I (PAH I) yang waktu itu sedang sangat sibuk melaksanakan tugas Amandemen

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

UUD 1945. Pada saat pelaksanaan Amandemen kedua dan ketiga, ia dipercaya menjabat Kepala Bagian di PAH I.

Setelah dari PAH I, tahun 2002 atau 2003, Siti Fauziah pindah menjabat Kabag PAH Khusus mengenai anggaran. "Setelah tugas PAH selesai, saya pindah ke Tata Usaha atau TU hanya sekitar 6 bulan, kemudian saya di *challenge* untuk menduduki jabatan lain sebagai Kepala Sekretariat Sekretaris Pimpinan dimana Wakil Ketua MPR waktu itu Ibu Mooryati Soedibyo, saya bertugas mendampingi beliau hingga tuntas masa jabatan beliau," paparnya.

Usai itu, Ibu Titi bertugas mendampingi Pimpinan MPR Ibu Melani Leimena Suharli sampai tahun 2013. Tahun 2013, ia diangkat menjabat Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, di tahun 2014 menjabat Kepala Biro Umum dan di tahun 2016 menjabat Kepala Biro Humas, lalu di tahun 2023 dipercaya sebagai Deputi Administrasi.

"Pengalaman yang paling luarbiasa menyangkut perjalanan sejarah bangsa yang saya alami adalah, ketika saya menjabat Kabag PAH I yang melaksanakan Amandemen Konstitusi. Karena sedang melaksanakan amanat reformasi, yakni perubahan konstitusi atau UUD 1945, ritme bekerjanya sangat luarbiasa padat dan rutin, sehingga saya terpaksa saya membagi menjadi dua shift untuk menjaga kontinuitas rapat. Dan alhamdulillah berhasil kami menjalakannya dengan baik dari Amandemen II hingga ke III," katanya.

Lalu ketika, Ibu Titi bertugas di PAH Khusus dan Paripurna terjadi kejadian lucu juga agak mengesalkan.

"Jadi saya harus menyiapkan keperluan Sidang Paripurna sampai Komisi. Ada kejadian lucu sekaligus membuat *deg-degan*. Waktu itu, kita harus menyiapkan semua ruangan untuk Rapat Paripurna sampai ke Komisi. Saya minta Kasubag saya, untuk menyusun semua. Saya pikir sudah beres, perkiraan saya ba'da Magrib sudah selesai, kita pulang istirahat untuk besok kembali hadir menghadiri rapat. Ternyata staf saya itu, datang kepada saya bilang bahwa dia bingung cara menyusun prisma nama di ruangan rapat," terangnya.

Ibu Titi pun kaget, setelah Magrib ia turun ke Ruangan Komisi, "Saya sampai berdiri di atas meja dan mulai menyusun prisma nama dibantu semua staf saya sesuai protap, Selesai tengah malam, sedangkan esok pagi saya harus hadir di sidang. Setelah memastikan semua siap, tengah malam lewat, saya pulang ke rumah, istirahat sebentar, ganti baju, setelah Subuh saya sudah *standby* di ruang rapat. Di saat rapat berlangsung, saya duduk di belakang komputer, saking lelah dan kurang istirahat, saya tertidur dan baru terbangun ketika mendengar riuh tepuk tangan, ternyata rapat sudah selesai," ujarnya, seraya tertawa mengingat kejadian lucu itu.

Tugas yang berkesan lainnya untuk Ibu Titi adalah saat mendampingi para wanita Pimpinan MPR RI, yakni Ibu Mooryati Soedibyo dan Melani Leimena Suharli.

"Mereka adalah wanita-wanita tangguh, dan saya cocok dengan mereka dan *alhamdulillah* mereka pun cocok dengan saya, bahkan Ibu Mooryati sudah menganggap saya seperti anak beliau sendiri, sehingga selama bertugas tidak ada kendala apa-apa sampai ,mereka mencapai masa akhir jabatan. Bahkan saking dekatnya saya dengan Ibu Mooryati saya mendampingi bukan hanya dalam urusan di MPR tapi juga urusan pribadi dan kegiatan perusahaan. Artinya, hampir seluruh waktu saya habis untuk mendamping beliau, sampai saat ini hubungan saya dan keluarga dengan Ibu Mooryati masih terjaga dengan baik, demikian juga dengan Ibu Melani Leimena Suharli yang saya dampingi selama 5 tahun juga," ujarnya.

Tugas yang juga sangat menantang saat Ibu Titi menjabat Kepala

Biro Humas, ia harus bisa beradaptasi dengan ritme yang berbeda, yakni selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Di situ hampir setiap saat, Ibu Titi mengasah *skill* komunikasinya. *Alhamdulillah* sedikit demi sedikit ia bisa, sehingga selama Ibu Titi bertugas hubungan baik dengan elemen Humas di berbagai instansi dan media massa atau wartawan terjalin dengan sangat baik.

Di Biro Humas, di masa kepemimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ibu Titi turun langsung menjaga kontinuitas rilis berita Pimpinan MPR seperti rilis berita Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah sampai Pak Syarief Hasan. Hal ini dilakukan, karena Pimpinan MPR terutama Pak Ketua MPR sangat *concern* dengan pemberitaan seputar kegiatan Pimpinan MPR.

Kejujuran adalah segalanya

Saat ini, di akhir September tepatnya, tanggal 27 September 2023, Ibu Titi dipercaya menduduki jabatan baru di Setjen MPR RI yakni Deputi Bidang Administrasi. Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji secara resmi dilaksanakan oleh Plt Sesjen MPR RI Janedjri M. Gaffar.

"Sebagai Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR, tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berperan dan mewujudkan visi MPR terbaik di masa depan itu," ujarnya, usai dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagai Deputi.

Ibu Titi melihat tugasnya sebagai Deputi tentu penuh tantangan berat. "Saya melihat cukup banyak tantangan dan tentunya tidak mudah menghadapinya. Tapi, saya yakin dengan dukungan semua pegawai di Setjen MPR, kita pasti bisa menghadapi tantangan seberat apapun," imbuhnya.

Untuk itu, sebagai Deputi, Ibu Titi mengajak seluruh komponen di Setjen MPR unuk bersinergi, berkolaborasi mewujudkan MPR menjadi lembaga terbaik di masa depan. Tentu saja dengan kerja-kerja yang sesuai dan menaati segala peraturan dan norma yang ada.

Lalu, di Bulan November 2023, Ibu Titi dipercaya menjalankan tugas jabatan sebagai Pelaksana Tugas / Plt Sekretaris Jenderal MPR RI menggantikan Plt Sesjen sebelumnya. Yang penulis heran dari sosok wanita ini, walaupun beliau sudah berada di posisi tertinggi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam jajaran jabatan di Setjen MPR, kebiasaan dan 'kelakuannya' seperti selalu senyum, tegur sapa duluan masih konsisten terjaga.

"Bu, apa sih tipsnya bisa konsisten seperti itu," tanya penulis. "Udahlah, hidup dibawa hepi aja. Jangan diberatin. Selalu syukuri apa yang ada dan yang dianugerahkan kepada kita. *Kudu silih asih silih asah jeung silih asuh*," katanya.

Diutarakan Ibu Titi, sebenarnya sangat tidak terbayang untuk menduduki posisi tersebut. "Tapi, sejak awal saya mengabdi di MPR, saya selalu berusaha dan bekerja maksimal dengan baik . Saya percaya , pasti lama kelamaan akan membuahkan prestasi," ucapnya.

Dari perjalanan karir seorang Siti Fauziah, dari awal menjadi staf hingga berada di posisi puncak sebagai Plt Sesjen MPR RI, ada benang merah yang bisa diambil, selalu dipegangnya dan menjadi prinsipnya yakni, asal mau kerja keras dengan jujur, amanah, berusaha terus dan jangan berhenti belajar, maka apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita upayakan akan berjalan dengan baik dan memberikan ketenangan hidup.

Kejujuran baginya asalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Kejujuran, walaupun pahit bagi orang lain, terkesan arogan buat orang lain, saya akan terus terapkan dan jalankan, walaupun hasilnya belum tentu baik untuk kita, karena saya menjalankan juga pesan orang tua saya untuk selalu memegang amanah yang dipercayakan dengan baik," tegasnya.

"Ada hal lain, saya sangat percaya intuisi atau firasat saya yang selama ini *alhamdulillah,* memang tajam. Ada hal-hal terutama soal penandatanganan, jika di balik itu ada sesuatu yang tidak beres, bahkan sampai merugikan saya, biasanya firasat saya akan muncul, itu sering sekali muncul dan *alhamdulillah* semua itu datang dari Allah SWT, mudah-mudahan selalu menjaga saya terus dalam memegang amanah jabatan di mana pun," jelasnya.

Satu lagi , keluarga. Keluarga adalah nomer satu buat Ibu Siti Fauziah. Merekalah yang selalu setia mendukungnya. Walaupun sakit, jatuh bangun menghadapi banyak hal berat, tapi keluarga selalu berada di sisinya, membantunya semangat dan bangun lagi. ❑

DER

Persatuan "Mantra" Bagi Akselarasi Tujuan Berbangsa

BARU saja kita memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ke-95. Hari yang dikenang sebagai bangkitnya kesadaran anak-anak muda dari penjuru nusantara untuk bangkit harga dirinya, sebagai bangsa jajahan.

Kesadaran baru, membangkitkan rasa nasionalisme terpatri dalam piagam Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Ke-2 Pemuda di rumah kontrakan milik Sie Kong Lian, di Jalan Kramat Raya 106 sekarang.

Di gedung didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908 Gedung Kramat disewa pelajar sekolah kedokteran Jawa atau Stovia (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) dan pelajar/ mahasiswa sekolah hukum atau RS (Rechtsschool) sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu di gedung tempat pelajar dan mahasiswa itu dikenal dengan nama Commensalen Huis.

Kegairahan anak-anak muda yang memandang cakrawala baru, masa depan Indonesia atas kolononiaslime usang telah memompa keberanian, di atas ancaman dari penguasa kolonial Belanda.

Maka, kita bisa menyelami semangat para Pemuda itu dari teks yang diikrarkan, yaknti: Pertama, "Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia"; Kedua, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia"; Ketiga, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia."

Tidak itu saja, pada hari itulah untuk pertama kalinya Komponis, jurnalis juga seniman Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Mungkin belum semua peserta Kongres Pemuda saat itu hapal lagu tiga stanza ini.

Namun, setiap syairnya pastilah cepat sekali dapat dihayati semua pemuda yang hadir. Kita membayangkan sambil membaca teks syair Indonesia Raya dari kertas stensilan yang dibagikan dan dipandu gadis remaja jelita Theodora Athia Salim, puteri tokoh pejuang Agus Salim, yang sedikit mengubah syair: "merdeka-merdeka dengan kata mulia-mulia". Cara ini menyiasati Congres yang dijaga polisi intelijen

Belanda (PID) yang melarang ada kata merdeka di tempat Kongres.

Inilah stanza ketiga, yang begitu senapas dan sejalan dengan isi Sumpah Pemuda. "Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri, jaga Ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi".

Kongres Pemuda ke-2 yang dihadiri tokoh-tokoh pergerakan

Oleh:
H. Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI

nasional yang kelak akan menjadi para pendiri bangsa, telah mempercepat kemerdekaan Indonesia. Jika sebelumnya pemerintah Hindia Belanda mampu memecah belah warga nusantara menjadi perlawanan kedaerahan. Kini, di tangan para pemuda terpelajar perjuangan itu disatukan. Tak lagi perjuangan rakyat Aceh semata, perlawanan Jawa semata, Banjar, Sulawesi, Maluku dan Papua. Inilah perlawanan seluruh rakyat nusantara, yang selama hidup 300-an tahun lebih dikangkangi penjajah Belanda. Perlawanan yang melampaui batas kesukuan, agama, adat istiadat, dan feodalisme lama yang menyuburkan penjajahan.

Bagaimana pemuda Mohamad Jamin dari Jong Sumatranen Bond mengusulkan dan disepakati Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa tanpa kasta, yang membedakan para penuturnya, tetapi cepat mudah dipahami penghuni nusantara karena telah menjadi bahasa perdagangan atau Lingua Franca.

Maka, dari semangat persatuan para Pemuda yang tercerahkan itu, sinar dari api kemerdekaan segera menyala. Hanya butuh 17 tahun kemudian, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaan.

Bandingkan sebelumnya, penjajah Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang menjadikan nusantara sebagai koloni mereka, menjalankan politik pecah belah dan ditumbuhsuburkan dengan feodalisme maka tiga ratusan tahun Belanda mampu menghisap kekayaan bumi nusantara tanpa rakyat dan pemimpin daerah sanggup mengusirnya.

Inilah "mantra" persatuan Indonesia. Persatuan seluruh warga bangsa ternyata mempercepat tujuan bersama. Persatuan kegotongroyongan, saling menolong adalah praktik karakter baik yang mampu melompati seluruh tantangan hidup berbangsa.

Bagaimana pemuda Soaenario Sastrowardoyo dan Soegondo Djojopoespito, mampu menerjemahkan gerakan muda Indonesia, adalah bagian dari gerakan kaum muda yang sedang bergerak pula di berbagai negara. Ini menjadi semacam jembatan bahwa kaum muda Indonesia tidak sendirian. Bersama kaum muda dunia memandang luas horizon di atas cakrawala Indonesia merdeka.

Kini setelah 95 tahun Sumpah Pemuda, dan 78 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa, kita semakin menyadari arti persatuan itu. Dengan semangat persatuan atau semangat kebersamaan, bangsa ini mampu melewati prahara politik 1965, krisis ekonomi dan reformasi 1998, bahkan pandemi yang melanda seluruh dunia, berhasil dengan cepat kita selesaikan karena kita bersatu.

Karenanyalah, apa yang diikhtiarkan calon Presiden Prabowo Subianto, akan pentingnya persatuan tentunya melewati kehendak pribadi Prabowo Subianto dan partai Gerindra, serta koalisinya. Persatuan telah menjadi kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia menghadapi tantangan, hambatan, bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.

Tujuan dan cita-cita berbangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bukan suatu yang mustahil akan lebih cepat tercapai jika seluruh anak bangsa menyadari persatuan, bergandengan tangan dengan erat pada satu tujuan mewujudkannya. ❑

Membatasi Kewenangan Pembuat Undang-Undang

Perlu pembatasan kewenangan membuat undang-undang ada tidak terjadi kesewenang-wenangan. Di sinilah peran penting hadirnya MK. Satu buku dihadirkan untuk menjawab masalah itu.

DALAM sampul belakang buku berjudul *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Mahkamah Konstitusi* dikemukakan, dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui adanya ruang bebas bagi pembentuk undang-undang. Ruang demikian disebut sebagai *Kebijakan Hukum Terbuka* yang menempatkan semua rumusan norma undang-undang bernilai konstitusional selama tidak ada norma payung di dalam UUD 1945 yang dapat difungsikan sebagai parameter uji. Dengan kata lain, kekosongan noma dalam UUD menjelma sebagai ruang bebas bagi pembentuk undang-undang untuk secara manasuka menyusun materi undang-undang. Namun, dalam sebuah negara hukum, kebebasan tidak boleh benar-benar tanpa batas. Harus selalu ada pembatasan agar tidak kebablasan menjadi kesewenang-wenangan.

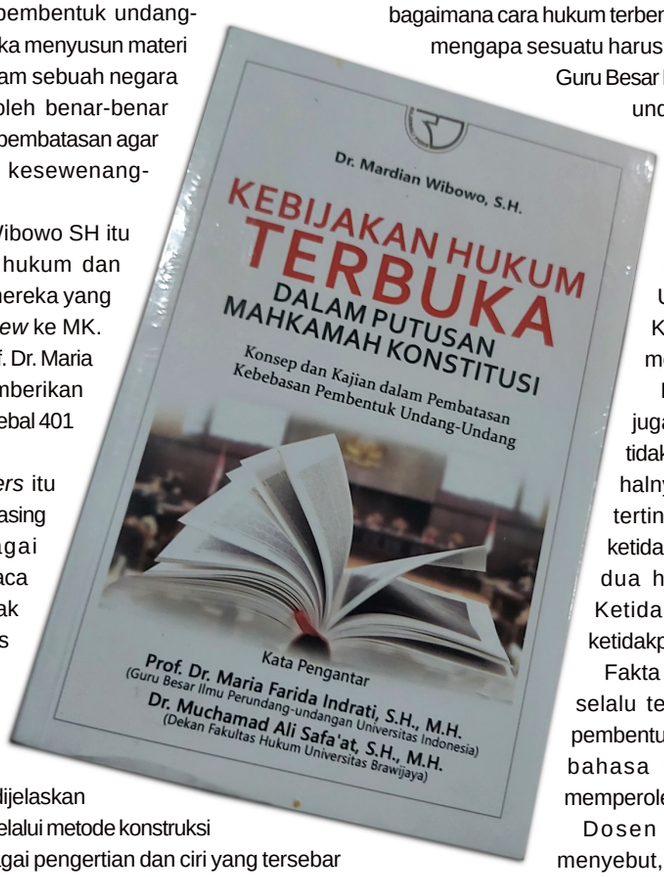

Buku karya Dr. Mardian Wibowo SH itu layak dibaca oleh praktisi hukum dan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin melakukan *judicial review* ke MK. Apalagi mantan hakim MK, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH., memberikan kata pengantar dalam buku setebal 401 + xxv halaman itu.

Buku terbitan *Rajawali Pers* itu terbagi dalam 8 bab. Masing-masing bab menjelaskan berbagai permasalah yang ada. Pembaca dituntun setapak demi setapak tentang hukum dan proses menuju sana.

Dalam *Prakata*, Mardian menjelaskan mengenai pengertian kebijakan hukum terbuka – karena tidak terang dijelaskan MK – maka harus ditemukan melalui metode konstruksi dengan cara menyusun berbagai pengertian dan ciri yang tersebar pada berbagai putusan pengujian undang-undang. Lantas dengan mempertimbangkan berbagai kondisi pengujian konstitusionalitas undang-undang, penulis melakukan dekonstruksi terhadap makna kebijakan hukum terbuka dimaksud hingga ditemukan makna ideal dalam kebijakan hukum terbuka.

Lebih lanjut diungkap oleh alumni UGM itu, tawaran makna baru kebijakan hukum terbuka demikian meliputi perluasan parameter uji atau dasar pengujian undang-undang dan berujung pada (penambahan) pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang dalam proses legislasi. Artinya, materi perundang-undangan yang selama ini boleh dibentuk secara manasuka oleh pembentuk undang-undang dan 'tidak dapat' diuji oleh MK karena ketiadaan parameter uji, akan tidak ada lagi demikian.

Maria Farida dalam *Pengantar* mengatakan, hukum dekat dengan kita dalam keseharian karena setiap tindakan kita dilandaskan pada hukum. Ironisnya, sekaligus hukum terasa asing bagi masyarakat kebanyakan. Hal demikian karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara hukum terbentuk, apalagi ketika berbicara mengenai mengapa sesuatu harus diatur oleh undang-undang.

Guru Besar FH UI itu menyebut kebeban pembentuk undang-undang yang tanpa batas dapat memunculkan kesewenang-wenangan. Maka diperlukan pembatasan terhadap kebebasan pembentukan undang-undang. Permbatasan demikian dilakukan oleh UUD dengan memunculkan pengadilan Konstitusi, yaitu MK yang bertugas menilai konstitusionlitas udang-undang.

Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH., juga dalam *Kata Pengantar* mengatakan, tidak ada hukum yang sempurna. Demikian halnya dengan konstitusi sebagai hukum tertingi. Dalam pandangan H.L.A. Hart, ketidaksempurnaan hukum bersumber pada dua hal saat pembentukannya, yaitu: Ketidakpedulian relatif pada fakta, dan ketidakpedulian relatif pada maksud.

Fakta yang mampu dilihat oleh pembentuk selalu terbatasi ruang dan waktu. Maksud pembentukan hukum selalu disamarkan dalama bahasa yang abstrak dan umum agar memperoleh persetujuan bersama.

Dosen FH Universitas Brawijaya itu menyebut, pada level konstitusi, ruang kosong semakin banyak dan bahasa yang digunakan semakin abstrak. Apakah ruang kosong dan operasionalitas norma konstitusi ini sepenuhnya menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang? MK yang belum genap berusia dua dasawarsa tampaknya telah menemui dan menghadapi pertanyaan tersebut. Inilah yang disebut oleh MK sebagai Kebijakan Hukum Terbuka. ❑

AWG

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI